



**KEPUTUSAN JEPANG MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA
“WANITA PENGHIBUR” (IANFU) KOREA SELATAN TAHUN 2015**

***JAPAN'S DECISION TO COMPENSATE SOUTH KOREAN'S
“COMFORT WOMEN” (IANFU) IN 2015***

SKRIPSI

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar sarjana sosial**

oleh

BERTHA VIQIE LORENTYA

NIM 120910101037

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Mamaku Eti Hartati Ningsih, ayahku Basuki, dan adikku Septie Diva Murbarani yang tercinta;
2. Budeku Yuni Astuti Ningsih, nenekku Suwarningsih, dan kakekku Sujitno;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Time is relative. It can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards.”^{})*

atau

*“Those who forgive themselves, and are able to accept their true nature... They are the strong ones.”^{**)})*

atau

*“I want to make Japan become ‘born again’ by opening up Japan to the world, transforming it into a society that takes on challenges in the face of risk, and remake it into a place where innovation blossoms through harnessing the power of women, youth, and people from outside Japan.”^{***)})*

^{*}) Christopher Nolan (Produser). 2014. *Interstellar*. Warner Bros. Pictures. Los Angeles, Amerika Serikat. 169 menit.

^{**) Masashi Kishimoto. 2013. *Naruto Shippuden*. Tokyo: Shueisha Inc.}

^{***)} Pernyataan PM Shinzo Abe dalam pidatonya pada 19 Juni 2013.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Bertha Viqie Lorentya

NIM : 120910101037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan Jepang Membayar Ganti Rugi kepada ‘Wanita Penghibur’ (*Ianfu*) Korea Selatan Tahun 2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juni 2017

Yang menyatakan,

Bertha Viqie Lorentya

NIM 120910101037

SKRIPSI

**KEPUTUSAN JEPANG MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA
“WANITA PENGHIBUR” (IANFU) KOREA SELATAN TAHUN 2015**

Oleh

Bertha Viqie Lorentya

NIM 120910101037

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Agus Trihartono, S. Sos., MA., Ph. D.

Dosen Pembimbing Anggota

: Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph. D.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keputusan Jepang Membayar Ganti Rugi kepada ‘Wanita Penghibur’ (*Ianfu*) Korea Selatan Tahun 2015” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 4 Juli 2017

tempat : Ruang LKP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Tim Pengaji
Ketua,

Drs. Supriyadi, M. Si.
NIP 195803171985031003

Anggota I,

Anggota II,

Agus Trihartono, S. Sos., MA., Ph. D. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph. D.
NIP 196908151995121001 NIP 196108281992011001

Anggota III,

Anggota IV,

Drs. Agung Purwanto, M. Si.
NIP 196810221993031002

Dr. Muhammad Iqbal, S. Sos., M. Si.
NIP 197212041999031004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Ardiyanto, M. Si.
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Keputusan Jepang Membayar Ganti Rugi kepada “Wanita Penghibur” (*Ianfu*) Korea Selatan Tahun 2015; Bertha Viqie Lorentya; 120910101037; 2017; 95 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pada tanggal 28 Desember 2015, Jepang dan Korea Selatan mencapai kesepakatan mengenai isu *ianfu*. Melalui kesepakatan tersebut, Jepang meminta maaf kepada mantan *ianfu* Korea Selatan atas kekejamannya di masa penjajahan dan akan memberikan dana sebesar 1 milyar yen sebagai kompensasi. Padahal sebelumnya, pemerintah Jepang telah berkali-kali mengungkapkan permintaan maaf kepada para *ianfu* dan mendirikan sebuah lembaga pendanaan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat Jepang yang kemudian digunakan sebagai kompensasi bagi mantan *ianfu*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan pemerintah Jepang menyelesaikan isu *ianfu* Korea Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, serta media cetak dan *online*. Data-data tersebut dianalisis dan dideskripsikan untuk memperoleh gambaran secara utuh permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keputusan pemerintah Jepang menyelesaikan isu *ianfu* Korea Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari 2 hal, yaitu pemerintah Jepang tidak ingin isu *ianfu* menjadi tanggungan generasi Jepang mendatang dan kepentingan Jepang untuk mempromosikan dan mendukung hak-hak perempuan. Sementara itu, faktor eksternalnya adalah tuntutan Korea Selatan dan masyarakat internasional, serta keinginan Jepang untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungannya dengan Korea Selatan. Pemerintah Jepang juga ingin memperbaiki citra Jepang di mata internasional dan menunjukkan bahwa Jepang adalah negara yang bertanggungjawab atas tindakannya pada Perang Dunia II.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘Keputusan Jepang Membayar Ganti Rugi kepada ‘Wanita Penghibur’ (*Ianfu*) Korea Selatan Tahun 2015’. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Agus Trihartono, S. Sos., M. A., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Himawan Bayu Patriadi, M. A., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membantu penulis menyusun skripsi ini;
2. Sahabat sekaligus keluargaku: Anifa Ludfiani, Mirna Ardiyanti Pratama, Renza Elma Pramitha, dan Tri Indah Oktavianti yang telah menemani penulis selama kuliah di Jember serta banyak membantu dan memberikan motivasi. Pranata Dwi Kusuma, *iro-iro hontou ni arigatou*. Juga kepada keluarga MNMA lainnya: Yery Bagus Iman, Adhyta Pahlawan, Ganda Atmaja, Mochammad Andi Saputra, Januar Tri Raharjo, Nur Ardi Setiawan, Firdaus Amir, Sahrian Arif Setiawan, terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa yang kalian berikan. *Nan to itte orei o moushite yoi ka, kansha no kotoba mo shirimassen. Tonikaku, anatatachi ga suki da yo!*;
3. Keluarga DUMMI, terutama Kiki Indriani dan Nur Chasanah, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
4. Teman-teman kost Bangka 4/33: Mbak Risa, Lisa, dan semuanya;
5. Teman-teman HI 2012 Joyo Wae; dan
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.

Jember, 8 Juni 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1. Batasan Materi	8
1.2.2. Batasan Waktu	9
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.6. Argumen Utama	18
1.7. Metode Penelitian	18
1.7.1. Teknik Pengumpulan Data	18
1.7.2. Teknik Analisis Data	19
1.8. Sistematika Penulisan	19
BAB 2. IANFU DALAM POLITIK DOMESTIK KOREA SELATAN	21
2.1. Ianfu pada Masa Penjajahan Jepang	21
2.2. Tuntutan Korea Selatan	27

2.2.1. Tuntutan <i>Ianfu</i> dan Organisasi Sosial di Korea Selatan	28
2.2.2. Tuntutan Pemerintah Korea Selatan	36
BAB 3. IANFU DALAM HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA	
SELATAN	43
3.1. Hubungan Jepang dan Korea Selatan	47
3.2. <i>Ianfu</i> dalam Hubungan Jepang – Korea Selatan	52
BAB 4. KEPUTUSAN JEPANG MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA	
IANFU KOREA SELATAN	73
4.1. Keputusan Jepang dan Korea Selatan mengenai Isu <i>Ianfu</i>	74
4.2. Alasan Jepang Membayar Ganti Rugi kepada Mantan <i>Ianfu</i>	
Korea Selatan	78
4.2.1. Faktor Internal	79
4.2.2. Faktor Eksternal	84
BAB 5. KESIMPULAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah <i>ianfu</i> berdasarkan perkiraan ilmuwan	8
2.1 Artikel JoongAng Ilbo (surat kabar Korea Selatan) yang menyebutkan “ <i>comfort women</i> ”	27

DAFTAR SINGKATAN

AWF	: <i>Asian Women's Fund</i>
DPJ	: <i>Democratic Party of Japan</i>
GSOMIA	: <i>General Security of Military Information Agreement</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICJ	: <i>International Commission of Jurists</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IOC	: <i>International Organizing Committee</i>
LDP	: <i>Liberal Democratic Party</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PM	: Perdana Menteri
ROK	: <i>Republic of Korea</i>
VAWW-NET Japan	: <i>Violence Against Women in War Network, Japan</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A. Japan-Republic of Korea Relations Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion	104
B. Patung Simbol <i>Ianfu</i> (<i>Pyeonghwa-bi</i>) di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul, Korea Selatan	106
C. Treaty of Peace with Japan. Signed at San Francisco, on 8 September 1951	107
D. Agreement on the Settlement of Problems Concerning Property and Claims and on Economic Co-operation between Japan and the Republic of Korea. Signed at Tokyo, on 22 June 1965	119

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara yang saling berdekatan dan memiliki kebudayaan yang hampir mirip, namun hubungan kedua negara sering mengalami dinamika akibat konflik di masa lalu. Sejarah konflik Jepang dan Korea Selatan dimulai pada tahun 1910 ketika Jepang mengatur penandatanganan *Japanese-Korean Annexation Treaty* yang menyatakan bahwa Kekaisaran Jepang mengambil alih Kerajaan Korea, membuatnya menjadi bagian dari Jepang dan menjadi jajahan Jepang.¹ Sejak saat itu, Jepang menguasai seluruh hak dan fungsi politik Korea, baik urusan politik dalam negeri maupun luar negeri. Pendudukan Jepang atas Korea dilakukan karena Jepang ingin menjadikan wilayah Korea sebagai wilayah penyangga (*buffer zone*) untuk menghadapi kekuatan Rusia di Asia Timur dan menjadikan Korea sebagai pangkalan militer untuk melakukan agresi ke daratan China.

Selama masa pendudukan Jepang di Korea, yaitu pada tahun 1910 hingga 1945, tentara Jepang banyak melakukan kekejaman terhadap masyarakat Korea, termasuk mengumpulkan gadis-gadis muda berusia 14 sampai 18 tahun dan memaksa mereka menjadi “wanita penghibur”² bagi tentara Jepang.³ Mereka lebih dikenal dengan sebutan *ianfu* dalam Bahasa Jepang atau “*comfort women*” dalam Bahasa Inggris. Sebanyak kurang lebih 200.000 wanita dipaksa menjadi *ianfu* pada masa Perang Dunia II, di mana sebagian besar adalah warga Korea.⁴ Wanita-wanita muda direkrut oleh militer Jepang menjadi *ianfu* melalui penipuan atau

¹ International Society for Educational Information. 1995. *Japan in Modern History: High School Vol. I*. Tokyo: International Society for Educational Information. Inc. Hal. 362.

² Istilah “wanita penghibur” atau “*comfort women*” di sini tidak digunakan untuk merujuk pada wanita penghibur yang sebenarnya. Karena gadis-gadis tersebut dipaksa oleh militer Jepang, berlawanan dengan kehendak mereka sendiri. Mereka adalah korban pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan berulang-ulang oleh militer Jepang. Istilah ini telah banyak digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah di Indonesia maupun jurnal-jurnal internasional dan diperbolehkan untuk tujuan akademis.

³ Sue R. Lee. 2003. “Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay”. *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*. Hal. 4.

⁴ BBC. 2015. ‘Comfort women’: Japan and South Korea Hail Agreement. (www.bbc.com/news/world-asia-35190464)

penculikan. Para *ianfu* tersebut dipaksa melayani nafsu seks tentara Jepang setiap hari, dipukuli, ditikam, atau dijadikan objek penyiksaan oleh tentara tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak bisa melarikan diri atau melawan tentara Jepang, karena jika melakukan hal ini, mereka akan mendapat siksaan yang parah. Militer Jepang juga menghalangi mereka untuk melakukan bunuh diri, dengan ancaman keluarga mereka yang akan dilukai jika mereka melakukannya. Meskipun telah dipaksa bekerja setiap hari, namun mereka hampir tidak mendapatkan uang. Ketika Perang Dunia kedua berakhir di tahun 1945, banyak tentara Jepang yang melakukan bunuh diri dan memaksa para *ianfu* untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan karena militer beranggapan bahwa lebih baik mati daripada ditangkap dan tunduk pada musuh. *Ianfu* yang selamat kebanyakan ditinggalkan di *comfort station* (tempat mereka tinggal selama melayani para tentara Jepang).⁵

Kekejaman tentara Jepang terhadap para *ianfu* yang mayoritas berasal dari Korea, membuat Korea Selatan menuntut Jepang untuk bertanggung jawab, meminta maaf, dan membayar ganti rugi kepada mereka yang pernah dipaksa menjadi *ianfu*. Berawal pada akhir tahun 1991, masyarakat Korea Selatan melayangkan protes agar Jepang memenuhi tuntutan mereka. Sebuah kelompok aktivis Korea Selatan yang bernama *The Korean Council* bahkan membuat patung seorang gadis yang mengenakan *hanbok* (pakaian tradisional Korea) diiringi dengan bayangan perempuan tua di bawah kakinya. Patung yang diletakkan di depan Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan ini adalah simbol perbudakan seks pada zaman penjajahan Jepang.⁶

Isu *ianfu* pertama kali muncul ke permukaan ketika Kim Hak-sun dan beberapa mantan *ianfu* lainnya mengajukan gugatan pada pemerintah Jepang agar meminta maaf dan memberikan kompensasi pada mantan *ianfu* di Pengadilan Negeri Tokyo pada 6 Desember 1991.⁷ Gugatan ini mendapatkan respon dari Ketua Sekretaris Kabinet, Kato Koichi, yang menyatakan dalam sebuah

⁵ Sue R. Lee. *op.cit.*, hal. 9.

⁶ Silviana Dharma. 2015. *PM Jepang Minta Patung Jugun Ianfu di Korsel Dihilangkan*. (<http://news.okezone.com/read/2015/11/19/18/1252478/pm-jepang-minta-patung-jugun-ianfu-di-korsel-dihilangkan>)

⁷ Komnas HAM. 2013. *Pengadilan Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan: Keputusan 4 Desember 2001*. Jakarta: Komnas HAM. Hal. 366.

konferensi pers bahwa *comfort station* memang ada, namun tidak ada bukti bahwa pemerintah terlibat dalam proses perekrutan *ianfu*. Pernyataan mengenai *ianfu* tidak hanya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Kato, tetapi juga oleh Perdana Menteri Miyazawa Kiichi. Dalam kunjungan resminya ke Korea Selatan pada bulan Januari 1992, PM Miyazawa menyatakan permintaan maaf dan menyesal untuk mereka yang pernah menjadi *ianfu*.⁸ Gugatan oleh mantan *ianfu* tersebut, ditambah dengan penemuan dokumen resmi yang menyebutkan bahwa militer terlibat dalam *comfort system*,⁹ berdampak pada sikap pemerintah Jepang mengenai isu *ianfu*. Dalam sebuah konferensi pers tanggal 13 Januari 1992, Sekretaris Kabinet Kato menyatakan permintaan maaf dan mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam *comfort system* tidak dapat dipungkiri.¹⁰

Pengakuan yang paling komprehensif mengenai *comfort system*¹¹ diungkapkan oleh Ketua Sekretaris Kabinet, Yohei Kono, pada tanggal 4 Agustus 1993. Pernyataan itu dikenal dengan sebutan *Kono Statement*. Yohei Kono menyatakan bahwa:

“Comfort stations were operated in response to the request of the military authorities of the day. The then Japanese military was, directly or indirectly, involved in the establishment and management of the comfort stations and the transfer of ‘comfort women’. The recruitment of the ‘comfort women’ was conducted mainly by private recruiters who acted in response to the request of the military. The Government study has revealed that in many cases they were recruited against their own will, through coaxing, coercion, etc., and that, at times, administrative/military personnel directly took part in the recruitments . . . The Government of Japan would like to take this opportunity once again to extend its sincere apologies and remorse to all those, irrespective of place of origin, who suffered immeasurable

⁸ *ibid.*, hal. 416.

⁹ Dokumen tersebut ditemukan oleh Profesor Yoshimi Yoshiaki, seorang sejarawan dari Universitas Chuo. Diakses dari Norimitsu Onishi. 2007. *In Japan, a Historian Stands by Proof of Wartime Sex Slavery*. (http://www.nytimes.com/2007/03/31/world/asia/31yoshimi.html?_r=0)

¹⁰ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2014. *Details of Exchanges Between Japan and the Republic of Korea (ROK) Regarding the Comfort Women Issue ~ From the Drafting of the Kono Statement to the Asian Women’s Fund ~*. (<http://www.mofa.go.jp/files/000042171.pdf>)

¹¹ *Comfort system* merupakan keseluruhan proses perekrutan *ianfu* serta pembentukan peraturan tentang pengelolaan dan pengoperasian *comfort station* atau tempat di mana para *ianfu* tinggal dan melayani nafsu seks tentara Jepang.

pain and incurable physical and psychological wounds as ‘comfort women’.”¹²

(Comfort stations dioperasikan sebagai respon atas permintaan otoritas militer pada saat itu. Militer Jepang pada saat itu, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam pembentukan dan manajemen comfort stations dan pemindahan ianfu. Rekrutmen ianfu dilakukan terutama oleh perekrut swasta yang bertindak untuk merespon permintaan militer. Penyelidikan pemerintah telah mengungkap bahwa dalam banyak kasus mereka (ianfu) direkrut bertentangan dengan kehendak mereka, dengan cara dibujuk, dipaksa, dan lain-lain, dan pada saat itu personel militer secara langsung mengambil bagian dalam perekrutan . . . Pemerintah Jepang ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk memperpanjang permintaan maaf yang tulus dan penyesalan untuk semua orang, terlepas dari tempat asal, yang menderita sakit yang tak terukur serta luka fisik dan psikologis yang tidak dapat disembuhkan sebagai ‘wanita penghibur’.)

Dalam pernyataannya tersebut, Kono mengakui bahwa militer Jepang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pembentukan dan manajemen *comfort stations*, serta perekrutan *ianfu*. Perekrutan itu dilakukan oleh militer atau oleh pihak swasta atas permintaan pihak militer. Sekretaris Kabinet Kono atas nama Pemerintah Jepang meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap wanita-wanita yang dipaksa menjadi *ianfu*. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan merespon positif pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa Pemerintah Jepang, melalui pernyataan tersebut, menunjukkan kesungguhannya untuk melihat isu *ianfu* sebagai sebuah pelajaran sejarah.¹³

Permohonan maaf oleh pejabat Jepang tidak hanya dilakukan oleh Ketua Sekretaris Kabinet Yohei Kono, tetapi juga oleh Perdana Menteri Murayama Tomiichi pada tahun 1994 dan 1995. PM Murayama meminta maaf dan mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas agresi, pendudukan kolonial, dan penderitaan yang dirasakan oleh *ianfu* di masa perang. Pernyataan PM Murayama tersebut berdampak positif terhadap tuntutan Korea Selatan terkait isu

¹² Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1993. *Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on The Result of The Study on The Issue of "Comfort Women".* (www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html)

¹³ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2014. *Details of Exchanges Between Japan and the Republic of Korea (ROK) Regarding the Comfort Women Issue ~ From the Drafting of the Kono Statement to the Asian Women’s Fund ~* (<http://www.mofa.go.jp/files/000042171.pdf>)

ianfu, yaitu dengan dibentuknya sebuah lembaga pendanaan yang bekerja sama dengan masyarakat Jepang untuk memberi kompensasi kepada para mantan *ianfu*. Pada 19 Juli 1995, pemerintah Jepang membentuk *Josei no Tameno Ajia Heiwa Yuko Kikin* (*Asian Peace and Friendship Foundation for Women*) atau disingkat *Ajia Josei Kikin* (*Asian Women's Fund*) yang pada awal pembentukannya mendapatkan subsidi dari anggaran fiskal pemerintah sebesar 480 juta yen.¹⁴ Hingga akhir Juni 1996, Asian Women's Fund telah mendapatkan dana sumbangan dari masyarakat Jepang sebanyak 400 juta yen yang kemudian diberikan sebagai kompensasi kepada mantan *ianfu* yang masih hidup, yaitu sebanyak 2 juta yen per orang.¹⁵ Namun, dana yang diberikan oleh Asian Women's Fund ini mendapatkan protes dari beberapa pihak, seperti mantan *ianfu* sendiri, Pemerintah Korea Selatan, dan para aktivis karena tidak murni berasal dari anggaran pemerintah, melainkan dari donasi beberapa pihak. Asian Women's Fund kemudian dibubarkan pada akhir Maret 2007 setelah memberikan kompensasi pada mantan *ianfu* Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Belanda, dan Indonesia. Meskipun Asian Women's Fund telah dibubarkan, namun permohonan maaf atas penderitaan yang dirasakan oleh mantan *ianfu* tidak berhenti. Permohonan maaf tersebut sering diperbarui atau diungkapkan kembali oleh Perdana Menteri Jepang selanjutnya, yakni pada tahun 1996 oleh PM Hashimoto Ryutaro¹⁶ dan pada tahun 2001 oleh PM Koizumi Junichiro melalui surat yang diberikan kepada mantan *ianfu*.¹⁷ Meskipun Jepang telah memberikan kompensasi bagi para mantan *ianfu* melalui Asian's Women Fund dan juga sering menyatakan permintaan maaf, namun itu masih belum cukup bagi pemerintah dan mantan *ianfu* Korea Selatan.

Jepang dan Korea Selatan memiliki persepsi yang berbeda mengenai isu *ianfu*. Korea Selatan menganggap masalah *ianfu* belum selesai karena menurut

¹⁴ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Establishment of The AW Fund, and the Basic Nature of Its Projects.* (<http://www.awf.or.jp/e2/foundation.html>)

¹⁵ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Projects by Country or Region-South Korea.* (<http://www.awf.or.jp/e3/korea.html>)

¹⁶ Prime Minister of Japan and His Cabinet. 1996. 日韓共同記者会見 (Japan-South Korea Joint Press Conference). (<http://www.kantei.go.jp/jp/hasimotosouri/speech/1996/kisya-0625.html>)

¹⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2001. *Letter from Prime Minister Junichiro Koizumi to the Former Comfort Women.* (<http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/pmletter.html>)

Korea Selatan, pemerintah Jepang tidak mengakui tanggung jawab hukum terhadap perbuatannya yang kejam di masa lalu dan tidak memberikan kompensasi secara resmi dari pemerintah.¹⁸ Sedangkan menurut PM Jepang, Shinzo Abe, masalah *ianfu* telah selesai pada tahun 1965, pada saat Jepang dan Korea Selatan sepakat menjalin kerjasama bilateral dan memperbaiki hubungan diplomatiknya. Dengan adanya perjanjian kerjasama bilateral tersebut, pemerintah Jepang menganggap bahwa masalah yang berkaitan dengan kejadian perang, termasuk *ianfu*, telah selesai. Namun, pada tahun 1991, isu *ianfu* muncul dan hingga tahun 2015, masyarakat dan pemerintah Korea Selatan terus menuntut pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab.

Korea Selatan menuntut pemerintah Jepang untuk segera menyelesaikan isu *ianfu* karena beberapa hal. Pertama, karena menurut aktivis dan pemerintah Korea Selatan sendiri, “waktu sudah hampir habis bagi para wanita tua mantan *ianfu*”. Banyak di antara mantan *ianfu* tersebut yang telah berusia lanjut, bahkan ada pula yang sudah meninggal dunia.¹⁹ Pemerintah Korea Selatan ingin membantu para mantan *ianfu* di negaranya untuk mendapatkan haknya dari pemerintah Jepang. Kedua, isu ini adalah penghalang yang telah membuat Korea Selatan sulit bergerak maju dalam hubungannya dengan Jepang.²⁰

Sejak April 2014, direktur jenderal kementerian luar negeri Jepang dan Korea Selatan mengadakan pembicaraan dan negosiasi mengenai isu *ianfu*, hingga akhirnya pemerintah kedua negara mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan isu ini pada tanggal 28 Desember 2015. Pemerintah Jepang meminta maaf dan bersedia membayar 1 miliar yen (sekitar 8,3 juta US dolar) dari anggaran nasionalnya bagi korban *ianfu* di Korea Selatan. Namun, pemerintah Jepang juga ingin agar pemerintah Korea Selatan memindahkan patung simbol *ianfu* yang

¹⁸ BBC. 2015. ‘Comfort Women’ – A Painful Legacy for Tokyo and Seoul (<http://www.bbc.com/news/world-asia-35188132>)

¹⁹ Mina Pollmann. 2015. ‘Comfort Women’ Issue Dominates Rare Japan – Korea Bilateral Talks. (<http://www.thediplomat.com/2015/11/comfort-women-issue-dominates-rare-japan-korea-bilateral-talks/>)

²⁰ Yuki Tatsumi. 2014. *Japan’s Foreign Policy Challenges in East Asia*. Washington, DC. : The Stimson Center. Hal. 33.

terletak di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul.²¹ Perjanjian ini merupakan yang pertama sejak Jepang menjalin kerjasama dengan Korea Selatan.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, permasalahan ini menarik untuk dikaji, mengingat Abe sebelumnya menganggap masalah *ianfu* ini telah selesai. Akan tetapi, Abe pada akhirnya bersedia membayar ganti rugi kepada *ianfu* Korea Selatan. Meskipun kesepakatan ini mengakhiri isu yang paling krusial dalam hubungan kedua negara, namun nampaknya tidak mudah bagi Abe membuat keputusan tersebut dan menghadapi implikasi yang mungkin muncul. Mengingat Abe adalah seorang politisi sayap kanan dari *Liberal Democratic Party* (LDP) yang merupakan partai sayap kanan pula. Abe mungkin harus menghadapi tekanan domestik yang mengkritik kesepakatan tersebut sebagai tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Jepang, seperti kritikan yang berasal dari politisi-politisi konservatif, anggota *Nippon Kaigi*,²² dan masyarakat Jepang yang memiliki sentimen anti-Korea.²³ Meskipun menghadapi kritikan-kritikan tersebut, namun Abe tetap memutuskan untuk membayar ganti rugi kepada mantan *ianfu* Korea Selatan. Oleh karena itu, penulis berusaha meneliti alasan apa yang mendorong keputusan Abe tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Keputusan Jepang Membayar Ganti Rugi kepada “Wanita Penghibur” (*Ianfu*) Korea Selatan Tahun 2015”**.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan agar pembahasan suatu fenomena tidak meluas dan keluar dari fokus permasalahan, serta akan mengantarkan penelitian menjadi tulisan yang terarah dan sistematis. Pembahasan perlu

²¹ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2015. *Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion*. (http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html)

²² *Nippon Kaigi* (NK) adalah sebuah organisasi konservatif sayap kanan yang paling besar di Jepang. PM Shinzo Abe dan kebanyakan kabinetnya adalah anggota organisasi ini. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh NK bertujuan untuk merevisi sejarah Jepang dan meminimalisir kejadian perang yang telah dilakukan oleh Jepang, seperti menentang pernyataan maaf PM Murayama Tomiichi terkait kejadian Jepang di masa perang dan menghapus kejadian perang Jepang dari buku-buku sekolah.

²³ Di Jepang, sentimen dan *hate speech* anti-Korea telah menjadi isu sosial yang serius. Kementerian Kehakiman Jepang mencatat terdapat 1.152 demonstrasi *hate speech* anti-Korea selama April 2012 hingga September 2015.

diarahkan agar sesuai dengan pokok permasalahan serta mempermudah pengumpulan data dan informasi.

1.2.1. Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk menunjuk fokus atau materi yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian ini, batasan materi yang digunakan adalah sejarah singkat *ianfu*, tuntutan Korea Selatan mengenai *ianfu*, pengaruh isu *ianfu* terhadap hubungan Jepang – Korea Selatan, isi kesepakatan kedua negara mengenai isu *ianfu*, dan alasan Jepang memutuskan untuk membayar ganti rugi kepada *ianfu* Korea Selatan.

Dalam penelitian ini, tidak ditemukan data yang akurat mengenai jumlah *ianfu*. Hal ini disebabkan tidak ada dokumen yang menjelaskan jumlah tersebut. Beberapa ilmuwan memperkirakan jumlah *ianfu* sebagai berikut.

Nama Ilmuwan	Tahun Publikasi	Jumlah <i>Ianfu</i>
Ikuhiko Hata	1993	90.000
Yoshimi Yoshiaki	1995	200.000
Su Zhiliang	1999	360.000

Tabel 1.1 Jumlah *ianfu* berdasarkan perkiraan ilmuwan
(Sumber: Asian Women's Fund)

Dari beberapa perkiraan tersebut, data yang paling sering digunakan adalah data Yoshimi Yoshiaki, yaitu sebanyak 200.000 orang. Jumlah ini juga digunakan oleh G. J. McDougal, Pelapor Khusus Sub-Komisi PBB untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, dalam laporannya yang berjudul “Bentuk Perbudakan Kontemporer: Pemerkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual dan Praktik Perbudakan selama Konflik Bersenjata” tanggal 22 Juni 1998. Dari jumlah tersebut, Kim Il Myon²⁴ memperkirakan sebanyak 80 persen atau sekitar 160.000 *ianfu* berasal dari Korea.²⁵

²⁴ Penulis buku “Tenno no Guntai to Chosenjin Ianfu (*The Emperor's Army and the Korean Comfort Women*)”

²⁵ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Number of Comfort Stations and Comfort Women*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-07.html> pada 6 Juli 2017)

Sementara itu, pemerintah Jepang sendiri tidak dapat memastikan jumlah *ianfu*. Pemerintah Jepang hanya mengatakan bahwa jumlah tersebut pasti sangat besar mengingat jumlah *ianjo* juga banyak di berbagai lokasi. Dalam penelitian ini juga tidak dapat ditemukan pernyataan pemerintah Korea Selatan mengenai jumlah *ianfu*. Karena keterbatasan data ini, maka penulis menggunakan data perkiraan Yoshimi Yoshiaki dan Kim Il Myon untuk menjelaskan jumlah *ianfu*, yakni sekitar 200.000 orang di mana sebanyak 80 persen dari mereka berasal dari Korea.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu merupakan rentang waktu terjadinya peristiwa atau objek yang dianalisis. Batasan waktu yang ditentukan dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2012 sampai dengan 2015. Tahun 2012 dipilih karena pada tahun tersebut, Shinzo Abe, sebagai pengambil keputusan utama dalam urusan luar negeri Jepang, menjabat sebagai perdana menteri. Selain itu, pada masa jabatannya yang kedua ini, sikap Abe terkait *ianfu* berubah. Di masa jabatannya yang pertama (2006-2007), Abe berencana merevisi *Kono Statement* dan enggan menyelesaikan isu *ianfu*. Sementara di masa jabatannya yang kedua, Abe bersedia menyelesaikan isu *ianfu*. Sedangkan tahun 2015 ditetapkan karena pada tahun tersebut, tepatnya tanggal 28 Desember 2015, Jepang dan Korea Selatan mencapai kesepakatan mengenai isu *ianfu*. Kesepakatan tersebut merupakan sebuah kesepakatan penting yang membuat isu *ianfu* Korea Selatan akhirnya selesai dan tidak dapat diubah.²⁶

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : **“Mengapa Jepang memutuskan untuk membayar ganti rugi kepada “wanita penghibur” (*ianfu*) Korea Selatan pada tahun 2015?”**.

²⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2015. *Japan-Republic of Korea Relations Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion*. (Diakses dari http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html pada 17 Oktober 2016)

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Jepang membayar ganti rugi kepada *ianfu* Korea Selatan pada tahun 2015.

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, kerangka konseptual diperlukan sebagai instrumen yang membantu penulis untuk melakukan analisis dan penelitian, sehingga penulis dapat memberikan jawaban atas permasalahan dengan tepat. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan *decision making process theory* untuk menemukan jawaban terkait alasan Jepang menyelesaikan masalah *ianfu* Korea Selatan. *Decision making process theory* dirintis oleh Richard Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin pada tahun 1962. Teori ini berangkat dari upaya menganalisis politik luar negeri suatu negara dengan mengungkap alasan atau penyebab diambilnya keputusan oleh para *decision makers*.²⁷

Pada dasarnya, *decision making* atau pembuatan keputusan adalah sebuah proses memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah.²⁸ Menurut Snyder dkk, negara membuat sebuah keputusan sesuai dengan tindakan yang diambil oleh mereka yang bertindak atas nama negara, atau disebut pembuat keputusan (*decision maker*). Tindakan negara muncul ketika keempat komponen ini ada, yaitu aktor, tujuan, maksud, dan situasi. Aktor menentukan situasi dengan cara menghubungkan dirinya dengan aktor lain serta tujuan dan maksud yang ingin dicapai, berdasarkan faktor yang relevan dalam situasi tersebut. Cara aktor mengaitkan dirinya dengan situasi, tergantung pada sifat atau orientasi aktor tersebut.²⁹ Dengan kata lain, pentingnya situasi dan faktor yang mempengaruhi situasi itu tergantung pada persepsi aktor atau *decision makers*.

²⁷ Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa. Hal. 85.

²⁸ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 19.

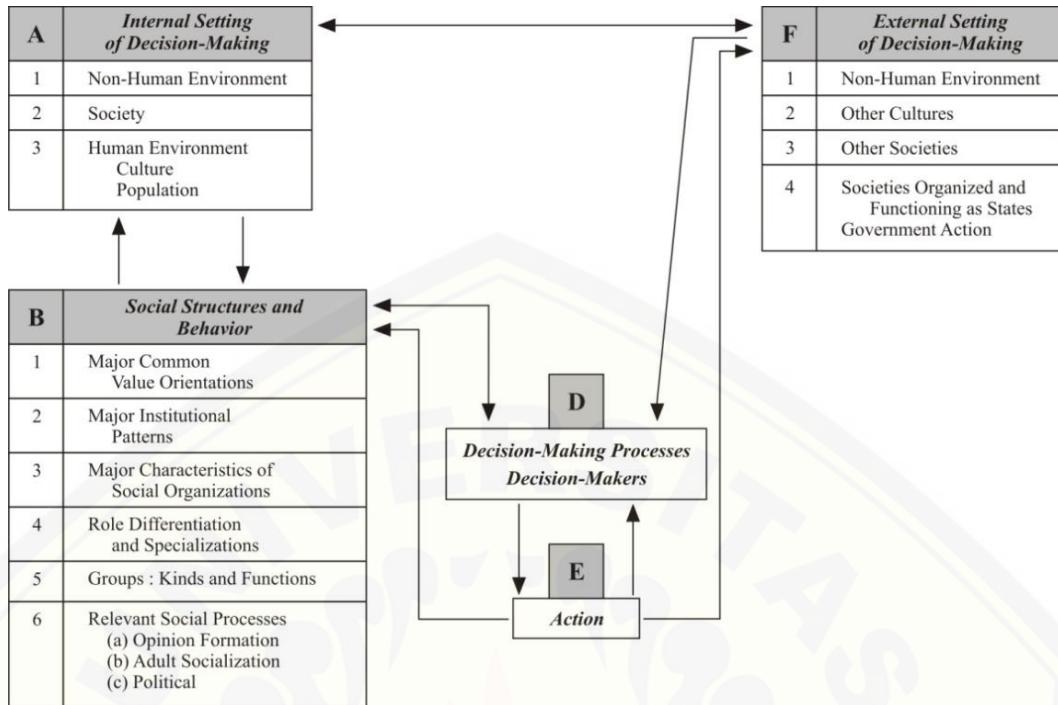
²⁹ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, & Burton Sapin. *The Decision-Making Approach to the Study of International Politics*. Dalam James N. Rosenau. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press. Hal. 202.

Analisa suatu kebijakan luar negeri bisa dilakukan melalui pernyataan, sikap, atau persepsi aktor (*decision maker*) dan negara. Di Jepang, berdasarkan Konstitusi (Pasal 73), aktor yang menangani urusan luar negeri adalah Kabinet yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Berdasarkan *Cabinet Law*, Perdana Menteri juga yang bertanggung jawab untuk melaporkan hubungan luar negeri pada *Diet*. Meskipun terdapat menteri luar negeri yang mengepalai kementerian luar negeri, namun Perdana Menteri pula yang mengarahkan keseluruhan pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, aktor atau pembuat keputusan kebijakan luar negeri yang utama di Jepang adalah Perdana Menteri.³⁰ Penulis menganalisa alasan keputusan Jepang ini melalui pernyataan, sikap, atau persepsi PM Shinzo Abe selaku pembuat keputusan tersebut.

Dalam membuat sebuah kebijakan, *decision maker* mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dengan situasi yang ada. Faktor-faktor tersebut, oleh Snyder dkk, disebut sebagai *setting*, yaitu seperangkat kategori faktor dan kondisi yang secara potensial relevan yang dapat mempengaruhi tindakan suatu negara. *Setting* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *internal setting of decision-making* dan *external setting of decision making*. *Settings* tersebut mempengaruhi persepsi, *judgment*, sikap, dan tujuan para *decision makers* dalam merumuskan keputusan-keputusan politik luar negeri.³¹ Variabel atau *setting* tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

³⁰ H. D. P. Envall. 2015. *Japanese Diplomacy: The Role of Leadership*. New York: SUNY Press. Hal. 71.

³¹ Abubakar Eby Hara, *op.cit.*, hal. 93.



Bagan 1.1 *Internal and External Settings of Decision-Making*
 (Sumber: Richard C. Snyder, H. W. Bruck, & Burton Sapin, 1969)

Internal Setting of Decision-Making

Internal setting of decision-making merupakan variabel yang ada di dalam negeri. *Setting* ini memiliki dua unsur, yaitu struktur kelembagaan pemerintahan yang terdiri dari *non-human environment*, *society*, dan *human environment, culture, and population*; serta struktur sosial keseluruhan yang terdiri dari *major common value orientation*, *major institutional patterns*, *major characteristics of social organizations*, *role differentiation and specializations*, *groups: kinds and functions*, dan *relevant social processes: opinion formation, adult socialization, and political*.

1. *Non-human environment* atau lingkungan non-manusia yang bisa berupa letak geografis atau kondisi ekonomi suatu negara.
2. *Society* merupakan kondisi masyarakat suatu negara, seberapa kritis atau partisipatif masyarakat tersebut terhadap kebijakan pemerintah.
3. *Human environment, culture, and population* atau lingkungan manusia, kebudayaan, dan populasi yang ada di suatu negara.

4. *Major common value orientation* adalah orientasi nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakat suatu negara yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah.
5. *Major institutional patterns* merupakan pola-pola kelembagaan yang utama, dalam hal ini adalah partai politik, apakah partai politik mendukung kebijakan pemerintah atau tidak.
6. *Major characteristics of social organizations* yaitu karakteristik utama dari organisasi sosial yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah.
7. *Role differentiation and specializations* atau perbedaan peran dan spesialisasi, yang dicirikan dengan adanya pemisahan fungsi politik dengan pelaksanaan fungsi lain yang kemudian menyebarluaskan struktur, fungsi, dan peran politik baru dimana pada akhirnya akan meningkatkan spesialisasi dalam organisasi dan pelaksanaan struktur, fungsi, dan peran baru tersebut.³²
8. *Groups: kinds and functions* adalah kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah suatu negara.
9. *Relevant social processes: opinion formation, adult socialization, and political* (proses sosial yang relevan yang terdiri dari pembentukan opini, sosialisasi dewasa, dan politik). Pertama, *opinion formation* adalah opini publik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Kedua, *adult socialization* merupakan sosialisasi yang terjadi ketika seorang aktor atau individu menjadi dewasa dan memasuki peran baru sebagai seorang suami, istri, pekerja, anggota militer, politisi, dan lain sebagainya.³³ Proses sosial yang ketiga adalah *political*. Politik erat

³² Bernard S. Silberman. *Structural and Functional Differentiation in the Political Modernization of Japan* dalam Robert E. Ward. 1968. *Political Development in Modern Japan*. New Jersey: Princeton University Press. Hal. 340.

³³ Ron Hammond, dkk. (tanpa tahun). *Introduction to Sociology* (http://www.freesociologybooks.com/Introduction_To_Sociology/06_Socialization.php)

kaitannya dengan kepentingan nasional (*national interest*) karena kepentingan nasional adalah hasil dari proses politik.³⁴

Penulis melihat bahwa dari kesembilan faktor internal di atas, faktor yang relevan dalam pembuatan keputusan Jepang dalam mencapai kesepakatan dengan Korea Selatan terkait isu *ianfu* adalah faktor *major common value orientation* dan *human environment*. Kedua faktor ini tercermin dalam pernyataan-pernyataan dan sikap pembuat keputusan Jepang, terutama PM Shinzo Abe sebagai pembuat keputusan yang utama.

Major common value orientation adalah orientasi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Salah satu orientasi nilai yang dianut oleh masyarakat serta pembuat keputusan Jepang adalah berkaitan dengan waktu, di mana masyarakat dan kebudayaan Jepang melihat masa lalu sebagai pengalaman dan panduan untuk membuat sebuah keputusan di masa sekarang, di mana keputusan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap masa depan.³⁵ Faktor ini tercermin dalam pernyataan Abe yang mengatakan bahwa isu *ianfu* tidak seharusnya menjadi isu diplomatik yang dapat menghambat kerjasama Jepang – Korea Selatan di masa depan dan menjadi beban bagi generasi mendatang.³⁶

Faktor *human environment* diartikan sebagai hubungan antar manusia dan semua tindakan yang berasal dari kebiasaan manusia, termasuk juga hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Dalam konteks isu *ianfu*, *human environment* yang dimaksud adalah hak-hak perempuan. Pemerintah Jepang mengatakan bahwa martabat dan hak perempuan telah dilanggar selama perang, termasuk yang dialami oleh *ianfu*. Bagi pemerintah, isu *ianfu* adalah sebuah pembelajaran dari masa lalu dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Jepang berkomitmen untuk memastikan di abad ke-21 tidak ada

³⁴ Donald E. Nuechterlein. 1976. “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making”. *British Journal of International Studies* Vol. 2, No. 3. Cambridge University Press.

³⁵ Tatyana Danyliva, *op.cit*.

³⁶ Justin McCurry. 2015. *Japanese PM Shinzo Abe Stops Short of New Apology in War Anniversary Speech*. (Diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2015/aug/14/shinzo-abe-japan-no-new-apology-second-world-war-anniversaryspeech> pada 5 Januari 2017)

lagi kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia seperti yang terjadi pada *ianfu*.³⁷ Faktor ini berkaitan dengan kepentingan Jepang untuk mempromosikan dan mendukung hak-hak perempuan.

External Setting of Decision-Making

External setting of decision-making merupakan faktor atau kondisi yang ada di luar wilayah teritori negara, dalam hal ini adalah Korea Selatan. *External setting* terdiri dari empat faktor, yaitu:

1. *Non-human environment* atau lingkungan non-manusia yang bisa berupa letak geografis atau kondisi ekonomi negara lain.
2. *Other cultures* atau kebudayaan negara lain.
3. *Other societies* merupakan kondisi sosial dan masyarakat negara lain yang berpengaruh terhadap kebijakan suatu negara.
4. *Societies organized and functioning as states and government action* yaitu masyarakat yang terorganisir dan berfungsi sebagai negara, dan tindakan pemerintah Korea Selatan yang dapat mempengaruhi kebijakan Jepang.

Dari keempat faktor di atas, penulis melihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Jepang adalah faktor *non-human environment*, *other societies*, serta *societies organized and functioning as states and government action*. Sama seperti faktor internal, faktor eksternal juga tercermin dalam pernyataan-pernyataan dan sikap pembuat keputusan Jepang.

Faktor *non-human environment* atau lingkungan non-manusia adalah hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Isu *ianfu* telah berdampak pada hubungan politik yang memburuk di antara kedua negara, di mana presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, tidak bersedia melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang Shinzo Abe. Akibatnya, kerjasama ekonomi kedua negara juga mengalami penurunan dan pembicaraan tingkat tinggi mengenai kerjasama keamanan juga tidak ada. Kedua negara pernah hampir memiliki kerjasama keamanan secara bilateral pada tahun 2012 berupa perjanjian informasi militer (*General Security of*

³⁷ *ibid.*

Military Information Agreement atau GSOMIA). Namun, Korea Selatan membatalkan penandatanganan perjanjian tersebut karena penolakan publik Korea Selatan yang masih sensitif terhadap militer Jepang. Ditambah dengan bekunya hubungan politik pemimpin kedua negara, pembicaraan mengenai GSOMIA pun tidak mengalami kemajuan. Padahal kerjasama keamanan penting dimiliki oleh kedua negara, mengingat kedua negara menghadapi ancaman dan memiliki kepentingan yang sama. Pentingnya hubungan kedua negara diungkapkan oleh pemerintah Jepang mengenai posisi dan pandangannya terhadap isu *ianfu*. Pemerintah mengatakan bahwa Jepang sangat menghargai hubungan Jepang dengan Korea Selatan dan berniat untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kedua negara serta berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan kawasan.³⁸ Dengan kata lain, pemerintah berupaya memperbaiki dan meningkatkan hubungan kedua negara dengan cara menyelesaikan isu yang paling sensitif, yaitu isu *ianfu*.

Faktor yang kedua adalah *other societies*. Isu *ianfu* tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Korea Selatan, tetapi juga masyarakat internasional. Korea Selatan dan masyarakat internasional mengkritik dan menekan pemerintah Jepang karena memandang isu *ianfu* dalam konteks *human trafficking* terhadap perempuan dan perbudakan seksual oleh Jepang. Kritikan, kecaman, dan tekanan inilah yang mempengaruhi Jepang untuk menyelesaikan isu *ianfu*. Karena jika tidak segera diselesaikan, maka bangsa lain akan kehilangan kepercayaan terhadap Jepang serta menurunkan reputasi Jepang di mata internasional dan ini bisa membuat Jepang sulit meraih kepentingan nasionalnya.³⁹

Faktor yang ketiga adalah *societies organized and functioning as states and government action*. Tindakan sebuah organisasi sosial Korea Selatan yang mendukung *ianfu*, yaitu *The Korean Council*, membuat pemerintah Jepang berupaya menyelesaikan isu *ianfu*. *The Korean Council* telah membangun sebuah

³⁸ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2013. *The Views of the Government of Japan on Issues of History Including “Comfort Women”*. (Diakses dari http://www.mofa.go.jp/policy/page3e_000118.html pada 24 Oktober 2016)

³⁹ Satoko Oka Norimatsu. 2015. “Reexamining the ‘Comfort Women’ Issue 改めて慰安婦問題の本質を問う An Interview with Yoshimi Yoshiaki”. *The Asia-Pacific Journal*.

patung simbol *ianfu* yang diberi nama *Pyeonghwa-bi* (monumen perdamaian) di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Bagi pemerintah Jepang, *Pyeonghwa-bi* dapat menciptakan persepsi bahwa Jepang adalah negara yang tidak bertanggungjawab dan terus-terusan terlibat dalam tindakan kriminal⁴⁰ dan dapat menurunkan martabat Jepang di mata internasional. Oleh karena itu pemerintah Jepang menyelesaikan isu *ianfu* agar pemerintah Korea Selatan berusaha memindahkan patung tersebut dengan tujuan mencegah penurunan martabat Jepang dan memperbaiki citra Jepang di mata internasional.

Tuntutan pemerintah Korea Selatan menjadi pertimbangan Abe untuk membayar kompensasi kepada para mantan *ianfu* mengingat Korea Selatan adalah negara yang penting di mata Jepang, seperti yang telah dijelaskan dalam poin *non-human environment* sebelumnya. Karena hal ini, maka penting bagi Jepang untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan kedua negara agar isu *ianfu* tidak lagi mengganggu hubungan kedua negara di masa depan dan kepentingan yang ingin diraih Jepang terhadap Korea Selatan dapat tercapai, seperti disetujuinya GSOMIA antara kedua negara untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara dan menjaga stabilitas kawasan, serta peningkatan kerjasama ekonomi.

Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga keputusan Jepang untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada mantan *ianfu* Korea Selatan. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang ada di dalam negeri Jepang dan Korea Selatan. Kondisi internal Jepang adalah *major common value orientation* dan *human environment*. Sedangkan kondisi internal Korea Selatan adalah *non-human environment*, *other societies*, serta *societies organized and functioning as states and government action*.

Kondisi internal Korea Selatan merupakan faktor eksternal bagi Jepang. Dalam konteks ini, *decision makers* Jepang mempertimbangkan kondisi internal Korea Selatan karena kondisi-kondisi tersebut berpengaruh terhadap Jepang. Jadi,

⁴⁰ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2015. *Japan-Republic of Korea Relations Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion*. (Diakses dari http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html pada 17 Oktober 2016)

selain didasarkan pada kondisi internal negaranya, keputusan Jepang untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada mantan *ianfu* Korea Selatan juga dipengaruhi oleh kondisi internal Korea Selatan dan hubungan di antara kedua negara.

1.6. Argumen Utama

Pemerintah Jepang memutuskan untuk menyelesaikan isu *ianfu* Korea Selatan dengan cara meminta maaf dan memberikan ganti rugi, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah agar isu *ianfu* tidak menjadi tanggungan generasi Jepang mendatang serta kepentingan Jepang untuk mempromosikan dan mendukung hak perempuan. Sedangkan faktor eksternalnya adanya tuntutan dari masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah Korea Selatan, di mana faktor ini dipengaruhi oleh hubungan kedua negara. Pemerintah Jepang juga ingin memperbaiki citranya yang telah menurun di mata internasional akibat isu *ianfu*.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang memiliki langkah-langkah sistematis untuk mengetahui sesuatu. Metode penelitian diperlukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh informasi serta membantu menganalisa dan menjawab pokok permasalahan. Metode penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah diperoleh melalui metode-metode tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data. Sementara itu, sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui pihak

lain atau media perantara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang penulis dapat dari berbagai sumber, yaitu:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Jember,
- b) Ruang Baca FISIP Universitas Jember,
- c) Buku, jurnal ilmiah, dan artikel,
- d) Media cetak atau surat kabar, dan
- e) Media internet.

1.7.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjawab permasalahan secara sistematis berdasarkan data-data. Penelitian ini menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasinya. Oleh karena itu, jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini akan lebih bersifat observasi data-data yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Jepang untuk membayar ganti rugi kepada *ianfu* Korea Selatan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, penulis akan membaginya menjadi lima bab, di mana dalam setiap bab akan terdiri dari sub bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 *Ianfu* dalam Politik Domestik Korea Selatan

Bab ini berisi tentang sejarah singkat *ianfu* serta tuntutan mantan *ianfu*, organisasi sosial, dan pemerintah Korea Selatan.

BAB 3 *Ianfu* dalam Hubungan Jepang dan Korea Selatan

Bab ini akan menguraikan tentang hubungan Jepang dan Korea Selatan, respon pemerintah Jepang terhadap isu *ianfu*, dan pengaruh isu *ianfu* terhadap hubungan kedua negara.

BAB 4 Keputusan Jepang Membayar Ganti Rugi kepada *Ianfu* Korea

Selatan

Bab ini berisi kesepakatan mengenai *ianfu* antara Jepang dan Korea Selatan, serta analisa mengenai alasan pemerintah Jepang untuk menyelesaikan isu tersebut.

BAB 5 Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang disebutkan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB 2. IANFU DALAM POLITIK DOMESTIK KOREA SELATAN

Hubungan Jepang dan Korea Selatan sering diwarnai oleh ketegangan akibat isu-isu historis, seperti kunjungan pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni, upaya pemerintah Jepang untuk merevisi sejarah Jepang, dan isu *ianfu*. Di antara isu-isu tersebut, isu yang paling sensitif pada pemerintahan Park Geun-hye adalah isu *ianfu* atau “wanita penghibur” yang dijadikan budak seks tentara Jepang. Isu *ianfu* pertama kali muncul pada akhir 1991 ketika beberapa mantan *ianfu* dari Korea Selatan yang dibantu oleh sebuah organisasi wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tokyo untuk menuntut Jepang bertanggungjawab. Tidak hanya dilakukan oleh mantan *ianfu* dan organisasi perempuan, tetapi tuntutan terhadap pemerintah Jepang juga dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dan pemerintah Korea Selatan untuk menuntut Jepang terkait isu *ianfu*, antara lain sensitivitas terhadap Jepang akibat pengalaman di masa penjajahan, rasa nasionalisme yang tinggi, trauma akibat perang, dan banyaknya *ianfu* yang berasal dari Korea. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi penting sehingga masyarakat dan pemerintah Korea Selatan memperjuangkan *ianfu* di negara mereka.

Bab ini akan membahas mengenai tuntutan mantan *ianfu*, organisasi, dan pemerintah Korea Selatan terhadap pemerintah Jepang. Namun sebelum itu, perlu dijelaskan juga sejarah *ianfu* pada masa penjajahan Jepang.

2.1. *Ianfu* pada Masa Penjajahan Jepang

Selama masa penjajahan berlangsung (antara tahun 1930-an hingga berakhirnya Perang Dunia II), militer Jepang banyak melakukan kekejaman terhadap masyarakat di negara jajahannya, salah satunya adalah memaksa gadis-gadis muda menjadi “wanita penghibur” dan melayani nafsu seks para tentara Jepang. “Wanita penghibur” pada masa perang itu disebut *jugun ianfu* yang berarti “comfort women” joining the army (“wanita penghibur” yang bergabung

dalam militer) oleh para pengarang yang menulis tentang wanita-wanita tersebut pada masa perang. Istilah *jugun ianfu* kemudian digunakan oleh pemerintah Jepang pada saat pertama kali menghadapi isu “wanita penghibur”. Namun, dalam dokumen sejarah perang, ditemukan bahwa istilah yang digunakan untuk menyebut “wanita penghibur” adalah *ianfu*. Setelah itu, pemerintah menggunakan istilah *ianfu* tersebut.⁴¹ Meskipun frasa “*comfort women*” digunakan, namun pada kenyataannya perempuan-perempuan tersebut bukan benar-benar “wanita penghibur” di *comfort station*, melainkan korban pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan berulang-ulang oleh militer Jepang.⁴² Kejadian yang mereka alami membuat dokumen-dokumen PBB dan organisasi perempuan menyebut mereka sebagai “budak seksual militer” di “pusat atau kamp pemerkosaan”.⁴³

Comfort station (dalam bahasa Jepang disebut *ianjo*), atau tempat dimana *ianfu* melayani tentara Jepang, pertama kali didirikan oleh militer Jepang di Shanghai pada tahun 1932.⁴⁴ Tahun-tahun berikutnya, militer Jepang juga mendirikan *ianjo* di dalam dan sekitar pangkalan militer mereka di Okinawa, Indonesia, Korea, China, Filipina, Myanmar, Malaysia dan Kepulauan Solomon. *Ianjo* didirikan atas permintaan militer Jepang yang pertama kali dipromosikan oleh Yasuji Okamura, Wakil Kepala Staf *Shanghai Expeditionary Force* pada saat itu.⁴⁵ Militer Jepang mendirikan *ianjo* karena sebelumnya anggota militer Jepang memperkosa wanita-wanita China di daerah yang didudukinya. Untuk mencegah terjadinya pemerkosaan kembali, maka militer Jepang memutuskan untuk mendirikan *ianjo* di dalam dan sekitar pangkalan mereka. Dengan adanya *ianjo*, militer bisa mengontrol kegiatan seksual tentara dan mencegah terjadinya penyakit seksual yang mungkin saja bisa menular kepada para tentara jika mereka berhubungan seks dengan wanita di luar *ianjo*.

⁴¹ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Who were the Comfort Women? – Who were the Comfort Women?*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-00.html> pada 22 Maret 2016)

⁴² Library of Congress. (tanpa tahun). *Japan: WWII POW and Forced Labor Compensation Cases*. (Diakses dari <http://www.loc.gov/law/help/pow-compensation/japan.php> pada 1 Maret 2016)

⁴³ Bang-Soon L. Yoon. 2010. “Imperial Japan’s Comfort Women from Korea: History & Politics of Silence-Breaking”. *The Journal of Northeast Asian History*. Hal. 8.

⁴⁴ Sue R. Lee. 2003. “Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay”. *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*.

⁴⁵ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Who were the Comfort Women? – The Establishment of Comfort Stations*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-01.html> pada 22 Maret 2016)

Bagi personel militer Jepang, seks adalah suatu kebutuhan seperti makanan. Militer meyakini bahwa dengan berhubungan seks sebelum pertempuran bisa menjadi jimat untuk mencegah cedera. Seks juga bisa menghilangkan stres yang dialami tentara akibat pertempuran, penempatan yang jauh dari rumah untuk jangka waktu yang lama, dianaya oleh komandan mereka, dan tidak diberi waktu liburan yang memadai.⁴⁶ Jadi, para *ianfu* dan *ianjo* dijadikan “hiburan” dan “pelarian” bagi para tentara.

Militer merekrut *ianfu* dari gadis-gadis berusia 14 hingga 18 tahun di daerah yang didudukinya. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pedesaan dan tidak berpendidikan. Peneliti memperkirakan ada sebanyak kurang lebih 200.000 gadis yang dipaksa menjadi *ianfu* pada masa Perang Dunia II. Mereka harus melayani tentara dengan jumlah kurang lebih 3 juta orang.⁴⁷ Sehingga dapat diperkirakan satu orang *ianfu* melayani sekitar 15 orang tentara. Delapan puluh persen dari *ianfu* adalah warga Korea, sementara sisanya berasal dari China, Taiwan, Filipina, Indonesia, Myanmar, Micronesia, Timor Timur, dan Belanda.⁴⁸ Militer Jepang memilih wanita non-Jepang untuk menjadi *ianfu* karena mereka percaya bahwa ras Jepang adalah yang tertinggi di antara ras Asia yang lain, sehingga wanita dari Jepang tidak pantas berada dalam kehidupan prostitusi.⁴⁹ Namun alasan sebenarnya mengapa pemerintah Jepang tidak suka menggunakan wanita Jepang dalam *ianjo* adalah karena pemerintah khawatir akan kehilangan kepercayaan publik pada negara dan militer jika mereka mengetahui bahwa saudari, istri, atau kenalan wanita mereka berada di medan perang sebagai “wanita penghibur”.⁵⁰ Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang banyak menggunakan gadis-gadis dari daerah yang didudukinya daripada wanita Jepang sendiri sebagai “wanita penghibur” di *ianjo*.

⁴⁶ Sue R. Lee, *op.cit.*, hal. 3.

⁴⁷ Asian Women’s Fund. (tanpa tahun). *Number of Comfort Stations and Comfort Women*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-07.html> pada 12 November 2016)

⁴⁸ Min P. G. Korean “Comfort Women”: The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class dalam Kirsten Orreill. 2008. “Who are the Ianfu (Comfort Women)?”. *New Voices Vol. 2: A Journal for Emerging Scholars of Japanese Studies in Australia*. Hal. 129.

⁴⁹ Tanaka Y. *Japan’s Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution during World War II and the US Occupation* dalam Kirsten Orreill. *op.cit.*, hal. 134.

⁵⁰ Sue R. Lee, *op.cit.*, hal. 4.

Militer mengumpulkan *ianfu* dengan berbagai cara, yaitu penipuan, penculikan, dan pemerkosaan.⁵¹ Awalnya, militer merekrut *ianfu* dengan dalih mereka akan memiliki akses pendidikan, bekerja di pabrik-pabrik, dan menerima gaji yang tinggi. Cara yang lebih ekstrim adalah militer memperkosa gadis-gadis di depan keluarga mereka kemudian militer membawanya ke tempat pengumpulan. Setelah dikumpulkan, gadis-gadis muda tersebut dibawa ke *ianjo* dengan menggunakan kapal, kereta api, truk, dan terkadang pesawat militer. Mereka dibawa ke *ianjo* yang terletak di pangkalan atau sekitar pangkalan militer Jepang, yang bisa saja *ianfu* tersebut dibawa ke *ianjo* yang jauh dari rumah atau negaranya.

Banyak *ianjo* yang dibangun dari rumah, peternakan, gereja, atau hotel yang terbengkalai. *Ianjo* biasanya terdiri dari 10 barak dengan seorang pengawas. Tiap barak tersebut dibagi menjadi 10 kamar dengan ukuran kecil dengan nomor di pintunya yang terdapat satu tempat tidur atau *futon*⁵² di dalamnya. Ketika sampai di *ianjo*, *ianfu* diberi nama Jepang atau nomor sebagai panggilannya. Ada juga beberapa *ianfu* yang ditato dengan tanda khusus di lengan mereka agar mudah dikenali jika mereka melarikan diri.⁵³

Keterlibatan militer tidak hanya dalam pembentukan *ianjo* dan perekrutan *ianfu*, tetapi juga membentuk peraturan tentang pengelolaan dan pengoperasian *ianjo*.⁵⁴ Pada awalnya, *ianjo* dioperasikan secara langsung oleh militer. Setelah jumlahnya bertambah banyak, pengoperasian *ianjo* dilakukan oleh pihak swasta, sedangkan militer melakukan pengawasan serta menyediakan transportasi dan pelayanan kesehatan. Militer jugalah yang menentukan setiap aturan dalam *ianjo*, seperti kebersihan, jam operasi, pembayaran untuk layanan seksual, penggunaan alat kontrasepsi, larangan membawa alkohol dan senjata, mencegah *ianfu* melarikan diri, dan mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke *ianjo*. Selain itu, militer juga memberikan pelayanan

⁵¹ loc.cit., hal. 5.

⁵² Perangkat tidur khas Jepang yang digelar di atas lantai.

⁵³ Hicks, G. L. *The Comfort Women* dalam Kirsten Orreill. op.cit., hal. 137.

⁵⁴ Sue R. Lee, op.cit., hal. 9.

medis bagi semua *ianfu* di *ianjo*, yang mencakup pemeriksaan rutin, pengobatan untuk mencegah penyakit menular, kehamilan, dan penyediaan alat kontrasepsi.⁵⁵

Selama berada di dalam *ianjo*, para *ianfu* dipaksa menggunakan bahasa Jepang ketika berbicara. Jika ketahuan menggunakan bahasa negara mereka, tentara mengancam akan membunuhnya. Bahkan ada seorang *ianfu* yang dipenggal oleh seorang tentara karena berbicara bahasa Korea. Petugas tersebut melakukannya untuk memberikan yang lainnya pelajaran.⁵⁶ Selain itu, para *ianfu* juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tentara Jepang, seperti dipukuli, ditikam, atau dijadikan objek penyiksaan oleh tentara tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak bisa melarikan diri atau melawan tentara Jepang, karena jika melakukan hal ini, mereka akan mendapat hukuman yang parah, yaitu dipukuli atau dipenggal.⁵⁷ Pengawasan yang ketat dan hukuman yang mungkin diterima membuat kemungkinan untuk melarikan diri dari *ianjo* sangat kecil. Militer Jepang juga menghalangi mereka untuk melakukan bunuh diri, dengan ancaman keluarga mereka yang akan dilukai jika mereka melakukannya. Selain disiksa, para *ianfu* juga hampir tidak mendapatkan uang. Tentara yang mengunjungi mereka membayar kepada operator *ianjo* dan seharusnya biaya tersebut diberikan kepada para *ianfu*. Namun, uang tersebut dipotong untuk biaya perawatan *ianfu* sendiri. Hal ini membuat sebagian dari mereka benar-benar tidak memiliki penghasilan.⁵⁸ Sehingga tidak berlebihan jika kita menyebut para *ianfu* adalah budak seks.

Penderitaan yang dialami oleh *ianfu* membuatnya sulit untuk melarikan diri secara fisik. Hal ini menyebabkan banyak *ianfu* yang memilih melarikan diri secara psikologis dengan menggunakan narkoba, biasanya opium atau *philopon*.⁵⁹ Beberapa manajer *ianjo* menggunakan narkoba sebagai sebuah insentif bagi *ianfu* jika mereka bekerja keras. Banyak juga di antara mereka yang sudah tidak sanggup lagi bertahan memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara

⁵⁵ loc.cit.

⁵⁶ Schmidt D. A. *Ianfu - The Comfort Women of the Japanese Imperial Army of the Pacific War* dalam Kirsten Orreill, *op.cit.* hal. 139.

⁵⁷ *ibid.*

⁵⁸ Sue R. Lee, *op.cit.*, hal. 8.

⁵⁹ Obat untuk menurunkan depresi.

meminum kresol sabun yang disediakan sebagai disinfektan, atau meminum ramuan obat dan alkohol.⁶⁰

Kekerasan dan kekejaman yang dialami oleh *ianfu* selama bekerja membuat banyak di antara mereka meninggal dunia. Kematian *ianfu* juga banyak terjadi ketika perang berakhir. Pada saat itu, banyak tentara Jepang yang melakukan bunuh diri dan memaksa para *ianfu* untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan karena militer beranggapan bahwa lebih baik mati daripada ditangkap dan tunduk pada musuh, juga untuk menyembunyikan bukti keberadaan para *ianfu*.⁶¹ Dari semua *ianfu* yang selamat, hanya beberapa yang dikembalikan ke negara asal, terutama mereka yang terletak di *ianjo* seluruh China dan dari beberapa wilayah di Asia Tenggara. Akan tetapi, mayoritas dari mereka ditelantarkan begitu saja oleh para tentara.⁶²

Ianfu yang selamat kembali ke rumah mereka atau mencoba memulai hidup yang baru di tempat yang baru. Namun, berakhirnya perang dan kepulangan mereka ke negara asal tidak memberikan mereka kelegaan. Trauma akibat hidup di *ianjo* tetap mereka rasakan, baik trauma fisik maupun psikologis. Banyak dari mereka yang dikucilkan oleh masyarakat.⁶³ Selain mendapatkan luka psikologis, mereka juga mengalami trauma fisik akibat penyakit kelamin dan kekerasan fisik yang mereka terima selama berada di *ianjo*. Banyak juga dari mereka yang menderita cacat mental dan gangguan saraf.⁶⁴ Trauma fisik dan psikologis serta sikap masyarakat membuat mantan *ianfu* tidak dapat menghadapi rasa malu mereka, memilih untuk diam, banyak dari mereka yang bahkan tidak mampu berkeluarga atau memiliki keturunan.

⁶⁰ Kirsten Orreill, *op.cit.* hal. 141

⁶¹ Soh C.S. *From Imperial Gifts to Sex Slaves: Theorizing Symbolic Representations of the "Comfort Women"* dalam Kirsten Orreill, *ibid.*, hal. 142.

⁶² Chin, S. C. *Korean Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan* dalam Kirsten Orreill, *ibid.*, hal. 142.

⁶³ *ibid.*, hal. 143.

⁶⁴ Ch'oe M. *Silent Suffering* dalam Kirsten Orreill, *ibid.*, hal. 145.

2.2. Tuntutan Korea Selatan

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, *ianfu* tidak langsung menjadi isu yang mendapatkan perhatian internasional seperti pada saat ini. Di Korea Selatan sendiri, masyarakat baru menyadari bahwa *ianfu* merupakan masalah historis yang paling penting dengan Jepang. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak mengetahui keberadaan para *ianfu*. Antara tahun 1970 hingga 1989, sudah banyak media-media Korea Selatan (seperti koran, literatur, dan film) yang menyebut atau memperlihatkan *ianfu*. Namun pada saat itu masyarakat Korea Selatan tidak menganggapnya penting.

Tahun	Jumlah Artikel
1970 – 1974	2
1975 – 1979	3
1980 – 1984	15
1985 – 1989	3

Tabel 2.1 Artikel JoongAng Ilbo (surat kabar Korea Selatan) yang menyebutkan “comfort women”. (Sumber: Kan Kimura, 2015)

Tabel 2.1 menunjukkan banyaknya artikel JoongAng Ilbo yang menyebutkan *ianfu*, yakni sebanyak 23 artikel dalam kurun waktu 19 tahun. Di awal tahun 1970 hingga 1974, hanya terdapat 2 artikel JoongAng Ilbo yang menyebutkan *ianfu*. Jumlah ini terus meningkat hingga 7 kali lipat di tahun 1980 hingga 1984. Semakin banyaknya artikel yang memberitakan tentang *ianfu*, maka semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang *ianfu*. Hal ini menjadi penting karena sebelumnya isu ini tidak begitu mendapatkan perhatian masyarakat. Namun, jumlah tersebut menurun hingga hanya menjadi 3 artikel di tahun 1985 hingga 1989. Masih belum terdapat data pasti mengenai faktor yang menyebabkan penurunan tersebut. Namun, nampaknya hal itu disebabkan karena sudah semakin banyak buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai *ianfu* yang terbit di Korea Selatan pada tahun 1980-an, sehingga media seperti JoongAng Ilbo tidak perlu lagi memberitakan tentang *ianfu*. Selain itu, pada awal tahun 1985, Korea

Selatan menyelenggarakan pemilihan legislatif dan hal ini nampaknya membuat media-media lebih banyak memberitakan pemilihan tersebut daripada isu *ianfu*.

Terbitnya buku-buku dan jurnal tentang *ianfu* yang dimulai pada awal tahun 1980-an membuat isu *ianfu* menjadi perhatian masyarakat Korea Selatan. Tetapi, informasi tentang *ianfu* sendiri berisi bahan-bahan yang tidak dapat ditemukan di laporan atau catatan Korea. Para penulis mengambilnya dari buku-buku Jepang. Hal ini disebabkan karena sebelum tahun 1980-an tidak banyak masyarakat Korea yang menulis tentang *ianfu* karena mereka membenci ingatan tentang tentara Jepang. Sementara di Jepang, pada tahun 1950-an hingga 1970-an sudah banyak buku-buku dan catatan tentang *ianfu* yang ditulis dan diterbitkan. Sehingga penulis Korea Selatan yang menulis tentang *ianfu* sangat bergantung pada buku-buku dan catatan yang berasal dari Jepang.⁶⁵

2.2.1. Tuntutan *Ianfu* dan Organisasi Sosial di Korea Selatan

Butuh waktu sekitar empat dekade bagi para *ianfu* Korea Selatan untuk bisa menuntut Jepang atas kekejaman yang dilakukannya kepada para *ianfu* di masa Perang Dunia II. Hal ini disebabkan oleh empat faktor.⁶⁶ Pertama, perempuan memiliki kekuatan dan pengaruh yang rendah dalam struktur sosial, sehingga pemerkosaan yang mereka alami semasa menjadi *ianfu* bukanlah isu penting yang membutuhkan perhatian masyarakat atau pemerintah.

Kedua, lingkungan politik Korea Selatan tidak mendukung naiknya isu *ianfu*. Beberapa peristiwa pasca kolonialisme membuat isu *ianfu* tidak diperhatikan. Penderitaan pada masa kolonial dan korban perang tidak mendapatkan prioritas apapun dalam agenda pemerintah. Mereka cenderung diabaikan untuk tujuan sosial yang lebih besar, seperti pembangunan bangsa, keamanan, atau industrialisasi.

Ketiga, dalam kebudayaan politik Korea Selatan, *ianfu* telah lama diasumsikan sebagai masalah individual. Oleh karena itu, isu ini tidak menjadi tanggung jawab publik. Kebudayaan politik Korea Selatan yang patriarkis

⁶⁵ Kan Kimura. 2015. "Discourses About Comfort Women in Japan, South Korea, and International Society". *International Relations and Diplomacy*.

⁶⁶ Bang-Soon L. Yoon. *op.cit*, hal. 33.

membuat masalah-masalah yang dialami oleh perempuan, seperti pemerkosaan atau eksploitasi seksual, menjadi terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali.

Keempat, gerakan dan organisasi yang mendukung *ianfu* sulit beraktivitas karena sistem pemerintahan Korea Selatan yang otoriter. Untuk mengangkat isu *ianfu* ke publik, organisasi tersebut bergantung pada institusi atau alat politik. Namun, hingga akhir 1980an, tidak ada institusi yang tersedia. Hal itu disebabkan karena sejak pasca kolonialisasi hingga akhir 1980an, sistem politik Korea Selatan adalah otoritarian. Pada saat itu, Korea Selatan dipimpin oleh Park Chung-hee (1961 – 1979) yang memperoleh kekuasaannya melalui kudeta militer. Di negara dengan sistem otoriter seperti Korea Selatan pada saat itu, keberadaan kelompok-kelompok sosial dan kebebasan berbicara sangat dibatasi, sehingga sulit bagi kelompok yang mendukung hak-hak perempuan untuk bisa mengangkat isu *ianfu* ke publik. Selain itu, selama rezim Park berlangsung, pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional adalah tujuan yang paling utama, sehingga isu-isu yang lain (seperti isu *ianfu*) tidak mendapatkan perhatian.

Berubahnya sistem politik Korea Selatan dari otoriter menjadi demokrasi pada tahun 1987 mempengaruhi munculnya isu-isu hak asasi manusia yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam perhatian masyarakat dan pemerintah. Hal ini membuat para aktivis dan organisasi sosial dapat berbicara dan memperjuangkan isu *ianfu* ke publik. Isu *ianfu* pertama kali didiskusikan secara terbuka di Korea Selatan setelah demokratisasi tahun 1987.⁶⁷ Pada Januari 1990, seorang aktivis Korea Selatan yang bernama Yun Chung-ok mempublikasikan sebuah artikel yang memberikan informasi tentang *comfort system* di Hankyoreh Newspaper. Isu tersebut kemudian menjadi terkenal ketika masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar pada sejarah hubungan Jepang – Korea dan menuntut permintaan maaf serta investigasi dari Jepang. Namun, pemerintah

⁶⁷ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *How Did The Comfort Women Issue Come to Light?* (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e2/survey.html> pada 16 September 2016).

Jepang menyangkal keterlibatan militernya terkait pembentukan *comfort system* dan menolak melakukan investigasi.⁶⁸

Penolakan resmi dari pemerintah Jepang tersebut mendapatkan kritik keras dari organisasi perempuan di Korea Selatan. Pada 17 Oktober 1990, sebanyak 37 organisasi wanita di Korea Selatan bergabung dengan sebuah kelompok relawan, mengeluarkan deklarasi yang mengkritik respon perwakilan pemerintah Jepang. Organisasi dan kelompok tersebut juga mengajukan 6 tuntutan pada pemerintah Jepang, yaitu⁶⁹ :

- (1) mengakui pemaksaan yang dilakukan kepada para *ianfu*,
- (2) mengeluarkan permintaan maaf,
- (3) melakukan investigasi untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dan mengungkap penemuan itu,
- (4) membangun sebuah monumen untuk mengenang para korban,
- (5) membayar kompensasi kepada para korban atau keturunannya, dan
- (6) membentuk program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran sejarah di balik isu ini.

Akan tetapi, tuntutan tersebut tidak mendapatkan respon dari pemerintah Jepang.

Setahun kemudian, seorang mantan *ianfu* dan aktivis HAM dari Korea Selatan, Kim Hak-sun beserta dua orang mantan *ianfu* lainnya menuntut Jepang untuk bertanggungjawab atas kejahatannya di masa Perang Dunia II terhadap para *ianfu*. Kim bertindak atas namanya sendiri dan menjadi inspirasi bagi para mantan *ianfu* lainnya untuk turut mengungkap masa lalu mereka. Tindakannya tersebut dibantu oleh aktivis, organisasi perempuan, dan pengacara. Aktivis dan organisasi sangat penting dalam membantu tindakan Kim karena mereka memiliki *power* dan pengaruh yang lebih besar daripada individu. Kim merupakan satu-satunya penuntut yang menggunakan nama aslinya dalam gugatan menuntut kompensasi bagi para korban perbudakan seksual oleh militer Jepang.⁷⁰ Tuntutan Kim tersebut diajukan pada Desember 1991 ke Pengadilan Negeri Tokyo. Pemerintah Jepang

⁶⁸ *ibid.*

⁶⁹ *ibid.*

⁷⁰ Kebanyakan mantan *ianfu* menggunakan nama samaran karena mereka merasa malu jika identitas dan masa lalu mereka diketahui publik.

meresponnya dengan menyatakan bahwa militer Jepang tidak terlibat dalam perekrutan *ianfu* dan manajemen *comfort system*.⁷¹ Meskipun tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah Jepang, namun gerakan yang dilakukan oleh Kim Hak-sun berhasil mendapatkan perhatian masyarakat. Sejak saat itu, banyak mantan *ianfu* yang juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang.⁷²

Para mantan *ianfu* Korea Selatan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok dan organisasi sosial yang memperjuangkan hak-hak mereka, yaitu *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan*. Organisasi non-pemerintah Korea Selatan yang disingkat *The Korean Council* ini dibentuk oleh 80 kelompok organisasi sosial dan organisasi wanita untuk membantu korban *ianfu* mendapatkan haknya dari pemerintah Jepang.⁷³ Dalam aktivitasnya mendukung para mantan *ianfu*, *The Korean Council* menuntut pemerintah Jepang untuk :

- (1) mengakui kejahatan perang yang dilakukannya,
- (2) mengungkap kebenaran dari perbudakan seksual militer,
- (3) membuat pernyataan maaf resmi,
- (4) membuat ganti rugi secara hukum,
- (5) menghukum mereka yang bertanggung jawab terhadap perbudakan seksual militer,
- (6) mencatat secara akurat mengenai perbudakan seksual militer dalam buku-buku sejarah, dan
- (7) mendirikan sebuah monumen untuk mengenang para korban perbudakan seksual militer dan sebuah museum sejarah.

Tuntutan-tuntutan tersebut bertujuan untuk mengembalikan hak-hak perempuan yang telah disalahgunakan, mengoreksi sejarah yang terdistorsi antara Korea

⁷¹ Komnas HAM. 2013. *Pengadilan Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan: Keputusan 4 Desember 2001*. Jakarta: Komnas HAM. Hal. 366.

⁷² Sue R. Lee. *op.cit.*, hal. 25.

⁷³ The Korean Council. (tanpa tahun). *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan*. (Diakses dari https://www.womenandwar.net/contents/general/general.nx?page_str_menu=2201 pada 17 September 2016)

dengan Jepang, mencegah munculnya kembali militerisme Jepang, dan menciptakan perdamaian di Asia dan dunia.

The Korean Council mencatat terdapat 234 *halmoni*⁷⁴ yang terregistrasi di catatan resmi pemerintah Korea Selatan. Dan hanya sekitar 70 orang yang masih hidup. Untuk membantu para mantan *ianfu* yang kini telah lanjut usia, *The Korean Council* memberikan pelayanan seperti konseling, kamp HAM, dukungan medis, dan kunjungan ke rumah-rumah mantan *ianfu*. Organisasi ini juga mengoperasikan sebuah tempat perlindungan yang bernama *Woorijip* (rumah kita) bagi mereka yang tidak dapat hidup sendiri.

Selain membantu para mantan *ianfu* Korea Selatan, *The Korean Council* juga memprakarsai kegiatan *Wednesday Demonstration*, yaitu sebuah aksi yang dilakukan oleh para mantan *ianfu*, organisasi sosial, dan pendukungnya. Aksi ini pertama kali dimulai pada Januari 1992 dan dilakukan setiap hari Rabu di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul untuk menuntut tanggung jawab dari pemerintah Jepang terhadap mantan *ianfu*. Untuk memperingati *Wednesday Demonstration* yang ke-1000, *The Korean Council* memprakarsai pembentukan patung simbol *ianfu* seperti yang terlampir dalam lampiran 2 skripsi ini. Patung yang diberi nama *Pyeonghwa-bi* (monumen perdamaian) ini diletakkan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul.

Patung simbol *ianfu* tersebut menggambarkan seorang gadis kecil mengenakan *hanbok* (pakaian tradisional Korea) yang duduk di sebuah kursi dengan diiringi bayangan seorang wanita tua. Patung yang dibuat dari perunggu itu menyimbolkan penderitaan yang dialami oleh *ianfu* yang dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang. Kakinya yang telanjang menyimbolkan mereka telah diabaikan oleh sikap masyarakat dunia yang dingin dan tidak simpati. Tangannya yang mengepal menggambarkan tekad gadis itu untuk mendapatkan keadilan. Seekor burung di pundaknya menyimbolkan ikatan antara mereka dengan korban yang telah meninggal. Kursi kosong di sebelahnya menyimbolkan *ianfu* yang telah meninggal di usia tua tanpa mendapatkan keadilan. Bayangan

⁷⁴ *Halmoni* adalah istilah yang berarti wanita tua di Korea. *The Korean Council* menyebut para mantan *ianfu* dengan istilah *halmoni* untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang.

seorang wanita tua yang mengiringi gadis tersebut menggambarkan banyaknya waktu yang telah mereka lalui hingga mereka menjadi tua. Dan seekor kupu-kupu yang ada di bayangan menggambarkan harapan para *ianfu* bahwa suatu saat mereka akan menerima permohonan maaf dari pemerintah Jepang.⁷⁵ Patung ini sarat akan pesan penderitaan yang dialami oleh *ianfu* dan juga sarat akan tuntutan terhadap pemerintah Jepang.

Sejak didirikan pada 14 Desember 2011, *Pyeonghwa-bi* mendapatkan reaksi negatif dari pemerintah Jepang yang menyesalkan pembuatan patung tersebut. Pemerintah Jepang meminta pemerintah Korea Selatan untuk memindahkannya. Namun, pemerintah Korea Selatan menolak permintaan Jepang dengan alasan patung tersebut adalah milik warga sipil, bukan milik pemerintah, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk memindahkannya. Hingga kesepakatan mengenai isu *ianfu* tercapai antara Jepang dan Korea Selatan, patung *Pyeonghwa-bi* masih tetap berada di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul.

Selain menuntut pemerintah Jepang di tingkat nasional, *The Korean Council* juga mengangkat isu *ianfu* ke tingkat internasional. Pada tahun 1992, *The Korean Council* melaporkan isu *ianfu* ke Komisi HAM PBB sebagai isu kekerasan terhadap perempuan selama perang. Melalui investigasi Pelapor Khusus PBB, perbudakan seksual militer Jepang diakui sebagai pelanggaran HAM dan hukum internasional. Setelah itu, seruan pada pemerintah Jepang dibuat oleh badan-badan HAM PBB (seperti *Human Rights Council* dan *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*), *International Labour Organization* (ILO), dan *International Commission of Jurists* (ICJ). *The Korean Council* juga mengangkat isu *ianfu* dalam Konferensi Solidaritas Asia tahun 1992, Konferensi Dunia untuk HAM di Vienna tahun 1993, serta dalam Konferensi Dunia untuk Perempuan di Beijing pada tahun 1995.⁷⁶ Sejak dibawa ke tingkat internasional oleh *The Korean Council*, isu *ianfu* berhasil mendapatkan perhatian

⁷⁵ Moteki Hiromichi. *Lies Inscribed on the Stone Monument in Glendale and the Comfort Women Controversy*. Dalam Society for the Dissemination of Historical Fact. 2014. *The Truth about Comfort Women*. Tokyo: Society for the Dissemination of Historical Fact. (Hal. 21)

⁷⁶ The Korean Council. *op.cit.*

dan dukungan masyarakat internasional, serta diakui sebagai salah satu penemuan paling signifikan dari Forum NGO.

Perhatian masyarakat dan komunitas internasional tertuju pada bagaimana perlakuan tentara Jepang terhadap *ianfu*. Yoshimi Yoshiaki⁷⁷ berpendapat bahwa 4 jenis kebebasan yang dimiliki oleh *ianfu* telah dirampas oleh militer Jepang. Pertama, kebebasan bertempat tinggal. Para *ianfu* dipaksa tinggal di sebuah ruang dalam *ianjo* di mana mereka harus memberikan pelayanan seksual bagi para tentara. Kedua, kebebasan bergerak. *Ianfu* tidak bebas pergi keluar dari *ianjo* tanpa ijin yang diberikan oleh militer. Ketiga, kebebasan untuk menolak berhubungan seksual. *Ianfu* tidak diperbolehkan untuk menolak berhubungan seksual dengan tentara hanya karena alasan “Saya terlalu lelah” atau “Saya tidak menyukai dia (tentara)”. Keempat, kebebasan untuk keluar. Tidak ada regulasi dalam *ianjo* yang menyebutkan bahwa para *ianfu* memiliki hak untuk berhenti bekerja meskipun *Shōgi Torishimari Kisoku* (Hukum Pengaturan Artis Wanita dan Wanita Penghibur) yang berlaku pada 1900 – 1946 memberikan hak bagi mereka untuk berhenti dari pekerjaannya.⁷⁸ Dengan kata lain, militer Jepang pada saat itu juga melanggar hukum dengan tidak menerapkan aturan dalam *Shōgi Torishimari Kisoku*.

Dukungan masyarakat internasional untuk mantan *ianfu* direalisasikan melalui *The Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery (Tokyo Women's Tribunal)*, sebuah pengadilan HAM internasional yang bersifat simbolis yang diadakan di Tokyo pada 8 – 10 Desember 2000. Pengadilan ini pertama kali dicetuskan oleh sebuah kelompok wanita Jepang yang bernama *Violence Against Women in War Network, Japan* (VAWW-NET Japan). Kelompok ini merasa bertanggungjawab atas kejahatan negara mereka terhadap perempuan dan percaya bahwa kebebasan dari kekerasan terhadap perempuan di abad 21 tidak bisa direalisasikan tanpa tanggung jawab kepada *ianfu*. VAWW-NET Japan mengajukan proposal *Tokyo Women's Tribunal* dalam Konferensi

⁷⁷ Yoshimi Yoshiaki adalah seorang sejarawan di Universitas Chūō. Buku “Comfort Women” diterbitkan dalam Bahasa Jepang pada 1995.

⁷⁸ Satoko Oka Norimatsu. 2015. “Reexamining the ‘Comfort Women’ Issue 改めて慰安婦問題の本質を問う An Interview with Yoshimi Yoshiaki. *The Asia-Pacific Journal*.

Solidaritas Perempuan Asia pada April 1998. Proposal tersebut kemudian disetujui oleh organisasi-organisasi yang mendukung *ianfu* yang berasal dari Korea Selatan, Korea Utara, China, Taiwan, Filipina, dan Indonesia. Dukungan lainnya berasal dari aktivis hak-hak perempuan dan akademisi dari negara-negara lain. Organisasi, aktivis, dan akademisi tersebut kemudian bergabung dalam *International Organizing Committee* (IOC) yang bertugas mempersiapkan sebuah piagam yang akan menetapkan yurisdiksi atas tanggung jawab pelaku dan negara terkait budak seksual militer sebagai bentuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tokyo Women's Tribunal memiliki dua tujuan. Pertama, menegaskan bahwa *comfort system* merupakan kejahatan perang terhadap perempuan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menekan pemerintah Jepang untuk mengambil tanggung jawab hukum. Hal ini sangat penting, mengingat kejahatan terhadap budak seksual militer tidak pernah dituntut, baik oleh *International Military Tribunal for the Far East (Tokyo War Crimes Trial)*⁷⁹ maupun oleh pemerintah Jepang sendiri. Dengan kata lain, *Tokyo Women's Tribunal* dianggap sebagai tambahan atau lanjutan dari *Tokyo War Crimes Trial*. Tujuan kedua adalah mengakhiri siklus impunitas kekerasan terhadap perempuan sebagai budak seks di masa perang dan mencegahnya terjadi kembali di berbagai belahan dunia.⁸⁰

Tokyo Women's Tribunal berhasil membuktikan bahwa militer Jepang pada tahun 1937 – 1945 telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk perbudakan seksual. Otoritas pengadilan ini tidak berasal dari negara atau organisasi antar-pemerintah, melainkan dari masyarakat internasional.⁸¹ Meskipun tidak bersifat mengikat, namun pengadilan tersebut diharapkan dapat memberikan tekanan pada pemerintah Jepang agar segera bertanggung jawab atas kejahatannya kepada perempuan di masa Perang Dunia II.

⁷⁹ Sebuah pengadilan yang mengadili para penjahat perang dari Jepang. Pengadilan ini diadakan pada 29 April 1946 di Tokyo.

⁸⁰ Yayori Matsuri, *Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery: Memory, Identity, and Society* dalam Peter Li. 2009. *Japanese War Crimes: The Search for Justice*. New Brunswick: Transaction Publishers. (Hal. 259)

⁸¹ Komnas HAM. *op.cit.*, hal. 4.

Dalam konteks isu *ianfu*, pihak yang pertama kali mengangkat isu ini ke permukaan adalah mantan *ianfu* Korea Selatan dengan dibantu oleh kelompok aktivis atau organisasi sosial, di mana organisasi sosial non-pemerintah itu kemudian membawa isu tersebut ke PBB. Upaya mereka berhasil menginternasionalisasikan isu *ianfu* sebagai isu HAM dan kekerasan terhadap perempuan serta membuat isu ini mendapatkan perhatian dan tekanan masyarakat internasional.

2.2.2. Tuntutan Pemerintah Korea Selatan

Di Korea Selatan, apakah sebuah isu bisa diangkat oleh pemerintah, tergantung pada seberapa kuat tuntutan publik atau masyarakat terhadap isu tersebut.⁸² Banyaknya dukungan masyarakat Korea Selatan terkait isu *ianfu* ini membuat pemerintah Korea Selatan kemudian turut menuntut pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab. Namun, perbedaan persepsi pemimpin Korea Selatan berpengaruh pada perbedaan sikap mereka terkait isu tersebut.

Isu *ianfu* pertama kali diangkat pada masa pemerintahan Presiden Roh Tae-woo. Roh membawa isu *ianfu* dalam pertemuan bilateralnya dengan PM Jepang Miyazawa Kiichi bulan Januari 1992, lebih dari 25 tahun sejak normalisasi hubungannya dengan Jepang.⁸³ Presiden Roh menekankan bahwa fakta mengenai *ianfu* harus diselidiki dan diungkap.⁸⁴

Senada dengan pendahulunya, Presiden Kim Young-sam yang menjabat sejak Februari 1993 juga mendesak pemerintah Jepang untuk menyelidiki masalah tersebut secara menyeluruh dan memberikan faktanya kepada publik, namun Kim tidak menuntut kompensasi pada Jepang terkait *ianfu*. Ia mengatakan, “Kami tidak berniat menuntut kompensasi material dari pemerintah Jepang. Kompensasi akan diberikan dengan menggunakan anggaran pemerintah Korea Selatan tahun

⁸² Minseoun Ku. 2015. *The Growing “Discomfort” with Comfort Women: Analysis of Factors of Growing Salience of the Comfort Women Issue between South Korea and Japan*. (Diakses dari www.e-ir.info/2015/11/11/the-growing-discomfort-with-comfort-women/ pada 16 September 2016)

⁸³ Tsutomu Nishioka. 2015. *The Comfort Women Issue in Sharper Focus*. Tokyo: Japan Policy Institute. Hal. 12.

⁸⁴ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1993. *On the Issue of “Comfort Women”*. (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/postwar/issue9308.html> pada 20 September 2016)

depan.”⁸⁵ Melalui pernyataan tersebut, Kim mengumumkan bahwa Seoul tidak akan mencari kompensasi dari Jepang untuk mantan *ianfu*, tetapi kompensasi akan diberikan dari anggaran pemerintah.

Presiden yang menjabat selanjutnya, yaitu Kim Dae Jung, menjanjikan bahwa Korea Selatan tidak akan mengungkit masalah sejarah lagi pada Jepang jika Jepang telah menyatakan permintaan maaf.⁸⁶ Namun tentu saja Kim tidak bisa menjamin komitmen tersebut akan dilaksanakan oleh penerusnya, politisi-politisi Korea Selatan, organisasi non-pemerintah, atau publik yang masih menuntut Jepang menyelesaikan isu tersebut. Setelah Kim tidak lagi menjabat, komitmen tersebut tidak dilaksanakan oleh penerusnya, Roh Moo-hyun, yang tentu saja memiliki persepsi yang berbeda dengannya.

Pada awalnya, Roh Moo-hyun acuh terhadap isu ini. Namun selanjutnya ia menjadi lebih aktif menuntut Jepang untuk menyelesaikan isu *ianfu*. Pada tahun 2005, pemerintahan Roh merilis semua dokumen yang berkaitan dengan pertemuan Jepang – Korea Selatan dan menggunakannya sebagai dasar klaim bahwa Kesepakatan Penyelesaian Klaim 1965 tidak menyelesaikan isu *ianfu* dan beberapa isu historis lainnya.⁸⁷ Dalam pidatonya pada 1 Maret 2005, ia menyatakan bahwa :

“To further develop relations between Japan and South Korea, sincere efforts are needed on the part of the government and people of Japan. They need to discover the truth about their past, reflect on it and make a genuine apology as well as reparations if need be — and then reconcile. This is the universal process for settling historic problems in all other parts of the world. I hope that Japan understands the indignation of the Korean people who suffered pain countless times because of Japan exploiting Korean draftees and “comfort women” during the 35 years of its imperial rule. Once again, I appeal to the conscience of Japan. I hope that Japan, based on its genuine self-

⁸⁵ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2014. *Details of Exchanges Between Japan and the Republic of Korea (ROK) Regarding the Comfort Women Issue ~ From the Drafting of the Kono Statement to the Asian Women’s Fund ~*

⁸⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1998. *Japan-Republic of Korea Joint Declaration: A New Japan-Republic of Korea Partnership towards the Twenty-first Century.* (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/korea/joint9810.html> pada 25 September 2016)

⁸⁷ Naoko Kumagai. 2016. “The Background to the Japan – Republic of Korea Agreement: Compromises Concerning the Understanding of the Comfort Women Issue”. *Asia-Pacific Review*, Vol. 23, No. 1.

reflection, will take the initiative in removing the deep-seated emotional hurdle between the two neighbors — and heal the scar.”⁸⁸

(Untuk meningkatkan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan, upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan masyarakat Jepang sangatlah diperlukan. Mereka perlu menemukan kebenaran tentang masa lalu mereka, merefleksikannya, serta membuat pernyataan maaf dan reparasi jika diperlukan – dan kemudian merekonsiliasinya. Ini adalah proses universal mengenai penyelesaian masalah historis di dunia. Saya berharap Jepang memahami kemarahan rakyat Korea Selatan yang telah menjadi ianfu selama 35 tahun penjajahan Jepang. Sekali lagi saya mengimbau Jepang. Saya berharap Jepang akan mengambil inisiatif untuk menghilangkan rintangan emosional yang mendalam antara dua tetangga dan menyembuhkan luka ianfu.)

Presiden Roh menekankan Jepang untuk mengakui kesalahannya terhadap *ianfu* Korea Selatan dan bertanggung jawab, agar bisa lebih mengembangkan hubungan bilateral kedua negara.

Pemerintahan di bawah Presiden Lee Myung-bak pada awalnya juga bersikap lunak terhadap isu ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tuntutan dari pemerintah terkait isu *ianfu* meskipun pada saat peringatan 100 tahun aneksasi Jepang di Korea, Perdana Menteri Naoto Kan sama sekali tidak membahas isu ini. Isu *ianfu* kembali menjadi masalah diplomatik Korea Selatan dengan Jepang sejak Agustus 2011 ketika Pengadilan Konstitusional Korea Selatan mengeluarkan keputusan yang menyatakan, “Tidak konstitusional bagi pemerintah Korea Selatan jika tidak mencari kompensasi bagi mantan ‘wanita penghibur’”.⁸⁹ Putusan pengadilan tersebut serta dibangunnya *Pyeonghwa-bi* pada Desember 2011 membuat Presiden Lee untuk pertama kali sejak ia menjabat, menuntut pernyataan maaf dari pemerintah Jepang pada pertemuan bilateral dengan Jepang. Sejak saat itu, isu *ianfu* menjadi isu bilateral yang sensitif di antara kedua negara.

Jika melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan seperti yang telah dijelaskan di atas, upaya tersebut tampak kurang tegas. Seperti yang

⁸⁸ The Globalist. 2005. *South Korea’s Roh Moo-Hyun: What Japan Should Learn From Europe.* (Diakses dari <http://www.theglobalist.com/south-koreas-roh-moo-hyun-what-japan-should-learn-from-europe/> pada 25 September 2016)

⁸⁹ Tsutomu Nishioka. *op.cit.*

dilakukan oleh Kim Young-sam dan Kim Dae Jung yang tidak menuntut kompensasi dari pemerintah Jepang. Keputusan kedua pemimpin ini tidak mencerminkan tuntutan mantan *ianfu* dan organisasi yang mendukungnya yang menginginkan kompensasi dari pemerintah Jepang. Roh Moh-hyun dan Lee Myung-bak juga bersikap acuh dan lunak terhadap isu ini. Baru setelah pemerintahan Lee mendapatkan teguran dari Pengadilan Konstitusional, ia menjadi lebih tegas menghadapi isu tersebut. Seharusnya jika pemerintah Korea Selatan benar-benar ingin menyelesaikan isu *ianfu*, pemerintah perlu bersikap lebih tegas pada pemerintah Jepang.

Sementara itu presiden Korea Selatan yang saat ini menjabat sejak tahun 2013, Park Geun-hye, memiliki pandangan yang berbeda dengan pendahulunya dalam menyikapi isu *ianfu*. Sejak awal menjabat, Park menganggap isu tersebut adalah rintangan besar bagi hubungan bilateral dengan Jepang. Berkaitan dengan isu *ianfu*, sikap Park lebih tegas dibandingkan dengan pendahulunya. Ia menolak bertemu secara bilateral dengan PM Shinzo Abe karena pemimpin negeri sakura itu tidak segera menyelesaikan isu sensitif tersebut dan bahkan pernah berencana untuk merevisi *Kono Statement* yang berisi pengakuan keterlibatan militer Jepang dalam *comfort system*. Park menolak bertemu Abe hingga Abe menunjukkan perhatian terhadap isu *ianfu* dan berjanji tidak akan merevisi *Kono Statement*. Penolakan pertemuan bilateral tingkat tinggi tersebut membuat hubungan kedua negara terganggu.

Tidak hanya menolak bertemu secara bilateral dengan Abe, Park juga menuntut Abe melalui pidatonya tanggal 1 Maret 2014. Park mendesak Abe untuk bersikap jujur dan berani menghadapi sejarah agresi Jepang, terutama dalam kasus *comfort system*. Park mengatakan, “Keberanian sejati bukanlah menyangkal masa lalu, akan tetapi melihat sejarah tersebut dan mengajarkannya dengan benar kepada generasi sekarang. Semakin seseorang menyangkal sejarah atau masa lalu, maka seseorang tersebut akan semakin terisolasi.” Dalam pidatonya tersebut, Park juga mengatakan bahwa waktu sudah hampir habis bagi para mantan *ianfu*,

mengingat usia mereka sudah sangat tua, yakni sekitar 80 tahun.⁹⁰ Tuntutan Park tersebut merefleksikan perasaan masyarakat Korea Selatan yang juga ingin Jepang bertanggung jawab terhadap *ianfu*.

Isu *ianfu* menjadi isu penting yang diperjuangkan oleh Korea Selatan karena jika dikaitkan dengan politik identitas, *ianfu* merupakan simbol trauma terhadap kolonialisme Jepang dan penindasan atas martabat Korea.⁹¹ Dengan kata lain, jika pemerintah Korea Selatan tidak memperjuangkan isu *ianfu*, maka itu sama saja pemerintah tidak memperjuangkan identitasnya dan membiarkan martabat Korea Selatan ditindas oleh Jepang. Oleh karena itu, Korea Selatan, terutama pemerintahan Park, sangat memperjuangkan isu ini dan terus menuntut Jepang agar bertanggung jawab.

Namun, dua tahun setelah menjabat, sikap Park Geun-hye berubah menjadi lebih lunak dan bersahabat terhadap Jepang. Perubahan ini ditandai dengan rencananya untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Shinzo Abe pada 2 November 2015. Dalam pertemuannya, Park menyatakan,

“I truly wish for the ‘comfort women’ issue to be resolved within this year [2015] through the Japan-Korea leaders’ summit and to heal the wounds of the victims. It is important that the Japanese government presents a plan that can be acceptable to the victims and our people as soon as possible.”⁹²

*(Saya sangat berharap isu *ianfu* selesai pada tahun ini [2015] melalui pertemuan pemimpin Jepang dan Korea Selatan untuk mengobati luka para korban. Penting bagi pemerintah Jepang untuk membuat rencana yang dapat diterima oleh para korban secepat mungkin.)*

Dari pernyataannya tersebut, Park ingin pemerintah Jepang membuat sebuah rencana dan bertindak untuk menyembuhkan luka akibat penderitaan yang dialami oleh para *halmoni* semasa dijadikan *ianfu* oleh Jepang. Sementara itu, dari sikapnya yang lebih lunak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, bisa dilihat

⁹⁰ Hong Nack Kim. 2014. “Japanese-South Korean Relations Under the Second Abe Government, 2012-2014”. *International Journal of Korean Studies*. Hal. 12.

⁹¹ Jeff Kingston. 2017. *Do the Memories of ‘Comfort Women’ Matter?*. (Diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/02/04/commentary/memories-comfort-women-matter/> pada 5 Maret 2017)

⁹² Mina Pollmann. 2015. ‘*Comfort Women*’ Issue Dominates Rare Japan – Korea Bilateral Talks. (<http://www.thediplomat.com/2015/11/comfort-women-issue-dominates-rare-japan-korea-bilateral-talks/> pada 27 Oktober 2016)

bahwa Park ingin bekerjasama, membangun kepercayaan, dan membuka hubungan yang baru dengan Jepang. Keinginan tersebut juga ditunjukkan oleh Park dengan mengatakan, “Mari bekerjasama untuk menciptakan atmosfir yang kondusif untuk lebih sering mengadakan pertemuan puncak”.⁹³ Pada pertemuan itu pula, pemimpin kedua negara ini sepakat untuk segera menyelesaikan isu *ianfu* secepat mungkin.

Kesepakatan antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang mengenai *ianfu* menuai berbagai reaksi di Korea Selatan. Mantan *ianfu* dan *The Korean Council* memandang kesepakatan tersebut sebagai sesuatu yang mengejutkan dan pengkhianatan karena pemerintah tidak melibatkan mantan *ianfu* dalam pembuatan kesepakatan tersebut. *The Korean Council* menyebut kesepakatan itu sebagai “diplomasi yang memalukan” karena pemerintah terlalu cepat menyerah dan membuat keputusan.⁹⁴ Media-media juga mengkritik kesepakatan itu. *The Korea Times* menyebutnya sebagai “kesepakatan yang tidak seharusnya terjadi” dan mengklaim bahwa pemerintah bersikap “setengah-setengah terhadap mantan *ianfu*”. Media lainnya juga mengkritik Park karena tidak melakukan konsultasi dengan mantan *ianfu* sebelum menyetujui kesepakatan tersebut.⁹⁵

Bagi para mantan *ianfu*, kesepakatan tersebut belum cukup untuk mengobati luka fisik dan psikologis yang mereka alami akibat kekejaman tentara Jepang, sehingga mereka tidak bersedia menerima kesepakatan itu. Bagi *The Korean Council*, kesepakatan itu juga tidak dapat diterima. Organisasi tersebut ada untuk mendukung *ianfu* serta mengusung nilai-nilai HAM dan menolak kekerasan terhadap perempuan. Kesepakatan tersebut tidak membawa nilai-nilai yang mereka usung dan tidak melibatkan *ianfu* yang mereka dukung, sehingga mereka mengkritiknya. Meskipun banyak pihak yang mengkritik kesepakatan itu, bukan berarti tidak ada yang menerimanya. Hingga Februari 2016, terdapat 14

⁹³ Asian Nikkei. *op.cit.*

⁹⁴ The New York Times. 2015. *Japan and South Korea Settle Dispute Over Wartime ‘Comfort Women’*. (Diakses dari http://www.nytimes.com/2015/12/29/world/asia/comfort-women-south-korea-japan.html?_r=0 pada 12 November 2016)

⁹⁵ Foreign Affairs. 2016. *Japan and South Korea After the “Comfort Women” Deal*. (Diakses dari <https://www.foreignaffairs.com/articles/northeast-asia/2016-01-12/no-grand-bargain> pada 12 November 2016)

mantan *ianfu* yang bersedia menerima keputusan pemerintah dan kompensasi dari Jepang.⁹⁶

Dalam bab ini telah dijelaskan mengenai sejarah *ianfu* dan tuntutan Korea Selatan terhadap pemerintah Jepang untuk menyelesaikan isu *ianfu*. Tuntutan dan upaya yang dilakukan oleh *ianfu*, *The Korean Council*, dan pemerintah Korea Selatan akhirnya membawa hasil pada 28 Desember 2015 dengan disepakatinya penyelesaian isu tersebut dengan Jepang. Kesepakatan tersebut menuai berbagai reaksi dari publik Korea Selatan, seperti dari mantan *ianfu* sendiri, *The Korean Council*, dan media. Setiap pihak, baik yang mendukung maupun menolak kesepakatan tersebut, memiliki kepentingan dan nilai-nilai tersendiri. Terlepas dari semua kepentingan pihak-pihak tersebut, kesepakatan itu telah menandakan kemajuan diplomatik dan politik antara kedua negara, mengingat sejak 2,5 tahun sebelumnya terdapat kebekuan diplomasi antara kedua pemimpin negara.

⁹⁶ The Asahi Shimbun. 2016. 14 Former 'Comfort Women' Positive about Japan-South Korea Agreement. (Diakses dari <http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201602050050.html> pada 12 November 2016)

BAB 3. IANFU DALAM HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN

Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang berada di kawasan Asia Timur yang memiliki kaitan historis, yaitu pendudukan dan aneksasi Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910 hingga 1945. Sebelum menganeksasi Korea, Jepang terlebih dahulu mengalahkan dua kekuatan besar yang membayangi Korea, yaitu China dan Rusia. Perang antara Jepang dan China (*Sino-Japanese War, 1894-1895*) terjadi akibat konflik antara kedua negara atas supremasi di Korea. Lokasi Korea yang strategis di seberang Jepang serta sumber daya alam batu bara dan besi menarik minat Jepang untuk menjalin hubungan dengan Korea. Pada tahun 1875, Jepang memaksa Korea membuka diri untuk negara lain (terutama Jepang), melakukan perdagangan, dan menyatakan Korea merdeka dari China dalam hubungan luar negeri. Korea telah lama menjalin hubungan dengan China, di mana Korea dianggap sebagai bawahan Kerajaan China. Namun, perang antara Jepang dan China yang terjadi selama setahun tersebut mengakibatkan penghapusan klaim China atas kedaulatan Korea.⁹⁷

Setelah berhasil menggulingkan China dari Korea, Jepang menghadapi kekuatan besar yang lainnya, yaitu Rusia. Perang antara Rusia dan Jepang (*Russo-Japanese War*) yang terjadi pada tahun 1904 hingga 1905 diakibatkan oleh persaingan antara Jepang dan Rusia atas dominasi di Korea dan Manchuria. Kemenangan Jepang memaksa Rusia meninggalkan kebijakan ekspansionis di Asia, termasuk di Korea. Setelah berhasil mengusir kekuatan Rusia dari Korea dan ditandatanganinya Perjanjian *Anglo-Japanese* 1905 yang mengakui posisi Jepang di Korea, Jepang menjadikan Korea sebagai negara di bawah protektoratnya.⁹⁸

Lima tahun kemudian, tepatnya pada 29 Agustus 1910, Jepang mengatur penandatanganan *Japanese-Korean Annexation Treaty* yang menyatakan bahwa

⁹⁷ Toyokichi Iyenaga. 1912. "Japan's Annexation of Korea". *The Journal of Race Development*, Vol. 3, No. 2. Hal. 202.

⁹⁸ *ibid.*

Kekaisaran Jepang mengambil alih Kerajaan Korea, membuatnya menjadi bagian dari Jepang dan menjadi jajahan Jepang.⁹⁹ Aneksasi ini dilakukan oleh Jepang karena beberapa alasan, yaitu untuk menjamin keamanan nasional, menjamin perdamaian di Asia Timur, mempromosikan kesejahteraan dan kemakmuran di Korea, serta mengkonsolidasikan kepentingan Jepang dan Korea di Asia Timur.¹⁰⁰ Sejak saat itu, Jepang menguasai seluruh hak dan fungsi politik Korea, baik urusan politik dalam negeri maupun luar negeri. Selama masa pendudukan Jepang di Korea, Jepang membuat sebuah kebijakan, yaitu *Kōminka movement*¹⁰¹ yang berisi 3 aturan, yaitu memaksa masyarakat Korea untuk beribadah di Kuil Shinto¹⁰², menggunakan bahasa Jepang¹⁰³, dan menerapkan sistem nama keluarga Jepang.¹⁰⁴ Pada masa itu pula, tentara Jepang mengumpulkan gadis-gadis muda berusia 14 sampai 18 tahun dan memaksa mereka menjadi budak seks bagi tentara Jepang.¹⁰⁵ Kekejaman ini terus berlanjut hingga Jepang mengalami kekalahan perang pada tahun 1945. Jepang kemudian melepaskan Semenanjung Korea dari pendudukannya.

Setelah lepas dari aneksasi Jepang, Korea terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Negara yang akan dibahas di skripsi ini adalah Korea Selatan, sehingga selanjutnya pembahasan hanya akan fokus pada Korea Selatan. Setelah terbentuk pada tahun 1948, Korea Selatan dipimpin oleh Presiden Rhee Syng-man yang menjabat hingga 27 April 1960. Selama masa kepemimpinannya, Rhee menginginkan Jepang untuk mengeluarkan pernyataan

⁹⁹ International Society for Educational Information. 1995. *Japan in Modern History: High School Vol. I*. Tokyo: International Society for Educational Information. Inc. Hal. 362.

¹⁰⁰ Toyokichi Iyenaga, *op.cit*. Hal. 201.

¹⁰¹ *Kōminka* dalam bahasa Jepang berarti “untuk merubah (orang-orang kolonial) menjadi tunduk pada kekaisaran”. *Kōminka movement* adalah gerakan yang bertujuan untuk membuat orang-orang yang dijajah menjadi seperti penjajah (Jepang). *Kōminka movement* bisa dianggap seperti asimilasi, namun dengan cara yang ekstrim.

¹⁰² Pemerintah kolonial Jepang berupaya untuk menundukkan Kristen, agama yang paling aktif dan berpengaruh di Korea pada saat itu.

¹⁰³ Masyarakat Korea dilarang menggunakan *hangeul* (huruf Korea) dan menggunakan bahasa Korea.

¹⁰⁴ Wan-yao Chou. *The Kōminka Movement in Taiwan and Korea: Comparisons and Interpretations* dalam Peter Duus, dkk. *The Japanese Wartime Empire, 1931 – 1945*. 1996. New Jersey: Princeton University Press.

¹⁰⁵ Sue R. Lee, 2003, *Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay*, Vol. 24, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law (hal. 4).

maaf akibat pendudukannya di Korea pada tahun 1910-1945; tidak mengijinkan pejabat dan cendekiawan Korea Selatan untuk terlibat dalam wacana atau pembicaraan dengan pejabat atau cendekiawan lainnya di Jepang; serta melarang reporter Jepang untuk memasuki wilayah Korea Selatan. Sikap Rhee tersebut membuat konfrontasi antara Korea Selatan dan Jepang semakin panjang dan normalisasi hubungan kedua negara semakin tertunda. Meskipun sekutu terdekat Korea Selatan, Amerika Serikat, telah mendesak negeri ginseng tersebut untuk melakukan normalisasi dengan Jepang, namun sikap dan posisi Rhee tidak berubah. Barulah ketika kepemimpinan Rhee berakhir dan Park Chung-hee memimpin, Korea Selatan bersedia menormalisasi hubungannya dengan Jepang. Park adalah *japanophile* yang mengadopsi model pembangunan era Meiji di Korea Selatan.¹⁰⁶ Park juga mempelajari pola pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II dan menirunya. Meskipun Park adalah seorang nasionalis, namun Park juga mengagumi Jepang karena kekuatannya sebagai negara modern. Kepribadian dan kebijakan Park tersebut membuat normalisasi kedua negara akhirnya tercapai pada 22 Juni 1965.¹⁰⁷

Normalisasi hubungan kedua negara ditandai dengan ditandatanganinya *The 1965 Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea* yang berisi dasar hubungan diplomasi Jepang dan Korea Selatan. Perjanjian antara kedua negara mengenai penyelesaian masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan klaim dan properti, serta kerjasama ekonomi juga ditandatangani. Melalui kesepakatan tersebut dan Perjanjian antara Jepang dan Korea Selatan mengenai Penyelesaian Masalah Properti, Klaim, dan Kerjasama Ekonomi, pemerintah Jepang menyediakan dana sebesar 800 juta US dolar untuk Korea Selatan. Tiga ratus juta dolar diberikan untuk bantuan ekonomi melalui produk dan layanan,

¹⁰⁶ Fitur utama dari model ini adalah kekuasaan politik yang terkonsentrasi di beberapa pihak, kepemimpinan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, dan stimulasi pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan kapitalis.

¹⁰⁷ Chong-sik Lee. 1985. *Japan and Korea: The Political Dimension*. California: Hoover Institution Press.

pinjaman sebesar 200 juta dolar dengan produk dan layanan selama 10 tahun, serta pinjaman untuk kepercayaan pribadi sebesar 300 juta dolar.¹⁰⁸

Walaupun Jepang dan Korea Selatan telah menormalisasi hubungannya dan Jepang telah menyediakan dana bagi Korea Selatan, namun luka yang dirasakan oleh Korea Selatan akibat pendudukan Jepang masih belum sepenuhnya hilang, bahkan setelah 3 dekade normalisasi tersebut terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya sensitivitas masyarakat dan pemerintah Korea Selatan terhadap Jepang. Misalnya melarang masuknya kebudayaan Jepang ke Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena luka yang dirasakan oleh Korea Selatan akibat dilarangnya penggunaan bahasa dan huruf Korea di masa penjajahan Jepang. Larangan tersebut awalnya dibentuk setelah berakhirnya penjajahan Jepang di Korea. Pemerintah Korea Selatan melarang masuknya siaran dan distribusi catatan, video, CD, serta *games* dari Jepang. Akibatnya, Korea Selatan tidak memiliki akses legal atas media dan kebudayaan Jepang hingga tahun 1998.¹⁰⁹

Kedua, memberikan kritik dan protes ketika pejabat Jepang mengunjungi Kuil Yasukuni, sebuah kuil tempat dimakamkannya para prajurit Jepang di masa Perang Dunia II. Bagi Jepang, prajurit tersebut adalah pahlawan yang telah membela dan berjuang demi negara. Namun bagi Korea Selatan, prajurit Jepang tersebut adalah para penjahat perang. Menurut Korea Selatan, mengunjungi Kuil Yasukuni sama saja dengan menghormati para penjahat perang, dan hal itu sangat melukai perasaan Korea Selatan, mengingat mereka diperlakukan dengan kejam oleh para tentara Jepang di masa pendudukan. Kunjungan pejabat Jepang ke kuil tersebut selalu mendapatkan protes dan kritik, baik dari masyarakat maupun pemerintah Korea Selatan.

Ketiga, masyarakat dan pemerintah Korea Selatan menaruh perhatian pada isu budak seks di masa perang (*ianfu*). Korea Selatan menuntut pemerintah Jepang untuk memberikan permohonan maaf dan kompensasi kepada para mantan

¹⁰⁸ Miki Y. Ishikida. 2005. *Toward Peace: War Responsibility, Postwar Compensation, and Peace Movements and Education in Japan*. Bloomington: iUniverse. Hal. 21.

¹⁰⁹ Pemerintah Korea Selatan mencabut larangan masuknya kebudayaan Jepang ke Korea Selatan pada tahun 1998. Dari Hitoshi Suzuki. 2004. *Ban Lifted on Japanese Popular Culture in South Korea*. (Diakses dari http://www.iist.or.jp/wf/magazine/0241/0241_E.html pada 12 November 2016)

ianfu. Ketiga isu historis tersebut seringkali membuat hubungan Jepang dan Korea Selatan memanas. Misalnya saja isu *ianfu* yang telah menyebabkan presiden Korea Selatan, Park Geun-hye tidak bersedia melakukan pertemuan bilateral dengan perdana menteri Jepang, Shinzo Abe.

Meskipun hubungan Jepang dan Korea Selatan diwarnai oleh beberapa hambatan, namun kedua negara sebenarnya memiliki kepentingan yang sama dalam kawasan, yaitu menjaga stabilitas dan keamanan kawasan dari ancaman nuklir Korea Utara. Hal ini diungkapkan oleh Abe dan Park dalam pertemuan trilateralnya dengan Presiden Obama yang membahas kondisi keamanan di kawasan Asia Timur. Abe dan Park mengungkapkan bahwa kedua negara menghadapi ancaman yang sama, yakni nuklir dan rudal Korea Utara, serta pentingnya kedua negara bersama dengan Amerika Serikat untuk mencegah perkembangan nuklir Korea Utara untuk menjaga keamanan kawasan.¹¹⁰

Bab ini akan membahas mengenai hubungan Jepang dan Korea Selatan sebelum tercapainya kesepakatan mengenai isu *ianfu*, serta bagaimana isu *ianfu* mempengaruhi hubungan kedua negara.

3.1. Hubungan Jepang dan Korea Selatan

Sejak tahun 1965, Jepang dan Korea Selatan telah membangun hubungan yang membuat mereka menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat dan berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Kedua negara juga telah menjadi model pasar bebas dan perdagangan internasional. Pada tahun 2013, Jepang menjadi negara dengan GDP (*gross domestic product*) terbesar ketiga di dunia dengan jumlah 4,9 miliar dolar, dan Korea Selatan pada urutan keempat belas dengan 1,3 miliar dolar. Sejak normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1965, hubungan kedua negara terus meningkat di beberapa bidang. Dalam bidang ekonomi, di tahun 2014 jumlah perdagangan barang antar kedua negara meningkat 385 kali lipat dibandingkan pada tahun 1965. Dalam bidang pariwisata,

¹¹⁰ The White House. 2016. *Remarks by President Obama, President Park Geun-Hye of the Republic of Korea, and Prime Minister Shinzo Abe of Japan After Trilateral Meeting*. (Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/31/remarks-president-obama-president-park-geun-hye-republic-korea-and-prime> pada 30 November 2016)

jumlah wisatawan Jepang yang mengunjungi Korea Selatan dan sebaliknya meningkat hingga lebih dari 5 juta orang pada tahun 2014, berbeda jauh dengan tahun 1965 yang hanya sekitar 10.000 orang. Sementara itu dalam bidang budaya, sejak tahun 1998 pertukaran budaya antar kedua negara terus meningkat sejak pencabutan larangan masuknya budaya Jepang ke Korea Selatan. Kebudayaan populer Jepang, seperti novel, *manga*, *anime* menjadi populer di Korea Selatan, terutama di kalangan pemuda. Begitu juga dengan kebudayaan populer Korea Selatan yang dikenal dengan sebutan *Korean wave* atau *hallyu* menjadi populer di Jepang.¹¹¹

Meskipun hubungan Jepang dan Korea Selatan di bidang ekonomi atau pertukaran budaya meningkat jika dibandingkan dengan tahun 1965, namun peningkatan ini masih sering diikuti oleh kemerosotan di bidang politik karena tidak adanya saling pengertian antara kedua negara terkait isu-isu historis dan teritorial. Hal ini disebabkan karena *Treaty on Basic Relations* 1965 tidak menyelesaikan kontroversi historis dan sengketa teritorial antara kedua negara. Kemerosotan hubungan ini antara lain terjadi pada tahun 1995 ketika anggota kabinet Jepang, Takami Eto, membuat pernyataan kontroversial bahwa kolonialisasi Jepang di Korea sebenarnya menguntungkan Korea. Pernyataan tersebut menuai kritik keras di Korea Selatan. Presiden yang berkuasa pada saat itu, Kim Young-sam bahkan berkata bahwa ia akan memperbaiki mentalitas orang-orang Jepang. Kontroversi juga terjadi pada tahun 1997 ketika Jepang secara sepihak menghapus perjanjian perikanan antara kedua negara; dan pada tahun 2005 ketika Prefektur Shimane di Jepang mendeklarasikan *Takeshima Day* untuk merayakan peringatan 100 tahun aneksasi Jepang di Kepulauan Dokdo/Takeshima. Kontroversi teritorial tersebut, ditambah dengan kunjungan PM Junichiro Koizumi ke Kuil Yasukuni menjadi isu serius di Korea Selatan.

¹¹¹ Cheol Hee Park. 2015. "Still Distant Neighbors: South Korea-Japan Relations Fifty Years After Diplomatic Normalization". *Council on Foreign Relations*. Hal. 2.

Presiden Roh Moo-hyun bahkan memperingatkan sebuah perang diplomatik dengan Jepang.¹¹²

Akan tetapi, meskipun hubungan politik kedua negara sering mengalami penurunan, bukan berarti sama sekali tidak ada kemajuan. Peningkatan hubungan politik Jepang dan Korea Selatan terjadi pada tahun 2009 ketika Korea Selatan dipimpin oleh Lee Myung-bak dan Jepang oleh Yukio Hatoyama. Kedua pemimpin tersebut sama-sama memainkan peran penting dalam peningkatan hubungan Jepang – Korea Selatan. Hatoyama menyerukan pembentukan *East Asian Community* dan blok perdagangan yang menandakan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Korea dan China. Peningkatan ini berlanjut ketika Jepang dipimpin oleh penerus Hatoyama, yaitu Naoto Kan, yang mengakui bahwa kolonialisasi Jepang bertentangan dengan kehendak masyarakat Korea.¹¹³ Pernyataan Kan tersebut mengurangi ketegangan historis antara kedua negara dan menjadi penekanan mengenai pentingnya hubungan yang lebih baik dengan Korea Selatan. Hubungan kedua negara terus meningkat hingga Desember 2011 ketika Lee dan PM Yoshihiko Noda mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas isu *ianfu*. Namun, ketika Lee mengunjungi Kepulauan Dokdo/Takeshima pada Agustus 2012, hubungan kedua negara mulai mengalami penurunan kembali. Kunjungan tersebut Lee lakukan akibat penolakan Noda untuk menyelesaikan isu *ianfu*.¹¹⁴ Namun hal itu hanyalah alasan Lee belaka, mengingat pemerintahan Lee sama sekali tidak menyentuh isu *ianfu*. Isu ini baru diangkat oleh Lee setelah Pengadilan Konstitusional Korea Selatan mengeluarkan putusan pada Agustus 2011 yang mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan seharusnya melakukan tindakan untuk menyelesaikan isu tersebut.

Penurunan hubungan bilateral kedua negara berlanjut ketika Shinzo Abe menjabat sebagai perdana menteri Jepang pada Desember 2012. Abe, seorang

¹¹² Min Seong-jae. 2005. *Roh Sees “Diplomatic War” with Japan*. (Diakses dari <http://www.koreajoongang-daily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2545753> pada 2 Desember 2016)

¹¹³ Cheol Hee Park, *op.cit.*, hal. 5.

¹¹⁴ Hideki Okuzono. 2015. “South Korean Judiciary Shakes Japan-South Korea Relations”. *International Circumstances in the Asia-Pacific Series, Japan Digital Library*. (Diakses dari http://www2.jjia.or.jp/en/digital_library/korean_peninsula.php pada 23 November 2016)

politisi revisionis dari *Liberal Democratic Party* (LDP), mengatakan dalam kampanye pemilihannya, bahwa Jepang tidak seharusnya berkompromi terhadap isu-isu teritorial dan ia akan mengunjungi Kuil Yasukuni jika ia terpilih.¹¹⁵ Abe juga berencana merevisi *Kono Statement*¹¹⁶ dengan mengatakan bahwa militer Jepang tidak melakukan pemaksaan kepada para *ianfu*. Sikap dan pernyataan Abe tersebut menyebabkan kemerosotan dalam hubungan Jepang dengan Korea Selatan.

Sejak Abe dan Park menjabat, keduanya sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan hubungan Jepang dan Korea Selatan. Namun, Park bersikeras Jepang harus terlebih dahulu menyelesaikan isu *ianfu* sebelum hubungan kedua negara dapat ditingkatkan. Park juga tidak sepandapat dengan rencana Abe yang akan merevisi *Kono Statement* dan keengganannya menyelesaikan isu *ianfu*. Karena sikap Abe tersebut, Park tidak bersedia melakukan pertemuan bilateral dengan Abe sejak pertama kali ia menjabat. Hal ini sangat tidak biasa karena pertemuan pemimpin Jepang – Korea Selatan biasanya terjadi segera setelah pemimpin baru di kedua negara mendapatkan jabatan.¹¹⁷ Hubungan Abe dan Park sangat kontras jika dibandingkan dengan hubungan Park dan pemimpin negara lainnya, karena sejak 9 bulan menjabat, Park telah melakukan pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat, China, Rusia, dan negara-negara Uni Eropa.¹¹⁸ Perbedaan persepsi mengenai isu *ianfu* antara Park dan Abe ini telah membawa Jepang dan Korea Selatan pada titik terendah dalam hubungan kedua negara.

Meskipun hubungan politik antara Jepang dan Korea Selatan mengalami penurunan, namun masyarakat di kedua negara percaya bahwa hubungan bilateral harus menjadi prioritas. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh East Asia Institute dan Genron NPO pada tahun 2015, sebanyak 63,5 persen responden

¹¹⁵ Cheol Hee Park, *op.cit.*, hal. 6.

¹¹⁶ Sebuah pernyataan mengenai keterlibatan militer Jepang dalam *comfort system*. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ketua Sekretaris Jepang, Yohei Kono, pada 4 Agustus 1993.

¹¹⁷ Cheol Hee Park, *op.cit.*, hal. 3.

¹¹⁸ Hideki Okuzono, *op.cit.*

Jepang mengatakan bahwa Korea Selatan adalah negara yang penting.¹¹⁹ Hal serupa juga dikatakan oleh 70,1 persen responden Korea Selatan yang mendukung pertemuan pemimpin Jepang dan Korea Selatan.¹²⁰ Namun, banyak masyarakat Jepang yang menganggap bahwa Korea Selatan cenderung memilih meningkatkan hubungannya dengan China daripada Jepang. Hal ini disebabkan karena sejak pertama kali menjabat hingga Agustus 2015, Park telah melakukan 6 kali pertemuan bilateral dengan presiden China, Xi Jinping, namun sama sekali belum melakukan pertemuan dengan Abe.¹²¹ Sementara itu, banyak masyarakat Korea Selatan yang menganggap bahwa Jepang masih belum menyatakan permintaan maaf secara tulus mengenai kolonialisasi tahun 1910 – 1945.¹²² Padahal pemerintah Jepang telah berulang kali melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara merasa perlu untuk meningkatkan hubungan bilateralnya, namun masih sedikit kepercayaan dan pemahaman yang dimiliki oleh kedua negara.

Di balik kontroversi dan perbedaan persepsi yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan, pada Agustus 2013 Park mulai menunjukkan sikap yang lebih moderat terhadap Jepang. Park mengatakan bahwa Jepang harus benar-benar mengatasi masalah sejarah, terutama isu *ianfu*. Ungkapan Park ini merupakan pertanda bahwa pemerintah Korea Selatan memiliki keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Tokyo selama Abe menyelesaikan isu *ianfu*.¹²³ Sikap moderat Park semakin terlihat dengan diadakannya pembicaraan di tingkat kementerian untuk membahas masalah *ianfu* sejak April 2014. Pembicaraan tersebut dilakukan setiap bulan dan mengarah pada pertemuan bilateral pertama antara kedua pemimpin pada November 2015 dan menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan isu *ianfu* secepat mungkin.

¹¹⁹ Genron NPO dan East Asia Institute. 2015. *The 3rd Japan – South Korea Joint Public Opinion Poll (2015): Analysis Report on Comparative Data*. (Diakses dari http://www.genron-npo.net/pdf/forum_1505_en.pdf pada 9 Desember 2016)

¹²⁰ Asan Institute for Policy Studies. 2015. *South Korea and Their Neighbors 2015*. (Diakses dari <http://www.en.asaninst.org/contents/south-koreans-and-their-neighbors/> pada 9 Desember 2016)

¹²¹ Cheol Hee Park, *op.cit.*, hal. 8.

¹²² *loc.cit.*, hal 10.

¹²³ *loc.cit.*, hal 8.

3.2. *Ianfu* dalam Hubungan Jepang – Korea Selatan

Isu *ianfu* pertama kali muncul pada akhir tahun 1991 ketika mantan *ianfu* Korea Selatan, yaitu Kim Hak-sun, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tokyo dan menuntut pemerintah Jepang bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan kepada para *ianfu*. Tidak lama kemudian gugatan tersebut mendapatkan respon dari pemerintah Jepang. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Sekretaris Kabinet, Kato Koichi, dalam sebuah konferensi pers 6 Desember 1991. Kato menyatakan bahwa *comfort station* memang ada, namun tidak ada bukti yang mengarah pada keterlibatan pemerintah dalam proses perekrutan *ianfu*.¹²⁴ Akan tetapi, setelah pemerintah Jepang melakukan penyelidikan atas isu *ianfu*, Kato menyatakan bahwa pemerintah terlibat dalam pembentukan *ianjo*, mengontrol mereka yang merekrut *ianfu*, pembangunan dan penguatan fasilitas *ianjo*, manajemen dan pengawasan *ianjo*, serta pemeliharaan kebersihan *ianjo* dan *ianfu*. Dalam pernyataannya tersebut, pemerintah Jepang juga meminta maaf kepada semua *ianfu*.¹²⁵

Penyelidikan mengenai *ianfu* dilakukan oleh pemerintah Jepang yang bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti mantan *ianfu* sendiri, mantan anggota militer, sejarawan, dan pemerintah Korea Selatan. Pada 4 Agustus 1993, pemerintah Jepang kemudian merilis laporan penyelidikan tersebut. Hasilnya adalah sebagai berikut¹²⁶:

- (1) *Ianjo* dibangun di beberapa lokasi atas permintaan militer dengan alasan mencegah pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap perempuan-perempuan lokal di daerah yang mereka duduki, mencegah tentara dari penyakit kelamin dan penyakit lainnya, dan mencegah spionase.

¹²⁴ Komnas HAM. 2013. *Pengadilan Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan: Keputusan 4 Desember 2001*. Jakarta: Komnas HAM. Hal. 366.

¹²⁵ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1992. *Statement by Chief Cabinet Secretary Koichi Kato on the Issue of the so-called "Wartime Comfort Women" from the Korean Peninsula*. (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/postwar/state9207.html> pada 9 Oktober 2016).

¹²⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1993. *On the Issue of "Comfort Women"*. (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/postwar/issue9308.html> pada 9 Oktober 2016)

- (2) *Ianjo* didirikan pertama kali di Shanghai pada tahun 1932 dan terus bertambah jumlahnya hingga berakhirnya Perang Dunia II.
- (3) *Ianjo* berada di beberapa negara, antara lain di Jepang, China, Filipina, Indonesia, Thailand, Myanmar, Papua Nugini, Hong Kong, dan Macau.
- (4) Tidak dapat dipastikan berapa jumlah *ianfu* karena tidak ada dokumen yang mengindikasikan jumlah tersebut. Namun jumlah tersebut pasti sangat besar mengingat jumlah *ianjo* juga banyak di berbagai lokasi.
- (5) Para *ianfu* berasal dari Jepang, Semenanjung Korea, China, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan Belanda. Banyak dari mereka berasal dari Korea.
- (6) Banyak *ianjo* yang dioperasikan oleh pihak swasta, meskipun ada *ianjo* di beberapa lokasi yang dioperasikan secara langsung oleh militer. Namun walaupun dioperasikan oleh swasta, militer Jepang terlibat secara langsung dalam pembentukan dan manajemen *ianjo*.
- (7) Semakin banyaknya *ianfu* yang dibutuhkan, membuat perekrut melakukan intimidasi kepada para perempuan dan memaksa mereka menjadi *ianfu*. Dalam beberapa kasus, pihak militer juga secara langsung mengambil bagian dalam proses perekrutan.
- (8) Para *ianfu* dibawa ke *ianjo* dengan menggunakan kapal dan kendaraan militer. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, mereka ditinggalkan di *ianjo* begitu saja.

Berdasarkan laporan tersebut, dapat dilihat bahwa militer Jepang terlibat dalam perekrutan *ianfu*, pembentukan dan manajemen *ianjo*, serta melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap *ianfu*. Berkaca dari fakta hasil penyelidikan ini, pemerintah Jepang kemudian mengakui kesalahan dan kekejamannya di masa lalu. Pemerintah mengeluarkan pernyataan maaf yang disampaikan oleh Ketua Sekretaris Kabinet Yohei Kono. Pernyataan yang dikenal dengan sebutan *The 1993 Kono Statement* ini dianggap sebagai pernyataan yang paling komprehensif mengenai isu *ianfu*. Kono menyatakan bahwa:

"Comfort stations were operated in response to the request of the military authorities of the day. The then Japanese military was, directly or indirectly, involved in the establishment and management

of the comfort stations and the transfer of ‘comfort women’. The recruitment of the ‘comfort women’ was conducted mainly by private recruiters who acted in response to the request of the military. The Government study has revealed that in many cases they were recruited against their own will, through coaxing, coercion, etc., and that, at times, administrative/military personnel directly took part in the recruitments The Government of Japan would like to take this opportunity once again to extend its sincere apologies and remorse to all those, irrespective of place of origin, who suffered immeasurable pain and incurable physical and psychological wounds as ‘comfort women’.”¹²⁷

(Comfort stations dioperasikan sebagai respon atas permintaan dari otoritas militer pada saat itu. Militer Jepang pada saat itu, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam pembentukan dan manajemen comfort stations dan pemindahan ianfu. Rekrutmen ianfu dilakukan terutama oleh perekrut swasta yang bertindak untuk merespon permintaan militer. Penyelidikan pemerintah telah mengungkap bahwa dalam banyak kasus mereka (ianfu) direkrut bertentangan dengan kehendak mereka, dengan cara dibujuk, dipaksa, dan lain-lain, dan pada saat itu personel militer secara langsung mengambil bagian dalam perekrutan Pemerintah Jepang ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk memperpanjang permintaan maaf yang tulus dan penyesalan untuk semua orang, terlepas dari tempat asal, yang menderita sakit yang tak terukur serta luka fisik dan psikologis yang tidak dapat disembuhkan sebagai ‘wanita penghibur’.)

Dalam pernyataannya tersebut, Kono mengakui bahwa militer Jepang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pembentukan dan manajemen *comfort stations*, serta perekrutan *ianfu*. Perekrutan itu dilakukan oleh militer atau oleh pihak swasta atas permintaan pihak militer. Kono atas nama Pemerintah Jepang kemudian meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap wanita-wanita yang dipaksa menjadi *ianfu*.

Setelah adanya penemuan-penemuan mengenai *comfort system*, pemerintah Jepang berinisiatif untuk memberikan kompensasi kepada mantan *ianfu* yang masih hidup melalui sebuah lembaga pendanaan. Lembaga tersebut didirikan sebagai bentuk tindak lanjut dari pernyataan PM Tomiichi Murayama pada 31 Agustus 1994 untuk menyambut 50 tahun berakhirnya perang di tahun

¹²⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1993. *Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on The Result of The Study on The Issue of "Comfort Women".* (www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html)

depan. Murayama yakin bahwa salah satu cara menunjukkan penyesalan dan permintaan maaf adalah dengan mempromosikan sikap saling pengertian antar negara yang bersangkutan, berani menghadapi masa lalu, dan mengakui kesalahan di masa lalu. Ia juga mengajak masyarakat Jepang untuk berpartisipasi mempromosikan inisiatif tersebut.¹²⁸

Menindaklanjuti pernyataan Murayama, koalisi partai berkuasa yang terdiri *Liberal Democratic Party* (LDP), *Socialist Party*, dan *New Party Sakigake* dan anggota pemerintah kemudian membahas tindakan yang perlu dilakukan terkait isu *ianfu*. Pada awalnya, terdapat terdapat perbedaan pandangan antara anggota pemerintah dan koalisi partai yang berkuasa. Pemerintah Jepang berpendapat bahwa¹²⁹ :

- (1) Jepang tunduk pada kekebalan berdaulat (*sovereign immunity*),
- (2) Jepang telah menyelesaikan kompensasi kejahatan perang dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 dan perjanjian bilateral lainnya dengan negara-negara yang bersangkutan,
- (3) Klaim korban individu tidak diijinkan menurut hukum internasional karena klaim tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemerintah-ke-pemerintah; dan
- (4) Jepang tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengkompensasi korban karena berakhirnya undang-undang keterbatasan 20 tahun.

Karena 4 faktor tersebut, pemerintah menganggap Jepang tidak perlu memberikan kompensasi kepada masing-masing individu korban perang. Namun, pendapat pemerintah Jepang tidak sepenuhnya benar. Dalam Perjanjian San Francisco memang dibahas mengenai klaim reparasi atau ganti rugi perang, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Perjanjian San Francisco.¹³⁰ Dalam Pasal 14 (ayat) 1 disebutkan :

¹²⁸ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1994. *Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the “Peace, Friendship, and Exchange Initiative”*. (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/announce/press/pm/murayama/state9408.html> pada 10 Oktober 2016)

¹²⁹ Memory & Reconciliation in the Asia-Pacific. (tanpa tahun). *Issues: Comfort Women*. (Diakses dari <https://www.gwu.edu/~memory/issues/comfortwomen/> pada 15 Oktober 2016)

¹³⁰ Versi lengkap Perjanjian San Francisco dapat dilihat dalam Lampiran 3 skripsi ini.

“It is recognized that Japan should pay reparations to the Allied Powers for the damage and suffering caused by it during the war. Nevertheless it is also recognized that the resources of Japan are not presently sufficient, if it is to maintain a viable economy, to make complete reparation for all such damage and suffering and at the same time meet its other obligations. Therefore, Japan will promptly enter into negotiations with Allied Powers so desiring, whose present territories were occupied by Japanese forces and damaged by Japan, with a view to assisting to compensate those countries for the cost of repairing the damage done, by making available the services of the Japanese people in production, salvaging and other work for the Allied Powers in question. Such arrangements shall avoid the imposition of additional liabilities on other Allied Powers, and, where the manufacturing of raw materials is called for, they shall be supplied by the Allied Powers in question, so as not to throw any foreign exchange burden upon Japan.”¹³¹

(Diakui bahwa Jepang harus membayar reparasi pada Sekutu atas kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh Jepang selama perang. Namun juga diakui bahwa sumber daya Jepang saat ini tidak mencukupi jika digunakan untuk mempertahankan ekonomi yang layak, memenuhi reparasi atas segala kerusakan dan penderitaan serta pada saat yang sama memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Oleh karena itu, Jepang akan segera melakukan negosiasi dengan Sekutu sehingga keinginan dari teritori yang diduduki oleh pasukan Jepang dan rusak karena Jepang, dengan maksud untuk membantu membayar kompensasi pada negara-negara tersebut untuk membiayai kerusakan yang dilakukan, dengan menyediakan layanan bagi orang Jepang dalam produksi, menyelamatkan, dan pekerjaan lain untuk Sekutu yang bersangkutan. Pengaturan tersebut akan menghindari pengenaan kewajiban tambahan pada Sekutu dan pembuatan bahan baku yang disebutkan akan dipasok oleh Sekutu, agar tidak membebankan setiap valuta asing pada Jepang.)

Kemudian, Pasal 16 menyebutkan :

“As an expression of its desire to indemnify those members of the armed forces of the Allied Powers who suffered undue hardships while prisoners of war of Japan, Japan will transfer its assets and those of its nationals in countries which were neutral during the war, or which were at war with any of the Allied Powers, or, at its option, the equivalent of such assets, to the International Committee of the Red Cross which shall liquidate such assets and distribute the resultant fund to appropriate national agencies, for the benefit of former prisoners of war and their families on such basis as it may determine to be equitable. The categories of assets described in Article 14 (a) 2(11) (ii) through (v) of the present Treaty shall be excepted from

¹³¹ United Nations. 1951. *Treaty of Peace with Japan. Signed at San Francisco, on 8 September 1951.* (Diakses dari <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20136/volume-136-i-1832-english.pdf> pada 10 November 2016)

transfer, as well as assets of Japanese natural persons not residents of Japan on the first coming into force of the Treaty. It is equally understood that the transfer provision of this Article has no application to the 19,770 shares in the Bank for International Settlements presently owned by Japanese financial institutions.”¹³²

(Sebagai bentuk keinginan untuk mengganti kerugian anggota angkatan bersenjata Sekutu yang mengalami kesulitan yang tidak semestinya selama menjadi tawanan perang di Jepang, Jepang akan mentransfer aset-aset dan orang-orang di negara yang netral selama perang, atau yang berperang dengan salah satu Sekutu, atau opsinya setara dengan aset tersebut, kepada Komite Palang Merah Internasional yang akan melikuidasi aset tersebut dan mendistribusikan dana yang dihasilkan pada lembaga nasional untuk kepentingan mantan tawanan perang dan keluarga mereka. Kategori aset dimaksud dalam Pasal 14(a) 2(11) (ii) melalui (v) dalam perjanjian ini dikecualikan dari pengalihan, serta aset orang Jepang yang tidak tinggal di Jepang pada awal berlakunya perjanjian. Hal ini dipahami bahwa ketentuan transfer pasal ini tidak memiliki penerapan atas 19.770 saham di Bank for International Settlements yang saat ini dimiliki oleh lembaga keuangan Jepang.)

Dalam kedua pasal tersebut memang disebutkan bahwa Jepang harus membayar reparasi atas kerusakan dan penderitaan yang disebabkannya selama Perang Dunia II. Namun, klaim reparasi yang dimaksud adalah ditujukan untuk negara-negara Sekutu dan anggota militer Sekutu yang dijadikan tawanan perang oleh Jepang, tidak mencakup klaim reparasi individu untuk mantan *ianfu* atas tindakan militer Jepang yang tidak berperikemanusiaan. Dalam kesepakatan tersebut juga tidak ada hal-hal yang menyangkut kekerasan terhadap hak individu dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Atas dasar hal ini, Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) dan Pelapor Khusus Komisi PBB untuk HAM dan Kekerasan terhadap Perempuan, Dr. Radhika Coomaraswamy, kemudian menyimpulkan bahwa pemerintah Jepang masih harus bertanggungjawab atas kekejaman yang dilakukannya kepada para *ianfu*.¹³³

Pemikiran bahwa pemerintah Jepang tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengkompensasi korban karena berakhirnya undang-undang pembatasan (*statute of limitations*) 20 tahun juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini diungkapkan

¹³² *ibid.*

¹³³ UN Economic and Social Council. 1996. *Report on the Mission to the Democratic People's Republic of Korea, the Republic of Korea, and Japan on the Issue of Military Sexual Slavery in Wartime.* (Diakses dari www.awf.or.jp/pdf/h0004.pdf pada 20 Desember 2016)

oleh Jinyang Koh, seorang peneliti di Universitas Hongik, Korea Selatan. Undang-undang pembatasan adalah hukum yang mengatakan berapa lama sebuah kasus dapat diajukan ke pengadilan setelah kasus tersebut selesai terjadi. Jika undang-undang pembatasan telah habis, maka kasus tidak dapat dimulai di pengadilan. Periode undang-undang pembatasan untuk mengajukan gugatan di pengadilan Jepang adalah 20 tahun. Sedangkan *ianfu* mengajukan gugatannya pada tahun 1991, 46 tahun setelah kasus *ianfu* selesai terjadi. Oleh karena itu, pemerintah menganggap gugatan *ianfu* tidak berlaku. Pada umumnya, klaim pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seharusnya tidak diberlakukan undang-undang pembatasan. Seperti yang dilakukan oleh Jerman yang mencabut pembatasan resolusi mengenai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Majelis Umum PBB juga telah mengadopsi Konvensi tentang Non-Berlakunya Undang-undang Pembatasan untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan pada tahun 1968. Dalam resolusi itu, Majelis Umum PBB menegaskan bahwa tidak ada batasan hukum yang berlaku mengenai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus *ianfu*, militer Jepang telah berulang kali melakukan kekerasan terhadap para *ianfu*, di mana kekerasan ini termasuk dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Atas dasar ini, Koh mengatakan bahwa undang-undang pembatasan seharusnya tidak berlaku terhadap tuntutan *ianfu*.¹³⁴ Terlepas dari tindakan umum dan konvensi Majelis Umum PBB, nyatanya kasus *ianfu* direspon oleh pengadilan dan pemerintah Jepang pada tahun 1991.

Bertentangan dengan pendapat pemerintah, anggota koalisi partai berkuasa bersikukuh bahwa Jepang harus memberikan kompensasi kepada individu-individu. Perbedaan posisi tersebut akhirnya mereda dengan dikeluarkannya Laporan Pertama tentang Isu Wanita Penghibur Masa Perang pada 7 Desember 1994. Laporan tersebut berisikan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah terkait *comfort system*, permohonan maaf dari pemerintah, pembentukan sebuah lembaga pendanaan yang bertujuan untuk memberikan

¹³⁴ Jinyang Koh. 2001. *Comfort Women: Human Rights of Women from Then to Present*. The Hongik University.

kompensasi kepada mantan *ianfu*, dan ajakan kepada masyarakat Jepang untuk berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah tersebut.¹³⁵ Setelah laporan tersebut dirilis, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengakui tanggung jawab moral terhadap isu *ianfu* dan membentuk sebuah lembaga pendanaan yang bekerja sama dengan masyarakat Jepang. Pemerintah mengajak masyarakat turut berpartisipasi karena Jepang adalah sebuah bangsa di mana setiap warga juga memikul warisan masa lalu, hidup di masa sekarang, dan menciptakan masa depan. Oleh karena itu, menebus kesalahan masa lalu merupakan tanggung jawab bersama generasi sekarang yang berhutang kepada para korban, komunitas internasional, dan generasi mendatang.

Sebagai langkah awal, pemerintah menyediakan anggaran sebesar 480 juta yen untuk mensubsidi pembentukan lembaga pendanaan tersebut. Kemudian pada 19 Juli 1995, koalisi partai berkuasa dan pemerintah resmi membentuk sebuah lembaga pendanaan yang bernama *Josei no Tameno Ajia Heiwa Yuko Kikin* atau *Asian Peace and Friendship Foundation for Women* dalam Bahasa Inggris (disingkat sebagai *Asian Women's Fund* atau AWF). Pembentukan AWF ini sebenarnya tidak hanya diprakarsai oleh koalisi partai berkuasa, tetapi juga disebabkan oleh adanya tekanan dari masyarakat internasional yang menuntut Jepang bertanggung jawab. Tekanan tersebut akhirnya ‘memaksa’ pemerintah Tokyo untuk bersedia memberikan kompensasi kepada para mantan *ianfu*.¹³⁶ Adapun tugas pemerintah dan AWF adalah sebagai berikut¹³⁷ :

- (1) mengumpulkan dana dari sektor swasta sebagai kompensasi kepada mantan *ianfu*,
- (2) mendukung pihak-pihak yang melakukan proyek-proyek kesehatan, kesejahteraan, dan proyek sejenis lain yang melayani mantan *ianfu* melalui penggunaan dana pemerintah dan dana lainnya,

¹³⁵ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Documents of Japanese Government and the AWF*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e6/statement-05.html> pada 10 Oktober 2016)

¹³⁶ Bang-Soon L. Yoon. *op.cit.*, hal. 33.

¹³⁷ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Establishment of the AW Fund, and the Basic Nature of Its Projects*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e2/foundation.html> pada 10 Oktober 2016)

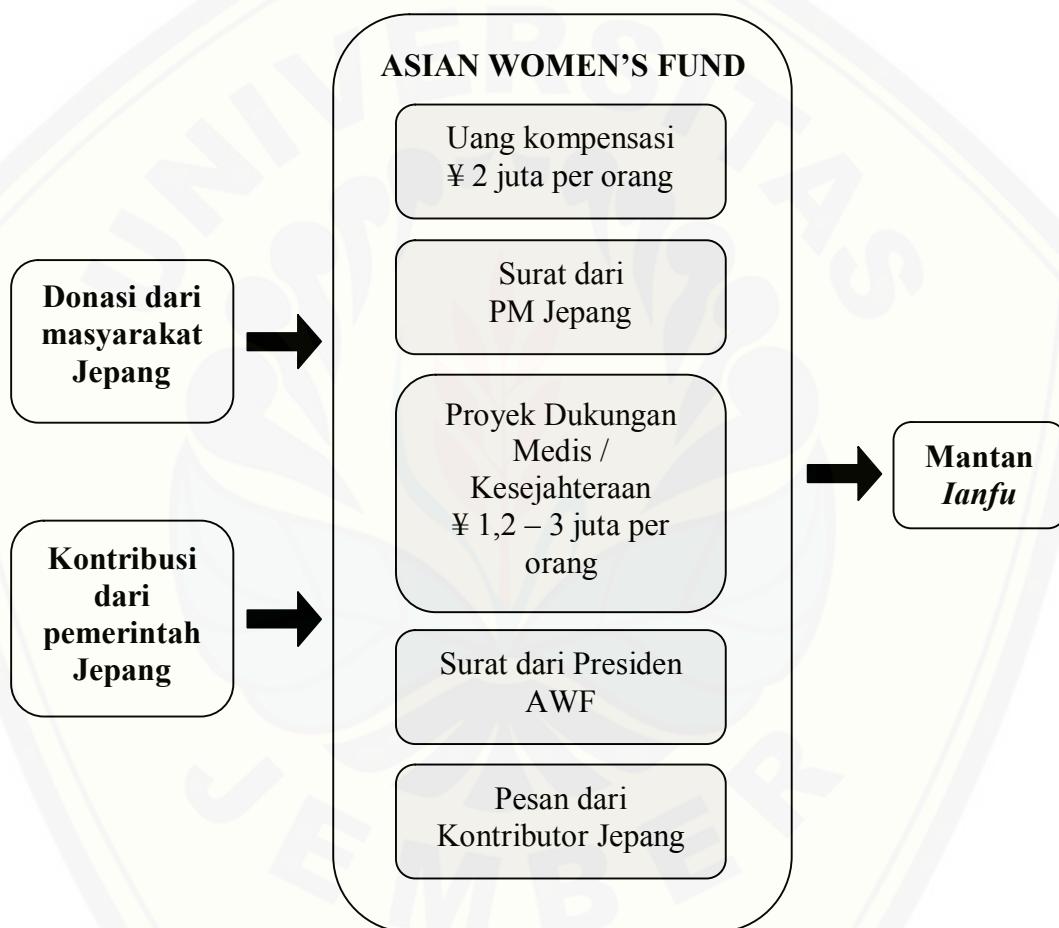
- (3) menyatakan permohonan maaf dan penyesalan yang tulus atas nama bangsa Jepang kepada mantan *ianfu*, dan
- (4) menyusun dokumen tentang *ianfu* sebagai sebuah pelajaran sejarah agar *comfort system* tidak ada lagi.

AWF kemudian melakukan diskusi untuk menyusun kerangka kerja dalam proyeknya. Diskusi tersebut dilakukan berdasarkan hasil laporan Dr. Radhika Coomaraswamy, Pelapor Khusus Komisi PBB untuk HAM dan Kekerasan terhadap Perempuan, yang melaporkan investigasi tentang isu *ianfu* di Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Dalam laporan yang ia terbitkan pada 4 Januari 1996, ia menyebut *ianfu* sebagai budak seks militer dan menegaskan bahwa pemerintah Jepang harus menerima tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran hukum internasional. Ia menulis bahwa pemerintah Jepang telah menerima tanggung jawab moral terhadap keberadaan *ianfu* dan AWF merupakan bentuk ekspresi dari kedulian moral pemerintah Jepang terhadap nasib *ianfu*. Namun, ia menyebutkan bahwa hal tersebut tidak membebaskan pemerintah Jepang dari klaim hukum *ianfu* di bawah hukum internasional. Sebagai tambahannya, Coomaraswamy menyerukan pemerintah Jepang untuk menerima tanggung jawab hukum, membayar kompensasi, mengungkap dokumen-dokumen tentang *comfort station*, mengeluarkan permohonan maaf, meningkatkan kesadaran tentang *ianfu* melalui kurikulum pendidikan, dan menghukum para pelaku.

Diskusi yang dilakukan oleh AWF tersebut menghasilkan kerangka kerja yang terdiri dari tiga elemen. Pertama, surat dari PM Jepang (Ryutaro Hashimoto dan pendahulunya yang turut menandatangani surat tersebut, yaitu Keizo Obuchi, Yoshiro Mori, dan Junichiro Koizumi) yang ditujukan kepada mantan *ianfu*. Melalui surat tersebut, pemerintah Jepang menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan bagi para mantan *ianfu* serta mengakui tanggung jawab moral. Surat tersebut disampaikan kepada mantan *ianfu* bersamaan dengan surat dari Presiden AWF untuk menunjukkan posisi Jepang terkait isu *ianfu*. Kedua, penyediaan uang kompensasi bagi mantan *ianfu* yang berasal dari donasi masyarakat Jepang. Ketiga, proyek dukungan medis dan kesejahteraan yang bertujuan untuk

memenuhi tanggung jawab moral. Pemerintah Jepang menyediakan dana sekitar 830 juta yen untuk perawatan medis dan kesejahteraan mantan *ianfu*.¹³⁸

Setahun setelah didirikan, AWF telah menerima donasi hingga lebih dari 400 juta yen dari masyarakat Jepang. Uang tersebut kemudian akan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada mantan *ianfu* yang masih hidup di Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Belanda, dan Indonesia di mana setiap orang mendapatkan kompensasi sebesar 2 juta yen.



Bagan 3.1 Proyek AWF untuk mantan *ianfu*
(Sumber: Asian Women's Fund)

Dalam bagan 3.1 di atas dijelaskan mengenai proyek yang dilaksanakan oleh AWF untuk mantan *ianfu* di Korea Selatan, Indonesia, Taiwan, Filipina, dan Belanda. Dana yang diberikan AWF kepada mantan *ianfu* berasal dari donasi

¹³⁸ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Establishment of the AW Fund, and the Basic Concept of Its Projects*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e2/foundation-02.html> pada 10 Oktober 2016)

masyarakat dan pemerintah Jepang. Jumlah dana yang didapatkan adalah sebanyak lebih dari 400 juta yen dan jumlah ini terus bertambah seiring berjalannya proyek AWF. Dari jumlah tersebut, sekitar 50% digunakan sebagai kompensasi kepada mantan *ianfu* dan 50% lainnya digunakan untuk kesejahteraan atau dukungan medis bagi mantan *ianfu*. Tiap orang juga mendapatkan surat permintaan maaf dari PM Jepang, presiden AWF, dan pesan dari masyarakat Jepang yang telah menyumbangkan dana ke AWF.

Di Korea Selatan, implementasi proyek AWF berlangsung selama 5 tahun, yakni sejak 11 Januari 1997 hingga 5 Mei 2002. Namun implementasi proyek AWF di Korea Selatan tidak berjalan mulus. Sejak diadakannya dialog pra-implementasi antara Tim Dialog AWF dengan mantan *ianfu* Korea Selatan, beberapa dari mereka menolak proyek AWF dan menganggap bahwa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh AWF tidak tulus, mengingat tiap orang hanya mendapatkan 2 juta yen. Tidak hanya ditolak oleh beberapa mantan *ianfu*, proyek AWF juga mendapatkan kritik dari media Korea Selatan dan protes dari *The Korean Council*. Namun, ada 7 orang mantan *ianfu* yang bersedia menerima kompensasi.¹³⁹

Penolakan proyek AWF juga ditunjukkan melalui kampanye untuk mengumpulkan sumbangan pribadi di Korea Selatan, tujuannya adalah untuk membujuk mantan *ianfu* agar menolak implementasi proyek AWF. Sumbangan tersebut digunakan untuk menyediakan bantuan bagi para mantan *ianfu*. Penolakan-penolakan tersebut membuat AWF membekukan proyeknya sementara. Hingga pada 6 Januari 1998, AWF mengiklankan penjelasan proyeknya di empat surat kabar Korea Selatan, termasuk Hankyoreh dan Hanguk Ilbo. Beberapa hari kemudian, sekitar 4 orang mantan *ianfu* menghubungi AWF dan mengatakan bahwa mereka bersedia menerima kompensasi.¹⁴⁰

Pemerintah Korea Selatan pada awalnya menyambut baik pembentukan dan rencana proyek AWF. Namun, banyaknya kelompok aktivis Korea Selatan yang menolak AWF, membuat pemerintah Korea Selatan mengubah posisinya.

¹³⁹ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Projects by Country or Region-South Korea*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e3/korea.html> pada 10 Oktober 2016)

¹⁴⁰ *ibid.*

Mereka menolak AWF karena menurut mereka tidak seharusnya para mantan *ianfu* menerima kompensasi dari donasi privat atau masyarakat. Kelompok aktivis bersikeras bahwa masalah kejahatan perang merupakan isu yang krusial dan menyerukan pemerintah Jepang agar mengakui tanggung jawab hukum dan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Kelompok aktivis juga membawa tuntutan tersebut ke Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dan organisasi-organisasi lainnya.¹⁴¹

Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Kim Dae-jun mengatakan bahwa Seoul tidak akan menuntut kompensasi dari pemerintah Tokyo. Korea Selatan pada saat itu lebih memilih untuk menyediakan dana sebesar 31,5 juta won (sekitar 3,1 juta yen) ditambah dengan 4,18 juta won dari modal yang dikumpulkan oleh *The Korean Council* sebagai subsidi biaya hidup bagi masing-masing mantan *ianfu* yang telah bersumpah untuk menolak proyek AWF. Uang tersebut oleh pemerintah Korea Selatan diberikan kepada 142 orang, namun tidak termasuk 11 orang yang telah menerima kompensasi dari AWF. Menanggapi tindakan pemerintah Korea Selatan, pada Juni 1998 AWF mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Presiden AWF Bunbei Hara kepada Presiden Korea Selatan. Melalui surat tersebut, AWF menjelaskan bahwa uang kompensasi dari AWF dan subsidi biaya hidup dari pemerintah Korea Selatan berbeda sifatnya, serta meminta pemerintah Seoul untuk menerima kompensasi tersebut. Akan tetapi, posisi pemerintah Korea Selatan tidak berubah.¹⁴²

Menyadari tidak ada perubahan dalam proyeknya, AWF memutuskan untuk menghentikan proyek penebusan di Korea Selatan pada awal tahun 1999 dan mengubah tujuan proyek menjadi perawatan medis. AWF kemudian mulai bernegosiasi dengan pihak Korea. Namun pada akhirnya AWF tidak bisa bekerjasama dengan pihak Korea meskipun dengan tujuan proyek yang baru. Hasilnya, pada Juli 1999 AWF menyerah melanjutkan proyek barunya dan menangguhkan proyeknya di Korea Selatan. Penangguhan itu terus berlanjut hingga proyek AWF di negeri ginseng diakhiri pada 1 Mei 2002. Upaya dan

¹⁴¹ *ibid.*

¹⁴² *ibid.*

proyek AWF di Korea Selatan berakhir tanpa memperoleh pemahaman penuh dari kelompok aktivis atau pemerintah di sana.¹⁴³ Hasil tersebut berbeda dengan proyek AWF di Filipina, Belanda, dan Indonesia yang dapat dikatakan berjalan sukses dan mendapatkan pemahaman dari mantan *ianfu* maupun pemerintah. AWF kemudian dibubarkan pada 31 Maret 2007, setelah menyelesaikan proyek terakhirnya di Indonesia.¹⁴⁴

Tiga puluh hari sebelum AWF dibubarkan, perdana menteri Jepang pada saat itu, Shinzo Abe membuat pernyataan yang bertentangan dengan *Kono Statement*, di mana pernyataan Kono mengakui bahwa para gadis dipaksa menjadi *ianfu* oleh militer Jepang. Abe mengatakan, “Tidak ada bukti bahwa mereka (*ianfu*) dipaksa.”¹⁴⁵ Para politisi nasionalis Jepang mendukung pernyataan Abe tersebut. Mereka mengatakan bahwa *ianfu* adalah pekerja seks komersial profesional dan tidak dipaksa melayani seks militer Jepang. Pernyataan Abe tersebut membuat emosi dua negara tetangganya, Korea Selatan dan China, yang menuding Jepang gagal menebus kesalahannya pada masa Perang Dunia II. Pernyataan kontroversial tersebut juga mendapatkan kritik dari negara sahabatnya, Amerika Serikat.¹⁴⁶

Antara tahun 2007 hingga 2011, isu *ianfu* sedikit mereda di antara kedua negara. Namun, isu tersebut kembali menjadi isu diplomatik kedua negara sejak Agustus 2011 ketika Pengadilan Konstitusional Korea Selatan mengeluarkan putusan yang menyatakan, “Tidak konstitusional bagi pemerintah Korea Selatan jika tidak mencari kompensasi bagi mantan ‘wanita penghibur’”.¹⁴⁷ Menghadapi banyaknya tekanan di Korea Selatan, akhirnya Presiden Lee Myung-bak pada akhir tahun 2011 mengadakan pertemuan dengan PM Jepang Yoshihiko Noda untuk menyelesaikan isu tersebut. Pertemuan itu menghasilkan kerangka kerja

¹⁴³ *ibid.*

¹⁴⁴ Asian Women’s Fund. (tanpa tahun). *Closing of the Asian Women’s Fund*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e3/dissolution.html> pada 10 Oktober 2016)

¹⁴⁵ Colin Joyce. 2007. *Japanese PM Denies Wartime ‘Comfort Women’ were Forced*. (Diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1544471/Japanese-PM-denies-wartime-comfort-women-were-forced.html> pada 11 Oktober 2016)

¹⁴⁶ GovTrack. 2007. H.Res. 121 (110th). (Diakses dari <https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hres121/text> pada 11 Oktober 2016)

¹⁴⁷ Tsutomu Nishioka. *op.cit.*

resolusi yang diusulkan oleh Kenichiro Sasae, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang. Proposal Sasae berisi 3 poin, yaitu PM Jepang akan meminta maaf kepada para mantan *ianfu*, duta besar Jepang untuk Korea Selatan akan menyampaikan permintaan maaf tersebut atas nama perdana menteri, dan pemerintah Jepang akan membiayai program bantuan kemanusiaan di Korea Selatan.¹⁴⁸

Proposal Sasae ditolak oleh pemerintah Korea Selatan pada Maret 2012 karena menganggap proposal tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan isu *ianfu*.¹⁴⁹ Setelah awalnya menolak Proposal Sasae, Seoul meminta Tokyo untuk melanjutkan negosiasinya pada bulan Oktober. Kedua negara sedang dalam proses negosiasi untuk surat pernyataan maaf dari perdana menteri Jepang ketika popularitas PM Noda turun drastis¹⁵⁰ sehingga memaksanya untuk mengadakan pemilihan di Majelis Rendah. Apabila pemilu tidak terjadi pada saat itu, mungkin PM Noda dan Presiden Lee telah mencapai kesepakatan akhir mengenai isu *ianfu* pada November 2012. Pemilu tersebut membawa Shinzo Abe kembali berkuasa sebagai perdana menteri yang menggantikan Yoshihiko Noda.

Bagi Shinzo Abe sendiri, Jepang dan dunia seharusnya lebih berpandangan ke depan daripada mengungkit masa lalu dan sejarah. Abe menganggap isu *ianfu* telah selesai pada saat Jepang dan Korea Selatan sepakat menjalin kerjasama bilateral dan memperbaiki hubungan diplomatiknya pada 22 Juni 1965. Melalui *The 1965 Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea* bersama dengan Perjanjian antara Jepang dan Korea Selatan mengenai Penyelesaian Masalah Properti, Klaim, dan Kerjasama Ekonomi, pemerintah Jepang menyediakan dana sebesar 800 juta US dolar untuk Korea Selatan. Tiga ratus juta dolar diberikan untuk bantuan ekonomi melalui produk

¹⁴⁸ Mina Pollmann. 2015. ‘Comfort Women’ Issue Dominates Rare Japan – Korea Bilateral Talks. (Diakses dari <http://www.thediplomat.com/2015/11/comfort-women-issue-dominates-rare-japan-korea-bilateral-talks/> pada 15 Oktober 2016)

¹⁴⁹ Korea Joongang Daily. 2015. *Comforting the Comfort Women: the Tale So Far.* (Diakses dari <http://koreajoongangdailyjoins.com/news/article/Article.aspx?aid=3010963> 15 Oktober 2016)

¹⁵⁰ Popularitas Yoshihiko Noda sebagai perdana menteri turun drastis karena kebijakan peningkatan pajak penjualan dan penanganan Fukushima pasca tsunami dan bencana nuklir 2011.

dan layanan, pinjaman sebesar 200 juta dolar dengan produk dan layanan selama 10 tahun, serta pinjaman untuk kepercayaan pribadi sebesar 300 juta dolar.¹⁵¹

Pasal 2 ayat (1) Perjanjian antara Jepang dan Korea Selatan mengenai Penyelesaian Masalah Properti, Klaim, dan Kerjasama Ekonomi¹⁵² menyebutkan bahwa:

“The Contracting Parties confirm that [the] problem concerning property, rights and interests of the two Contracting Parties and their nationals (including juridical persons) and concerning claims between the Contracting Parties and their nationals, including those provided for in Article IV, paragraph (a) of the Treaty of Peace with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951, is settled completely and finally.”¹⁵³

(Pihak-pihak mengkonfirmasi bahwa masalah mengenai properti, hak dan kepentingan kedua pihak dan warga negara mereka (termasuk badan hukum) dan mengenai klaim antara pihak dan warga negaranya, termasuk yang diatur dalam Pasal IV, ayat (a) dalam Perjanjian Perdamaian dengan Jepang yang ditandatangani di San Francisco (San Francisco Peace Treaty) pada tanggal 8 September 1951, diselesaikan sepenuhnya.)

Dalam pasal perjanjian tersebut memang disebutkan bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan klaim antara kedua negara maupun rakyatnya telah terselesaikan. Akan tetapi, menurut ICJ, perjanjian tersebut tidak mencakup klaim individu berdasarkan kerusakan yang diderita dan juga tidak menyebutkan secara spesifik bahwa dana yang diberikan oleh Jepang pada pemerintah Korea Selatan digunakan sebagai kompensasi kepada mantan *ianfu*,¹⁵⁴ sehingga pemerintah Jepang belum memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan kompensasi kepada para mantan *ianfu*.

Selain anggapan bahwa kompensasi terhadap *ianfu* telah diberikan, Abe juga memiliki pandangan revisionis terhadap sejarah Jepang. Di awal masa

¹⁵¹ Miki Y. Ishikida. 2005. *Toward Peace: War Responsibility, Postwar Compensation, and Peace Movements and Education in Japan*. Bloomington: iUniverse. Hal. 21.

¹⁵² Versi lengkap Perjanjian antara Jepang dan Korea Selatan mengenai Penyelesaian Masalah Properti, Klaim, dan Kerjasama Ekonomi dapat dilihat dalam Lampiran 4 skripsi ini.

¹⁵³ United Nations. 1966. *Japan and Republic of Korea: Agreement on the Settlement of Problems Concerning Property and Claims and on Economic Co-operation*. (Diakses dari <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20583/volume-583-I-8473-English.pdf> pada 10 November 2016)

¹⁵⁴ UN Economic and Social Council, *op.cit*.

jabatannya pada tahun 2007, Abe sempat akan merevisi *Kono Statement* dengan menyangkal adanya pemaksaan yang dilakukan oleh militer terhadap *ianfu*. Partai yang dipimpin oleh Abe, *Liberal Democratic Party* (LDP), membentuk sebuah komite untuk merevisi *Kono Statement*. Komite tersebut mengeluarkan sebuah draft proposal yang berisi¹⁵⁵ :

- (1) Penambahan dua kalimat dalam *Kono Statement*, yaitu “meskipun mungkin terdapat perekrutan secara paksa kepada para wanita yang bertentangan dengan keinginannya, yang dilakukan oleh pihak [swasta], namun tidak ada pemaksaan terhadap wanita yang dilakukan oleh militer atau otoritas lainnya” dan “dasar [permintaan maaf dalam *Kono Statement* kepada *ianfu*] hanyalah investigasi melalui pernyataan mantan *ianfu*; tidak ada bukti dokumentasi yang ditemukan”.
- (2) Usulan dihilangkannya kata “militer” dalam istilah “wanita penghibur militer” dalam *Kono Statement*.

Pada intinya, proposal tersebut berusaha meminimalisir keterlibatan militer dan pemaksaan yang dilakukannya terhadap para *ianfu* dalam *comfort system* dengan mengatakan bahwa investigasi yang dinyatakan dalam *Kono Statement* hanyalah kesaksian lisan mantan *ianfu*, tidak ada bukti dokumen yang ditemukan. Proposal tersebut didukung oleh Abe dengan mengatakan, “Tidak ada bukti bahwa mereka (*ianfu*) dipaksa.” Hal ini bertentangan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1993. Dalam penyelidikan tersebut, ditemukan fakta bahwa anggota militer memang melakukan pemaksaan dan intimidasi kepada para *ianfu*.

Sementara itu, menurut pemerintahan Park Geun-hye, isu *ianfu* belum terselesaikan karena Jepang belum memberikan kompensasi resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, Park ingin Abe segera menyelesaiakannya agar para mantan *ianfu* mendapatkan keadilan dan haknya dari pemerintah Jepang. Park menuntut pemerintah Jepang untuk membuat sebuah rencana yang dapat diterima

¹⁵⁵ Larry Niksch. 2007. *Japanese Military's "Comfort Women" System*. (Diakses dari http://www.global-alliance.net/CW-Documents/040307_CRS_Comfort-Women.pdf pada 15 Oktober 2016)

oleh mantan *ianfu* Korea Selatan untuk menyembuhkan luka fisik maupun psikologis akibat penderitaan yang mereka alami selama menjadi *ianfu*.¹⁵⁶

Perbedaan persepsi antara kedua pemimpin tersebut membuat hubungan diplomatik kedua negara terganggu dan mengalami kebekuan diplomasi antar pemimpin. Rencana Abe merevisi *Kono Statement* dan keengganannya untuk menyelesaikan isu *ianfu* membuat Park tidak bersedia bertemu secara bilateral dengan Abe sejak ia menjabat sebagai presiden Korea Selatan pada Februari 2013. Sikap Park ini mencerminkan ketegasannya dalam menghadapi isu *ianfu*. Berbeda dengan sikap pemimpin-pemimpin Korea Selatan sebelumnya yang terkesan lunak dalam menghadapi isu *ianfu*. Ketegasan Park tersebut membuat hubungan politik kedua negara berada dalam titik terendahnya.

Hubungan politik yang memburuk antara Jepang dan Korea Selatan tersebut berdampak pada hubungan ekonomi kedua negara. Namun hal ini bukanlah satu-satunya faktor. Terdapat faktor lain yang turut membuat hubungan ekonomi kedua negara menurun, yaitu perubahan lingkungan politik di sekitar Jepang dan Korea Selatan, seperti pemerintah Korea Selatan yang cenderung memfokuskan politik luar negerinya ke China sebagai respon atas meningkatnya kepentingan dalam bidang keamanan dan ekonomi serta meningkatnya nilai mata uang won dan menurunnya yen.¹⁵⁷ Ketiga faktor ini berdampak pada hubungan ekonomi kedua negara, yang ditandai oleh turunnya nilai perdagangan kedua negara. Antara tahun 2013 hingga 2015, nilai keseluruhan ekspor Korea Selatan ke Jepang menurun sebanyak 26%, dari 34,6 miliar dolar menjadi 25,6 miliar dolar. Ekspor Jepang ke Korea Selatan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2013, total ekspor mencapai 58 miliar dolar turun 21% pada 2 tahun kemudian menjadi 45,8 miliar dolar.¹⁵⁸ Data ini menunjukkan bahwa ketegangan politik

¹⁵⁶ Mina Pollmann. 2015. ‘Comfort Women’ Issue Dominates Rare Japan – Korea Bilateral Talks. (Diakses dari <http://www.thediplomat.com/2015/11/comfort-women-issue-dominates-rare-japan-korea-bilateral-talks/> pada 23 Oktober 2016)

¹⁵⁷ Hidehiko Mukoyama. 2014. “The Impact of a Shaky Japan-South Korea Relationship on Economic Relations —What Should Japan and South Korea Do Now?—”. *Pacific Business and Industries Vol. XIV, 2014 No. 51*.

¹⁵⁸ Diolah dari berbagai sumber, yaitu : (1) Global Edge. 2015. *South Korea: Trade Statistics*. (Diakses dari <http://globaledge.msu.edu/countries/south-korea/tradestats> pada 3 Desember 2016), (2) The Observatory of Economic Complexity. 2013. *What does Japan Export to South Korea?*

antara kedua negara, termasuk salah satunya disebabkan oleh isu *ianfu*, berdampak secara signifikan terhadap hubungan ekonomi kedua negara.

Isu *ianfu* juga berdampak pada hubungan Jepang dan Korea Selatan di bidang militer dan keamanan. Karena itu dan beberapa isu historis lainnya, Korea Selatan menolak menandatangani *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) pada tahun 2012, sebuah perjanjian yang akan memberikan kerangka hukum bagi Seoul dan Tokyo untuk berbagi informasi militer rahasia tentang program nuklir dan rudal Korea Utara serta meningkatnya militer China.¹⁵⁹ Penolakan itu disebabkan karena adanya oposisi publik Korea Selatan yang masih sensitif jika berkaitan dengan militer Jepang akibat kekejaman militer Jepang ketika menjajah Korea Selatan, termasuk kepada para *ianfu*. Akibatnya, Jepang dan Korea Selatan tidak memiliki kerjasama bilateral di bidang militer. Ditambah dengan bekunya diplomasi tingkat tinggi antara Abe dan Park karena isu *ianfu*, berdampak pula pada tidak adanya pembicaraan tingkat tinggi mengenai kerjasama militer antara kedua negara hingga tahun 2015. Padahal kerjasama militer semacam GSOMIA sangat penting bagi kedua negara mengingat keduanya sama-sama menghadapi ancaman senjata nuklir Korea Utara dan sama-sama memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Timur.

Sensitivitas masyarakat Korea Selatan dan anggapan bahwa pemerintah Jepang tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan isu historis adalah alasan mengapa kedua negara gagal bekerjasama dalam bidang militer. Berbeda dengan negara-negara lainnya yang juga pernah mengalami kolonialisasi atau konflik di masa lalu, namun memiliki kerjasama militer yang kuat. Amerika Serikat dan Inggris setelah periode kolonial dan perang di abad ke-18 dan 19, atau Perancis

(2013). (Diakses dari http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/jpn/kor/show/2013/ pada 3 Desember 2016), dan (3) The Observatory of Economic Complexity. 2013. *What does South Korea Export to Japan?* (2013). (Diakses dari http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/kor/jpn/show/2013/ pada 3 Desember 2016).

¹⁵⁹ Seongho Sheen dan Jina Kim. 2012. "What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact?". *Asia Pacific Buletin Number 176.* (Diakses dari <http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb176.pdf> pada 26 Oktober 2016)

dan Jerman setelah dua perang dunia, merupakan beberapa contoh negara-negara yang meninggalkan konflik historis mereka dan menunjukkan kerjasama militer yang signifikan.¹⁶⁰ Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa Jepang dan Korea Selatan tidak melakukan hal yang sama seperti Amerika Serikat dan Inggris atau Perancis dan Jerman. Ini disebabkan karena terdapat perbedaan antara pemikiran Jepang dan Korea Selatan jika dibandingkan dengan negara-negara Barat mengenai sejarah dan masa lalu.

Masyarakat Jepang dan Korea Selatan, dan mungkin beberapa negara lainnya di Asia, sangat menghormati nenek moyang atau pendahulu mereka. Masyarakat Korea Selatan juga memiliki konsep *collective memory* (ingatan kolektif) mengenai kolonialisasi. Mereka menganggap kolonialisasi dan perang sebagai kesalahan politik yang memiliki karakteristik struktural yang telah melanggar batas-batas sosial dan membuat pendahulu mereka menderita. Ingatan kolektif tersebut berasal dari masa lalu, tertanam di setiap generasi, dan tidak dapat berubah secara fundamental dengan mudah.¹⁶¹ Dengan kata lain, sulit untuk merubah pola pikir atau ingatan kolektif orang-orang Korea Selatan tentang kolonialisasi Jepang di negara mereka selama 35 tahun. Oleh karena itu, banyak masyarakat Korea Selatan yang masih belum bisa meninggalkan masa lalu dan memiliki sensitivitas terhadap Jepang hingga kini sehingga Korea Selatan terus menuntut Jepang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di masa kolonialisasi.

Namun, nampaknya kerjasama ekonomi dan keamanan Jepang dan Korea Selatan akan segera membaik seiring dengan pulihnya hubungan politik dan diplomatik kedua negara setelah tercapainya kesepakatan mengenai isu *ianfu*. Setelah melakukan beberapa kali pembicaraan di level kementerian sejak April 2014, pada 28 Desember 2015 pemerintah Jepang dan Korea Selatan akhirnya

¹⁶⁰ Peter Murphy. 2016. *The Limit of the Japan-South Korea Military Relationship*. (Diakses dari <http://www.thediplomat.com/2016/09/the-limits-of-the-japan-south-korea-military-relationship/> pada 10 Desember 2016)

¹⁶¹ Roman David. 2015. “The Past or The Politics of The Present? Dealing with The Japanese Occupation of South Korea”. *Contemporary Politics Journal Vol. 2, 2016*.

sepakat untuk menyelesaikan isu *ianfu*. Kesepakatan ini memecahkan dinding yang selama 2,5 tahun terakhir menghalangi hubungan politik Tokyo dan Seoul.

Dalam bab 3 ini telah dibahas mengenai hubungan Jepang dan Korea Selatan, respon pemerintah Jepang terhadap isu *ianfu*, serta pengaruh isu *ianfu* dalam hubungan kedua negara. Apabila disimak kembali, hubungan kedua negara memang telah sering mengalami fluktuasi sejak berakhirnya kolonialisasi Jepang di Korea dan bahkan ketika kedua negara telah menandatangani perjanjian diplomatik. Fluktuasi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, misalnya larangan masuknya kebudayaan Jepang ke Korea Selatan, kunjungan pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni, sengketa teritorial di Kepulauan Dokdo/Takeshima, dan isu historis seperti isu *ianfu*.

Hubungan kedua negara berada di titik terendahnya ketika Shinzo Abe menjabat sebagai perdana menteri Jepang pada Desember 2012 dan Park Geun-hye menjabat sebagai presiden Korea Selatan pada Februari 2013. Penyebabnya adalah isu *ianfu*. Park menganggap Abe tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan isu tersebut sehingga Park tidak bersedia mengadakan pertemuan bilateral dengan Abe kecuali jika Jepang memiliki niatan untuk menyelesaikan isu sensitif tersebut. Hubungan politik yang rendah di antara kedua pemimpin tersebut menyebabkan penurunan hubungan ekonomi dan nihilnya kerjasama militer antara Tokyo dan Seoul. Meskipun isu *ianfu* bukanlah satu-satunya isu yang mempengaruhi hubungan kedua negara, namun isu ini merupakan isu krusial dan paling sensitif yang membuat hubungan kedua negara memburuk pada masa pemerintahan Abe dan Park. Oleh karena itu, isu *ianfu* adalah isu yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar kedua negara dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan diplomatiknya.

Penyelesaian dan implementasi kesepakatan mengenai isu *ianfu* memerlukan upaya dari kedua belah pihak. Pemerintah Jepang harus benar-benar berupaya untuk menyelesaikan dan mengimplementasikan kesepakatan mengenai isu *ianfu*, serta pemerintah Korea Selatan harus mendukung pemerintah Jepang dan berhenti mengangkat kembali isu ini setelah mencapai kesepakatan. Jika isu

ianfu telah benar-benar terselesaikan, maka hubungan kedua negara akan kembali normal dan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.



BAB 5. KESIMPULAN

Skripsi ini membahas keputusan pemerintah Jepang menyelesaikan isu *ianfu* Korea Selatan dengan cara meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada mantan *ianfu* Korea Selatan. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Jepang ini disepakati oleh Jepang dan Korea Selatan pada 28 Desember 2015. Keputusan pemerintah Jepang tersebut menjadi penting dan menarik untuk diteliti karena isu *ianfu* telah mengganggu hubungan Jepang dan Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena kedua negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai isu *ianfu*. Jepang menganggap bahwa isu ini telah selesai. Sementara Korea Selatan menganggap sebaliknya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pemerintah Jepang pada akhirnya bersedia mengungkapkan permohonan maaf sekaligus bersedia membayar ganti rugi.

Untuk menganalisa keputusan Jepang tersebut digunakan teori proses pengambilan keputusan yang digagas oleh Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin. Dalam teori ini dijelaskan bahwa untuk membuat sebuah keputusan, para pembuat keputusan atau *decision makers* mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dengan situasi yang ada. Faktor-faktor tersebut oleh Snyder dkk disebut sebagai *setting*, yaitu seperangkat kategori faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi tindakan *decision makers*. *Setting* dibagi menjadi dua, yaitu *internal setting of decision making* atau faktor-faktor dalam negeri suatu negara dan *external setting of decision making* atau faktor-faktor yang ada di luar negara tersebut, di mana dalam kedua *setting* tersebut terdapat beberapa faktor yang relevan dalam mempengaruhi keputusan suatu negara. Dalam konteks keputusan Jepang terkait isu *ianfu* Korea Selatan, aspek *internal setting* yang relevan adalah faktor *major common value orientation* dan *human environment*. Sementara itu, aspek *external setting* yang relevan adalah *non-human environment, other societies, serta societies organized as states* dan *government action*.

Dengan menggunakan teori proses pengambilan keputusan Snyder dkk, beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Faktor internal terdiri dari dua hal, yaitu pemerintah Jepang tidak ingin isu *ianfu* menjadi tanggungan generasi Jepang mendatang serta kepentingan Jepang untuk mempromosikan dan mendukung hak-hak perempuan. Sementara itu, faktor eksternalnya adalah tuntutan Korea Selatan dan masyarakat internasional, serta keinginan Jepang untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungannya dengan Korea Selatan. Pemerintah Jepang juga ingin memperbaiki citra Jepang di mata internasional dan menunjukkan bahwa Jepang adalah negara yang bertanggungjawab atas tindakannya pada Perang Dunia II.

Keputusan Jepang untuk menyelesaikan isu *ianfu* Korea Selatan juga merupakan sebuah bentuk kemajuan diplomatik kedua negara, di mana kesepakatan mengenai isu *ianfu* tersebut mengakhiri kebekuan hubungan diplomatik kedua pemimpin selama 2,5 tahun, yaitu sejak awal tahun 2013 hingga akhir 2015. Kesepakatan tersebut juga merupakan sebuah kesepakatan penting yang membuat isu *ianfu* Korea Selatan akhirnya selesai. Tindakan pemerintah Jepang dan Korea Selatan adalah sebuah langkah bagus untuk bersama-sama melupakan sejarah yang kelam dan bergerak maju untuk meningkatkan kerjasama guna mencapai kepentingan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Duus, Peter, dkk. *The Japanese Wartime Empire, 1931 – 1945*. 1996. New Jersey: Princeton University Press.
- Envall, H. D. P. 2015. *Japanese Diplomacy: The Role of Leadership*. New York: SUNY Press.
- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Hay, David. 2014. *Japan's Strategic Re-posture: Prime Minister Abe and the Implications for the Japan-US Alliance and Regional Security*. Canberra: The Centre for Defence and Strategic studies (CDSS) Australia.
- International Society for Educational Information. 1995. *Japan in Modern History: High School Vol. I*. Tokyo: International Society for Educational Information, Inc.
- Ishikida, Miki Y. 2005. *Toward Peace: War Responsibility, Postwar Compensation, and Peace Movements and Education in Japan*. Bloomington: iUniverse.
- Komnas HAM. 2013. *Pengadilan Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan: Keputusan 4 Desember 2001*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lee, Chong-sik. 1985. *Japan and Korea: The Political Dimension*. California: Hoover Institution Press.
- Li, Peter. 2009. *Japanese War Crimes: The Search for Justice*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.
- Snyder, Richard C., H. W. Bruck, dan Burton Sapin. 2002. *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*. New York: Palgrave Macmillan. Hal. 128.
- Society for the Dissemination of Historical Fact. 2014. *The Truth about Comfort Women*. Tokyo: Society for the Dissemination of Historical Fact.
- Tatsumi, Yuki. 2014. *Japan's Foreign Policy Challenges in East Asia*. Washington, DC.: The Stimson Center.
- Ward, Robert E. 1968. *Political Development in Modern Japan*. New Jersey: Princeton University Press.

Jurnal dan Paper

- Danyliva, Tatyana. 2014. "Approaching The East: Briefly on Japanese Value Orientations". *Research Revolution International Journal of Social Science & Management*.
- David, Roman. 2015. "The Past or The Politics of The Present? Dealing with The Japanese Occupation of South Korea". *Contemporary Politics Journal Vol. 2, 2016*.

- Iyenaga, Toyokichi. 1912. "Japan's Annexation of Korea". *The Journal of Race Development*, Vol. 3, No. 2.
- Kim, Hong Nack. 2014. "Japanese-South Korean Relations Under the Second Abe Government, 2012-2014". *International Journal of Korean Studies*.
- Kimura, Kan. 2015. "Discourses About Comfort Women in Japan, South Korea, and International Society". *International Relations and Diplomacy*.
- Koh, Jinyang. 2001. *Comfort Women: Human Rights of Women from Then to Present*. The Hongik University.
- Kumagai, Naoko. 2016. "The Background to the Japan – Republic of Korea Agreement: Compromises Concerning the Understanding of the Comfort Women Issue". *Asia-Pacific Review*, Vol. 23, No. 1.
- Lee, Sue R. 2003. "Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay". *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*.
- Mukoyama, Hidehiko. 2014. "The Impact of a Shaky Japan-South Korea Relationship on Economic Relations —What Should Japan and South Korea Do Now?—". *Pacific Business and Industries Vol. XIV, 2014 No. 51*.
- Nishioka, Tsutomu. 2015. *The Comfort Women Issue in Sharper Focus*. Tokyo: Japan Policy Institute.
- Norimatsu, Satoko Oka. 2015. "Reexamining the 'Comfort Women' Issue 改めて慰安婦問題の本質を問う An Interview with Yoshimi Yoshiaki". *The Asia-Pacific Journal*.
- Nuechterlein, Donald E. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". *British Journal of International Studies Vol. 2, No. 3*. Cambridge University Press.
- Orreill, Kirsten. 2008. "Who are the Ianfu (Comfort Women)?". *New Voices Vol. 2: A Journal for Emerging Scholars of Japanese Studies in Australia*. The Japan Foundation.
- Park, Cheol Hee. 2015. "Still Distant Neighbors: South Korea-Japan Relations Fifty Years After Diplomatic Normalization". *Council on Foreign Relations*.
- Yoon, Bang-Soon L. 2010. "Imperial Japan's Comfort Women from Korea: History & Politics of Silence-Breaking". *The Journal of Northeast Asian History*.

Perjanjian-Perjanjian

United Nations. 1951. *Treaty of Peace with Japan. Signed at San Francisco, on 8 September 1951.* (Diakses dari <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20136/volume-136-i-1832-english.pdf> pada 10 November 2016)

United Nations. 1966. *Japan and Republic of Korea: Agreement on the Settlement of Problems Concerning Property and Claims and on Economic Co-operation.* (Diakses dari <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20583/volume-583-I-8473-English.pdf> pada 10 November 2016)

Media Online

- Asan Institute for Policy Studies. 2015. *South Korea and Their Neighbors 2015*. (Diakses dari <http://www.en.asaninst.org/contents/south-koreans-and-their-neighbors/> pada 9 Desember 2016)
- Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Closing of the Asian Women's Fund*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e3/dissolution.html> pada 10 Oktober 2016)
- Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Documents of Japanese Government and the AWF*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e6/statement-05.html> pada 10 Oktober 2016)
- Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Establishment of The AW Fund, and the Basic Nature of Its Projects*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e2/foundation.html> pada 10 Oktober 2016)
- Asian's Women Fund. (tanpa tahun). *How Did The Comfort Women Issue Come to Light?* (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e2/survey.html> pada 16 September 2016)
- Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Number of Comfort Stations and Comfort Women*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-07.html> pada 12 November 2016)
- Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Projects by Country or Region-South Korea*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e3/korea.html> pada 10 Oktober 2016)
- Asian's Women Fund. (tanpa tahun). *Who were the Comfort Women? – Who were the Comfort Women?*. (Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-00.html> pada 22 Maret 2016)
- BBC. 2015. 'Comfort Women' – A Painful Legacy for Tokyo and Seoul (Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-35188132> pada 17 September 2016)
- BBC. 2015. 'Comfort women': Japan and South Korea Hail Agreement. (Diakses dari www.bbc.com/news/world-asia-35190464 pada 17 September 2016)
- Dharma, Silviana. 2015. *PM Jepang Minta Patung Jugun Ianfu di Korsel Dihilangkan*. (Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/11/19/18/1252478/pm-jepang-minta-patung-jugun-ianfu-di-korsel-dihilangkan> pada 17 September 2016)
- Foreign Affairs. 2016. *Japan and South Korea After the "Comfort Women" Deal*. (Diakses dari <https://www.foreignaffairs.com/articles/northeast-asia/2016-01-12/no-grand-bargain> pada 12 November 2016)
- Genron NPO dan East Asia Institute. 2015. *The 3rd Japan – South Korea Joint Public Opinion Poll (2015): Analysis Report on Comparative Data*. (Diakses dari http://www.genron-npo.net/pdf/forum_1505_en.pdf pada 9 Desember 2016)
- Global Edge. 2015. *South Korea: Trade Statistics*. (Diakses dari <http://globaledge.msu.edu/countries/south-korea/tradestats> pada 3 Desember 2016)
- GovTrack. 2007. H.Res. 121 (110th). (Diakses dari <https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hres121/text> pada 11 Oktober 2016)

- Hammond, Ron, dkk. (tanpa tahun). *Introduction to Sociology* (Diakses dari http://www.freesociologybooks.com/Introduction_To_Sociology/06_Socialization.php pada 25 Agustus 2016)
- Hyun-yoo, Jae dan Daniel Voellm. 2016. *South Korea Overview | Focus: Seoul Hotel Market*. (Diakses dari <https://www.hvs.com/article/7863-south-korea-overview-focus-seoul-hotel-market> pada 3 Desember 2016)
- Joyce, Colin. 2007. *Japanese PM Denies Wartime ‘Comfort Women’ were Forced*. (Diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1544471/Japanese-PM-denies-wartime-comfort-women-were-forced.html> pada 11 Oktober 2016)
- Kingston, Jeff. 2017. *Do the Memories of ‘Comfort Women’ Matter?*. (Diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/02/04/commentary/memories-comfort-women-matter/> pada 5 Maret 2017)
- Korea Joongang Daily. 2015. *Comforting the Comfort Women: the Tale So Far*. (Diakses dari <http://koreajoongangdailyjoins.com/news/article/Article.aspx?aid=3010963> pada 15 Oktober 2016)
- Ku, Minseoun. 2015. *The Growing “Discomfort” with Comfort Women: Analysis of Factors of Growing Salience of the Comfort Women Issue between South Korea and Japan*. (Diakses dari www.e-ir.info/2015/11/11/the-growing-discomfort-with-comfort-women/ pada 16 September 2016)
- Library of Congress. (tanpa tahun). *Japan: WWII POW and Forced Labor Compensation Cases*. (Diakses dari <http://www.loc.gov/law/help/pow-compensation/japan.php> pada 1 Maret 2016)
- McCurry, Justin. 2015. *Japanese PM Shinzo Abe Stops Short of New Apology in War Anniversary Speech*. (Diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2015/aug/14/shinzo-abe-japan-no-new-apology-second-world-war-anniversaryspeech> pada 5 Januari 2017)
- Memory & Reconciliation in the Asia-Pacific. (tanpa tahun). *Issues: Comfort Women*. (Diakses dari <https://www.gwu.edu/~memory/issues/comfortwomen/> pada 15 Oktober 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1992. *Statement by Chief Cabinet Secretary Koichi Kato on the Issue of the so-called "Wartime Comfort Women" from the Korean Peninsula*. (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/postwar/state9207.html> pada 9 Oktober 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1993a. *On the Issue of “Comfort Women”*. (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/postwar/issue9308.html> pada 20 September 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1993b. *Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on The Result of The Study on The Issue of "Comfort Women"*. (Diakses dari www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html pada 22 September 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1994. *Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the “Peace, Friendship, and Exchange Initiative”*. (Diakses

- dari <http://www.mofa.go.jp/announce/press/pm/murayama/state9408.html> pada 10 Oktober 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 1998. *Japan-Republic of Korea Joint Declaration: A New Japan-Republic of Korea Partnership towards the Twenty-first Century.* (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/korea/joint9810.html> pada 25 September 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2001. *Letter from Prime Minister Junichiro Koizumi to the Former Comfort Women.* (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/pmletter.html> pada 25 September 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2013. *The Views of the Government of Japan on Issues of History Including “Comfort Women”.* (Diakses dari http://www.mofa.go.jp/policy/page3e_000118.html pada 24 Oktober 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2014a. *Details of Exchanges Between Japan and the Republic of Korea (ROK) Regarding the Comfort Women Issue ~ From the Drafting of the Kono Statement to the Asian Women’s Fund ~.* (Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/files/000042171.pdf> pada 21 September 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2014b. *Remarks by Prime Minister Abe during the Upper House Budget Session.* (Diakses dari http://www.mofa.go.jp/a_o/rp/page3e_000155.html pada 17 Oktober 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2015a. *Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion.* (Diakses dari http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html pada 14 April 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2015b. *Diplomatic Blue Book 2015 Chapter 1: International Situation and Japan’s Diplomacy Heading toward the Future based on the Path we have walked over the Past 70 Years.* (Diakses dari http://www.mofa.go.jp/fp/pp/page24e_000100.html pada 12 November 2016)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2015c. *Japan-Republic of Korea Relations Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion.* (Diakses dari http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html pada 17 Oktober 2016)
- Moodie, Martin. 2014. *Chinese Visitor Numbers to South Korea Boom but Japanese Slip.* (Diakses dari <https://www.moodiedavittreport.com/chinese-visitor-numbers-to-south-korea-boom-but-japanese-slip/> pada 3 Desember 2016)
- Murphy, Peter. 2016. *The Limit of the Japan-South Korea Military Relationship.* (Diakses dari <http://www.thediplomat.com/2016/09/the-limits-of-the-japan-south-korea-military-relationship/> pada 10 Desember 2016)
- Niksich, Larry. 2007. *Japanese Military’s “Comfort Women” System.* (Diakses dari http://www.global-alliance.net/CW-Documents/040307_CRS__Comfort-Women.pdf pada 15 Oktober 2016)

- Okuzono, Hideki. 2015. "South Korean Judiciary Shakes Japan-South Korea Relations". *International Circumstances in the Asia-Pacific Series, Japan Digital Library.* (Diakses dari http://www2.jiia.or.jp/en/digital_library/korean_peninsula.php pada 23 November 2016)
- Onishi, Norimitsu. 2007. *In Japan, a Historian Stands by Proof of Wartime Sex Slavery.* (Diakses dari http://www.nytimes.com/2007/03/31/world/asia/31yoshimi.html?_r=0 pada 29 September 2016)
- Pollmann, Mina. 2015. 'Comfort Women' Issue Dominates Rare Japan – Korea Bilateral Talks. (Diakses dari <http://www.thediplomat.com/2015/11/comfort-women-issue-dominates-rare-japan-korea-bilateral-talks/> pada 17 Oktober 2016)
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. 1996. 日韓共同記者会見 (Japan-South Korea Joint Press Conference). (Diakses dari <http://www.kantei.go.jp/jp/hasimotosouri/speech/1996/kisya-0625.html> pada 29 Agustus 2016)
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. 2013a. *Address by Prime Minister Shinzo Abe, at The Sixty-Eighth Session of The General Assembly of The United Nations.* (Diakses dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201309/26generaldebate_e.html pada 12 November 2016)
- Prime Minister and His Cabinet. 2013b. *Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe Following his Participation in the APEC and TPP Summit Meetings and the ASEAN-Related Summit Meetings.* (Diakses dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201310/10naigai_e.html pada 10 Desember 2016)
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. 2013c. *Statement by Prime Minister Abe - Pledge for everlasting peace -* (Diakses dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201312/1202986_7801.html pada 27 Oktober 2016)
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. 2015. *Statement by Prime Minister Abe.* (Diakses dari http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201508/0814statement.html pada 30 Januari 2017)
- Seong-jae, Min. 2005. *Roh Sees "Diplomatic War" with Japan.* (Diakses dari <http://www.koreajoongang-dailyjoins.com/news/article/article.aspx?aid=2545753> pada 2 Desember 2016)
- Sheen, Seongho dan Jina Kim. 2012. "What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact?". *Asia Pacific Buletin Number 176.* (Diakses dari <http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb176.pdf> pada 26 Oktober 2016)
- Suzuki, Hitoshi. 2004. *Ban Lifted on Japanese Popular Culture in South Korea.* (Diakses dari http://www.iist.or.jp/wf/magazine/0241/0241_E.html pada 12 November 2016)

- The Asahi Shimbun. 2016. *14 Former 'Comfort Women' Positive about Japan-South Korea Agreement.* (Diakses dari <http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201602050050.html> pada 12 November 2016)
- The Globalist. 2005. *South Korea's Roh Moo-Hyun: What Japan Should Learn From Europe.* (Diakses dari <http://www.theglobalist.com/south-koreas-roh-moo-hyun-what-japan-should-learn-from-europe/> pada 25 September 2016)
- The Guardian. 2015. *Japan and South Korea Summit Signals Thaw in Relations.* (Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/02/japan-south-korea-summit-thaw-in-relations> pada 17 Oktober 2016)
- The Japan Times. 2014. *Abe, Park Chat Briefly in Beijing, Agree to Advance Working-Level Talks.* (Diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/news/2014/11/11/national/politics-diplomacy/abe-park-speak-informally-dinner-apec-leaders/#.WAR0WvRSqy> pada 17 Oktober 2016)
- The Japan Times. 2015a. *Abe, Park Hold First Bilateral Talks since Taking Office, Address 'Comfort Women' Dispute* (Diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/02/national/abe-park-hold-first-bilateral-talks-since-taking-office/#.VxtoFDFSoqx> pada 23 Oktober 2016)
- The Japan Times. 2015b. *Japan-South Korea Deal on 'Comfort Women' Draws Mixed Reaction.* (Diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/29/national/politics-diplomacy/japan-south-korea-deal-comfort-women-draws-mixed-reaction/> pada 12 November 2016)
- The Korean Council. (tanpa tahun). *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan.* (Diakses dari https://www.womenandwar.net/contents/general/general.nx?page_str_menu=2201 pada 17 September 2016)
- The New York Times. 2015. *Japan and South Korea Settle Dispute Over Wartime 'Comfort Women'.* (Diakses dari http://www.nytimes.com/2015/12/29/world/asia/comfort-women-south-korea-japan.html?_r=0 pada 12 November 2016)
- The Observatory of Economic Complexity. 2013a. *What does Japan Export to South Korea?* (2013). (Diakses dari http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/jpn/kor/show/2013/ pada 3 Desember 2016)
- The Observatory of Economic Complexity. 2013b. *What does South Korea Export to Japan?* (2013). (Diakses dari http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/kor/jpn/show/2013/ pada 3 Desember 2016)
- The White House. 2016. *Remarks by President Obama, President Park Geun-Hye of the Republic of Korea, and Prime Minister Shinzo Abe of Japan After Trilateral Meeting.* (Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/31/remarks-president-obama-president-park-geun-hye-republic-korea-and-prime> pada 30 November 2016)

- Tisdall, Simon. 2015. *Korean Comfort Women Agreement is A Triumph for Japan and the US.* (Diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2015/dec/28/korean-comfort-women-agreement-triumph-japan-united-states-second-world-war> pada 23 Oktober 2016)
- UN Economic and Social Council. 1996. *Report on the Mission to the Democratic People's Republic of Korea, the Republic of Korea, and Japan on the Issue of Military Sexual Slavery in Wartime.* (Diakses dari www.awf.or.jp/pdf/h0004.pdf pada 20 Desember 2016)
- Whan-woo, Yi. 2015. *Japan Steps Up Demands for Removal of "Girl Statue".* (Diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/11/120_190857.html pada 23 Oktober 2016)
- Woo, Jaeyeon. 2011. *Tears, Gratitude and Anger Mark the 1,000th Protest.* (Diakses dari <http://blogs.wsj.com/korearealtime/2011/12/14/tears-gratitude-and-anger-mark-the-1000th-protest/> pada 12 November 2016)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Japan-Republic of Korea Relations Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion

Foreign Minister Kishida (Japan)

The Government of Japan and the Government of the Republic of Korea (ROK) have intensively discussed the issue of comfort women between Japan and the ROK at bilateral meetings including the Director-General consultations. Based on the result of such discussions, I, on behalf of the Government of Japan, state the following:

- (1) The issue of comfort women, with an involvement of the Japanese military authorities at that time, was a grave affront to the honor and dignity of large numbers of women, and the Government of Japan is painfully aware of responsibilities from this perspective. As Prime Minister of Japan, Prime Minister Abe expresses anew his most sincere apologies and remorse to all the women who underwent immeasurable and painful experiences and suffered incurable physical and psychological wounds as comfort women.
- (2) The Government of Japan has been sincerely dealing with this issue. Building on such experience, the Government of Japan will now take measures to heal psychological wounds of all former comfort women through its budget. To be more specific, it has been decided that the Government of the ROK establish a foundation for the purpose of providing support for the former comfort women, that its funds be contributed by the Government of Japan as a one-time contribution through its budget, and that projects for recovering the honor and dignity and healing the psychological wounds of all former comfort women be carried out under the cooperation between the Government of Japan and the Government of the ROK.
- (3) While stating the above, the Government of Japan confirms that this issue is resolved finally and irreversibly with this announcement, on the premise that the Government will steadily implement the measures specified in (2) above. In addition, together with the Government of the ROK, the Government of Japan will refrain from accusing or criticizing each other regarding this issue in the international community, including at the United Nations.

Foreign Minister Yun (Republic of Korea)

The Government of the Republic of Korea (ROK) and the Government of Japan have intensively discussed the issue of comfort women between the ROK and Japan at bilateral meetings including the Director-General consultations. Based on the result of such discussions, I, on behalf of the Government of the ROK, state the following:

- (1) The Government of the ROK values the GOJ's announcement and efforts made by the Government of Japan in the lead-up to the issuance of the announcement and confirms, together with the GOJ, that the issue is resolved finally and irreversibly with this announcement, on the premise that the

Government of Japan will steadily implement the measures specified in 1. (2) above. The Government of the ROK will cooperate in the implementation of the Government of Japan's measures.

- (2) The Government of the ROK acknowledges the fact that the Government of Japan is concerned about the statue built in front of the Embassy of Japan in Seoul from the viewpoint of preventing any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity, and will strive to solve this issue in an appropriate manner through taking measures such as consulting with related organizations about possible ways of addressing this issue.
- (3) The Government of the ROK, together with the Government of Japan, will refrain from accusing or criticizing each other regarding this issue in the international community, including at the United Nations, on the premise that the Government of Japan will steadily implement the measures it announced.

**Patung Simbol Ianfu (Pyeonghwa-bi) di depan Kedutaan Besar Jepang
di Seoul, Korea Selatan**



(Sumber: <http://www.businessinsider.com/comfort-woman-statue-testing-landmark-agreement-between-japan-south-korea-2015-12?IR=T&r=US&IR=T>)

**TREATY OF PEACE WITH JAPAN.
SIGNED AT SAN FRANCISCO, ON 8 SEPTEMBER 1951**

Whereas the Allied Powers and Japan are resolved that henceforth their relations shall be those of nations which, as sovereign equals, cooperate in friendly association to promote their common welfare and to maintain international peace and security, and are therefore desirous of concluding a Treaty of Peace which will settle questions still outstanding as a result of the existence of a state of war between them ;

Whereas Japan for its part declares its intention to apply for membership in the United Nations and in all circumstances to conform to the principles of the Charter of the United Nations ; to strive to realize the objectives of the Universal Declaration of Human Rights ; to seek to create within Japan conditions of stability and well-being as defined in Articles 55 and 56 of the Charter of the United Nations and already initiated by post-surrender Japanese legislation and in public and private trade and commerce to conform to internationally accepted fair practices ;

Whereas the Allied Powers welcome the intentions of Japan set out in the foregoing paragraph ;

The Allied Powers and Japan have therefore determined to conclude the present Treaty of Peace, and have accordingly appointed the undersigned Plenipotentiaries, who, after presentation of their full powers, found in good and due form, have agreed on the following provisions :

**CHAPTER I
PEACE**

Article 1

- (a) The state of war between Japan and each of the Allied Powers is terminated as from the date on which the present Treaty comes into force between Japan and the Allied Power concerned as provided for in Article 23.
- (b) The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters.

**CHAPTER II
TERRITORY**

Article 2

- (a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.
- (b) Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores.
- (c) Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of September 5, 1905.

- (d) Japan renounces all right, title and claim in connection with the League of Nations Mandate System, and accepts the action of the United Nations Security Council of April 2, 1947, extending the trusteeship system to the Pacific Islands formerly under mandate to Japan.
- (e) Japan renounces all claim to any right or title to or interest in connection with any part of the Antarctic area, whether deriving from the activities of Japanese nationals or otherwise.
- (f) Japan renounces all right, title and claim to the Spratly Islands and to the Paracel Islands.

Article 3

Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, Nansei Shoto south of 29° north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Sofu Gan (including the Bonin Islands, Rosario Island and the Volcano Islands) and Parece Vela and Marcus Island. Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters.

Article 4

- (a) Subject to the provisions of paragraph (V) of this Article, the disposition of property of Japan and of its nationals in the areas referred to in Article 2, and their claims, including debts, against the authorities presently administering such areas and the residents (including juridical persons) thereof, and the disposition in Japan of property of such authorities and residents, and of claims, including debts, of such authorities and residents against Japan and its nationals, shall be the subject of special arrangements between Japan and such authorities. The property of any of the Allied Powers or its nationals in the areas referred to in Article 2 shall, in so far as this has not already been done, be returned by the administering authority in the condition in which it now exists. (The term nationals whenever used in the present Treaty includes juridical persons.)
- (b) Japan recognizes the validity of dispositions of property of Japan and Japanese nationals made by or pursuant to directives of the United States Military Government in any of the areas referred to in Articles 2 and 3.
- (c) Japanese-owned submarine cables connecting Japan with territory removed from Japanese control pursuant to the present Treaty shall be equally divided, Japan retaining the Japanese terminal and adjoining half of the cable, and the detached territory the remainder of the cable and connecting terminal facilities.

**CHAPTER III
SECURITY**

Article 5

- (a) Japan accepts the obligations set forth in Article 2 of the Charter of the United Nations, and in particular the obligations
 - (i) to settle its international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered ;
 - (ii) to refrain in its international relations from the threat or use 'of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations ;
 - (iii) to give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the Charter and to refrain from giving assistance to any State against which the United Nations may take preventive or enforcement action.
- (b) The Allied Powers confirm that they will be guided by the principles of Article 2 of the Charter of the United Nations in their relations with Japan.
- (c) The Allied Powers for their part recognize that Japan as a sovereign nation possesses the inherent right of individual or collective self-defense referred to in Article 51 of the Charter of the United Nations and that Japan may voluntarily enter into collective security arrangements.

Article 6

- (a) All occupation forces of the Allied Powers shall be withdrawn from Japan as soon as possible after the coming into force of the present Treaty, and in any case not later than 90 days thereafter. Nothing in this provision shall, however, prevent the stationing or retention of foreign armed forces in Japanese territory under or in consequence of any bilateral or multilateral agreements which have been or may be made between one or more of the Allied Powers, on the one hand, and Japan on the other.
- (b) The provisions of Article 9 of the Potsdam Proclamation of July 26, 1945, dealing with the return of Japanese military forces to their homes, to the extent not already completed, will be carried out.
- (c) All Japanese property for which compensation has not already been paid, which was supplied for the use of the occupation forces and which remains in the possession of those forces at the time of the coming into force of the present Treaty, shall be returned to the Japanese Government within the same 90 days unless other arrangements are made by mutual agreement.

CHAPTER IV
POLITICAL AND ECONOMIC CLAUSES

Article 7

- (a) Each of the Allied Powers, within one year after the present Treaty has come into force between it and Japan, will notify Japan which of its prewar bilateral treaties or conventions with Japan it wishes to continue in force or revive, and any treaties or conventions so notified shall continue in force or be revived subject only to such amendments as may be necessary to ensure conformity with the present Treaty. The treaties and conventions so notified shall be

considered as having been continued in force or revived three months after the date of notification and shall be registered with the Secretariat of the United Nations. All such treaties and conventions as to which Japan is not so notified shall be regarded as abrogated.

- (b) Any notification made under paragraph (a) of this Article may except from the operation or revival of a treaty or convention any territory for the international relations of which the notifying Power is responsible, until three months after the date on which notice is given to Japan that such exception shall cease to apply.

Article 8

- (a) Japan will recognize the full force of all treaties now or hereafter concluded by the Allied Powers for terminating the state of war initiated on September 1, 1939, as well as any other arrangements by the Allied Powers for or in connection with the restoration of peace. Japan also accepts the arrangements made for terminating the former League of Nations and Permanent Court of International Justice.
- (b) Japan renounces all such rights and interests as it may derive from being a signatory power of the Conventions of St. Germain-en-Laye of September 10, 1919, and the Straits Agreement of Montreux of July 20, 1936, and from Article 16 of the Treaty of Peace with Turkey signed at Lausanne on July 24, 1923.
- (c) Japan renounces all rights, titles and interests acquired under, and is discharged from all obligations resulting from, the Agreement between Germany and the Creditor Powers of January 20, 1930, and its Annexes, including the Trust Agreement, dated May 17, 1930 ; the Convention of January 20, 1930, respecting the Bank for International Settlements ; and the Statutes of the Bank for International Settlements. Japan will notify to the Ministry of Foreign Affairs in Paris within six months of the first coming into force of the present Treaty its renunciation of the rights, title and interests referred to in this paragraph.

Article 9

Japan will enter promptly into negotiations with the Allied Powers so desiring for the conclusion of bilateral and multilateral agreements providing for the regulation or limitation of fishing and the conservation and development of fisheries on the high seas.

Article 10

Japan renounces all special rights and interests in China, including all benefits and privileges resulting from the provisions of the final Protocol signed at Peking on September 7, 1901, and all annexes, notes and documents supplementary thereto, and agrees to the abrogation in respect to Japan of the said protocol, annexes, notes and documents.

Article 11

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.

Article 12

- (a) Japan declares its readiness promptly to enter into negotiations for the conclusion with each of the Allied Powers of treaties or agreements to place their trading, maritime and other commercial relations on a stable and friendly basis.
- (b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, Japan will, during a period of four years from the first coming into force of the present Treaty
 - (1) accord to each of the Allied Powers, its nationals, products and vessels
 - (i) most-favored-nation treatment with respect to customs duties, charges, restrictions and other regulations on or in connection with the importation and exportation of goods ;
 - (ii) national treatment with respect to shipping, navigation and imported goods, and with respect to natural and juridical persons and their interests such treatment to include all matters pertaining to the levying and collection of taxes, access to the courts, the making and performance of contracts, rights to property (tangible and intangible), participation in juridical entities constituted under Japanese law, and generally the conduct of all kinds of business and professional activities ;
 - (2) ensure that external purchases and sales of Japanese state trading enterprises shall be based solely on commercial considerations.
- (c) In respect to any matter, however, Japan shall be obliged to accord to an Allied Power national treatment, or most-favored-nation treatment, only to the extent that the Allied Power concerned accords Japan national treatment or mostfavored-nation treatment, as the case may be, in respect of the same matter. The reciprocity envisaged in the foregoing sentence shall be determined, in the case of products, vessels and juridical entities of, and persons domiciled in, any non-metropolitan territory of an Allied Power, and in the case of juridical entities of, and persons domiciled in, any state or province of an Allied Power having a federal government, by reference to the treatment accorded to Japan in such territory, state or province.
- (d) In the application of this Article, a discriminatory measure shall not be considered to derogate from the grant of national or most-favored-nation treatment, as the case may be, if such measure is based on an exception customarily provided for in the commercial treaties of the party applying it,

or on the need to safeguard that party's external financial position or balance of payments (except in respect to shipping and navigation), or on the need to maintain its essential security interests, and provided such measure is proportionate to the circumstances and not applied in an arbitrary or unreasonable manner.

- (e) Japan's obligations under this Article shall not be affected by the exercise of any Allied rights under Article 14 of the present Treaty ; nor shall the provisions of this Article be understood as limiting the undertakings assumed by Japan by virtue of Article 15 of the Treaty.

Article 13

- (a) Japan will enter into negotiations with any of the Allied Powers, promptly upon the request of such Power or Powers, for the conclusion of bilateral or multi lateral agreements relating to international civil air transport.
- (b) Pending the conclusion of such agreement or agreements, Japan will, during a period of four years from the first coming into force of the present Treaty, extend to such Power treatment not less favorable with respect to air-traffic rights and privileges than those exercised by any such Powers at the date of such coming into force, and will accord complete equality of opportunity in respect to the operation and development of air services.
- (c) Pending its becoming a party to the Convention on International Civil Aviation in accordance with Article 93 thereof, Japan will give effect to the provisions of that Convention applicable to the international navigation of aircraft, and will give effect to the standards, practices and procedures adopted as annexes to the Convention in accordance with the terms of the Convention.

**CHAPTER V
CLAIMS AND PROPERTY**

Article 14

- (a) It is recognized that Japan should pay reparations to the Allied Powers for the damage and suffering caused by it during the war. Nevertheless it is also recognized that the resources of Japan are not presently sufficient, if it is to maintain a viable economy, to make complete reparation for all such damage and suffering and at the same time meet its other obligations.
Therefore,
1. Japan will promptly enter into negotiations with Allied Powers so desiring, whose present territories were occupied by Japanese forces and damaged by Japan, with a view to assisting to compensate those countries for the cost of repairing the damage done, by making available the services of the Japanese people in production, salvaging and other work for the Allied Powers in question. Such arrangements shall avoid the imposition of additional liabilities on other Allied Powers, and, where the manufacturing of raw materials is called for, they shall be supplied by

the Allied Powers in question, so as not to throw any foreign exchange burden upon Japan.

2. (I) Subject to the provisions of sub-paragraph (II) below, each of the Allied Powers shall have the right to seize, retain, liquidate or otherwise dispose of all property, rights and interests of
 - (a) Japan and Japanese nationals,
 - (b) persons acting for or on behalf of Japan or Japanese nationals, and
 - (c) entities owned or controlled by Japan or Japanese nationals,which on the first coming into force of the present Treaty were subject to its jurisdiction. The property, rights and interests specified in this subparagraph shall include those now blocked, vested or in the possession or under the control of enemy property authorities of Allied Powers, which belonged to, or were held or managed on behalf of, any of the persons or entities mentioned in (a), (b) or (c) above at the time such assets came under the controls of such authorities.
(II) The following shall be excepted from the right specified in subparagraph (I) above :
 - (i) property of Japanese natural persons who during the war resided with the permission of the Government concerned in the territory of one of the Allied Powers, other than territory occupied by Japan, except property subjected to restrictions during the war and not released from such restrictions as of the date of the first coming into force of the present ;
 - (ii) all real property, furniture and fixtures owned by the Government of Japan and used for diplomatic or consular purposes, and all personal furniture and furnishings and other private property not of an investment nature which was normally necessary for the carrying out of diplomatic and consular functions, owned by Japanese diplomatic and consular personnel ;
 - (iii) property belonging to religious bodies or private charitable institutions and used exclusively for religious or charitable purposes ;
 - (iv) property, rights and interests which have come within its jurisdiction in consequence of the resumption of trade and financial relations subsequent to September 2, 1945, between the country concerned and Japan, except such as have resulted from transactions contrary to the laws of the Allied Power concerned ;
 - (v) obligations of Japan or Japanese nationals, any right, title or interest intangible property located in Japan, interests in enterprises organized under the laws of Japan, or any paper evidence thereof ; provided that this exception shall only apply to obligations of Japan and its nationals expressed in Japanese currency.

(III) Property referred to in exceptions (i) through (v) above shall be returned subject to reasonable expenses for its preservation and administration. If any such property has been liquidated the proceeds shall be returned instead.

- (IV) The right to seize, retain, liquidate or otherwise dispose of property as provided in sub-paragraph (I) above shall be exercised in accordance with the laws of the Allied Power concerned, and the owner shall have only such rights as may be given him by those laws.
- (V) The Allied Powers agree to deal with Japanese trademarks and literary and artistic property rights on a basis as favorable to Japan as circumstances ruling in each country will permit.
- (b) Except as otherwise provided in the present Treaty, the Allied Powers waive all reparations claims of the Allied Powers, other claims of the Allied Powers and their nationals arising out of any actions taken by Japan and its nationals in the course of the prosecution of the war, and claims of the Allied Powers for direct military costs of occupation.

Article 15

- (a) Upon application made within nine months of the coming into force of the present Treaty between Japan and the Allied Power concerned, Japan will, within six months of the date of such application, return the property, tangible and intangible, and all rights or interests of any kind in Japan of each Allied Power and its nationals which was within Japan at any time between December 7, 1941, and September 2, 1945, unless the owner has freely disposed thereof without duress or fraud. Such property shall be returned free of all encumbrances and charges to which it may have become subject because of the war, and without any charges for its return. Property whose return is not applied for by or on behalf of the owner or by his Government within the prescribed period may be disposed of by the Japanese Government as it may determine. In cases where such property was within Japan on December 7, 1941, and cannot be returned or has suffered injury or damage as a result of the war, compensation will be made on terms not less favorable than the terms provided in the draft Allied Powers Property Compensation Law approved by the Japanese Cabinet on July 13, 1951.
- (b) With respect to industrial property rights impaired during the war, Japan will continue to accord to the Allied Powers and their nationals benefits no less than those heretofore accorded by Cabinet Orders No. 309 effective September 1, 1949, No. 12 effective January 28, 1950, and No. 9 effective February 1, 1950, all as now amended, provided such nationals have applied for such benefits within the time limits prescribed therein.
- (c) (i) Japan acknowledges that the literary and artistic property rights which existed in Japan on December 6, 1941, in respect to the published and unpublished works of the Allied Powers and their nationals have continued in force since that date, and recognizes those rights which have arisen, or but for the war would have arisen, in Japan since that date, by the operation of any conventions and agreements to which Japan was a party on that date, irrespective of whether or not such conventions or agreements were abrogated or suspended upon or since the outbreak of war by the domestic law of Japan or of the Allied Power concerned.

(ii) Without the need for application by the proprietor of the right and without the payment of any fee or compliance with any other formality, the period from December 7, 1941, until the coming into force of the present Treaty between Japan and the Allied Power concerned shall be excluded from the running of the normal term of such rights ; and such period, with an additional period of six months, shall be excluded from the time within which a literary work must be translated into Japanese in order to obtain translating rights in Japan.

Article 16

As an expression of its desire to indemnify those members of the armed forces of the Allied Powers who suffered undue hardships while prisoners of war of Japan, Japan will transfer its assets and those of its nationals in countries which were neutral during the war, or which were at war with any of the Allied Powers, or, at its option, the equivalent of such assets, to the International Committee of the Red Cross which shall liquidate such assets and distribute the resultant fund to appropriate national agencies, for the benefit of former prisoners of war and their families on such basis as it may determine to be equitable. The categories of assets described in Article 14 (a) 2(11) (ii) through (v) of the present Treaty shall be excepted from transfer, as well as assets of Japanese natural persons not residents of Japan on the first coming into force of the Treaty. It is equally understood that the transfer provision of this Article has no application to the 19,770 shares in the Bank for International Settlements presently owned by Japanese financial institutions.

Article 17

- (a) Upon the request of any of the Allied Powers, the Japanese Government shall review and revise in conformity with international law any decision or order of the Japanese Prize Courts in cases involving ownership rights of nationals of that Allied Power and shall supply copies of all documents comprising the records of these cases, including the decisions taken and orders issued. In any case in which such review or revision shows that restoration is due, the provisions of Article 15 shall apply to the property concerned.
- (b) The Japanese Government shall take the necessary measures to enable nationals of any of the Allied Powers at any time within one year from the coming into force of the present Treaty between Japan and the Allied Power concerned to submit to the appropriate Japanese authorities for review any judgment given by a Japanese court between December 7, 1941, and such coming into force, in any proceedings in which any such national was unable to make adequate presentation of his case either as plaintiff or defendant. The Japanese Government shall provide that, where the national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored in the position in which he was before the judgment was given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances.

Article 18

- (a) It is recognized that the intervention of the state of war has not affected the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts (including those in respect of bonds) which existed and rights which were acquired before the existence of a state of war, and which are due by the Government or nationals of Japan to the Government or nationals of one of the Allied Powers, or are due by the Government or nationals of one of the Allied Powers to the Government or nationals of Japan. The intervention of a state of war shall equally not be regarded as affecting the obligation to consider on their merits claims for loss or damage to property or for personal injury or death which arose before the existence of a state of war, and which may be presented or re-presented by the Government of one of the Allied Powers to the Government of Japan, or by the Government of Japan to any of the Governments of the Allied Powers. The provisions of this paragraph are without prejudice to the rights conferred by Article 14.
- (b) Japan affirms its liability for the prewar external debt of the Japanese State and for debts of corporate bodies subsequently declared to be liabilities of the Japanese State, and expresses its intention to enter into negotiations at an early date with its creditors with respect to the resumption of payments on those debts ; to encourage negotiations in respect to other prewar claims and obligations ; and to facilitate the transfer of sums accordingly.

Article 19

- (a) Japan waives all claims of Japan and its nationals against the Allied Powers and their nationals arising out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war, and waives all claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of any of the Allied Powers in Japanese territory prior to the coming into force of the present Treaty.
- (b) The foregoing waiver includes any claims arising out of actions taken by any of the Allied Powers with respect to Japanese ships between September 1, 1939, and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts arising in respect to Japanese prisoners of war and civilian internees in the hands of the Allied Powers, but does not include Japanese claims specifically recognized in the laws of any Allied Power enacted since September 2, 1945.
- (c) Subject to reciprocal renunciation, the Japanese Government also renounces all claims (including debts) against Germany and German nationals on behalf of the Japanese Government and Japanese nationals, including inter governmental claims and claims for loss or damage sustained during the war, but excepting (a) claims in respect of contracts entered into and rights acquired before September 1, 1939, and (b) claims arising out of trade and financial relations between Japan and Germany after September 2, 1945. Such renunciation shall not prejudice actions taken in accordance with Articles 16 and 20 of the present Treaty.

- (d) Japan recognizes the validity of all acts and omissions done during the period of occupation under or in consequence of directives of the occupation authorities or authorized by Japanese law at that time, and will take no action subjecting Allied nationals to civil or criminal liability arising out of such acts or omissions.

Article 20

Japan will take all necessary measures to ensure such disposition of German assets in Japan as has been or may be determined by those powers entitled under the Protocol of the proceedings of the Berlin Conference of 1945 to dispose of those assets, and pending the final disposition of such assets will be responsible for the conservation and administration thereof.

Article 21

Notwithstanding the provisions of Article 25 of the present Treaty, China shall be entitled to the benefits of Articles 10 and 14(a)2 ; and Korea to the benefits of Articles 2, 4, 9 and 12 of the present Treaty.

**CHAPTER VI
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Article 22

If in the opinion of any Party to the present Treaty there has arisen a dispute concerning the interpretation or execution of the Treaty, which is not settled by reference to a special claims tribunal or by other agreed means, the dispute shall, at the request of any party thereto, be referred for decision to the International Court of Justice. Japan and those Allied Powers which are not already parties to the Statute of the International Court of Justice will deposit with the Registrar of the Court, at the time of their respective ratifications of the present Treaty, and in conformity with the resolution of the United Nations Security Council, dated October 15, 1946, a general declaration accepting the jurisdiction, without special agreement, of the Court generally in respect to all disputes of the character referred to in this Article.

**CHAPTER VII
FINAL CLAUSES**

Article 23

- (a) The present Treaty shall be ratified by the States which sign it, including Japan, and will come into force for all the States which have then ratified it, when instruments of ratification have been deposited by Japan and by a majority, including the United States of America as the principal occupying Power, of the following States, namely Australia, Canada, Ceylon, France, Indonesia, the Kingdom of the Netherlands, New Zealand, Pakistan, the Republic of the Philippines, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America. The present Treaty shall

come into force for each State which subsequently ratifies it, on the date of the deposit of its instrument of ratification.

- (b) If the Treaty has not come into force within nine months after the date of the deposit of Japan's ratification, any State which has ratified it may bring the Treaty into force between itself and Japan by a notification to that effect given to the Governments of Japan and the United States of America not later than three years after the date of deposit of Japan's ratification.

Article 24

All instruments of ratification shall be deposited with the Government of the United States of America which will notify all the signatory States of each such deposit, of the date of the coming into force of the Treaty under paragraph (a) of Article 23, and of any notifications made under paragraph (b) of Article 23.

Article 25

For the purposes of the present Treaty the Allied Powers shall be the States at war with Japan, or any State which previously formed a part of the territory of a State named in Article 23, provided that in each case the State concerned has signed and ratified the Treaty. Subject to the provisions of Article 21, the present Treaty shall not confer any rights, titles or benefits on any State which is not an Allied Power as herein defined ; nor shall any right, title or interest of Japan be deemed to be diminished or prejudiced by any provision of the Treaty in favor of a State which is not an Allied Power as so defined.

Article 26

Japan will be prepared to conclude with any State which signed or adhered to the United Nations Declaration of January 1, 1942, and which is at war with Japan, or with any State which previously formed a part of the territory of a State named in Article 23, which is not a signatory of the present Treaty, a bilateral Treaty of Peace on the same or substantially the same terms as are provided for in the present Treaty, but this obligation on the part of Japan will expire three years after the first coming into force of the present Treaty. Should Japan make a peace settlement or war claims settlement with any State granting that State greater advantages than those provided by the present Treaty, those same advantages shall be extended to the parties to the present Treaty.

Article 27

The present Treaty shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America which shall furnish each signatory State with a certified copy thereof.

**AGREEMENT ON THE SETTLEMENT OF PROBLEMS CONCERNING
PROPERTY AND CLAIMS AND ON ECONOMIC CO-OPERATION
BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF KOREA.
SIGNED AT TOKYO, ON 22 JUNE 1965**

Japan and the Republic of Korea,

Desiring to settle [the] problem concerning property of the two countries and their nationals and claims between the two countries and their nationals; and

Desiring to promote the economic co-operation between the two countries;

Have agreed as follows :

Article I

1. To the Republic of Korea Japan shall :
 - (a) Supply the products of Japan and the services of the Japanese people, the total value of which will be so much in yen as shall be equivalent to three hundred million United States dollars (\$300,000,000) at present computed at one hundred and eight billion yen (¥108,000,000,000), in grants [on a non-repayable basis] within the period of ten years from the date of the entry into force of the present Agreement. The supply of such products and services in each year shall be limited to [shall be such] such amount in yen as shall be equivalent to thirty million United States dollars (\$30,000,000) at present computed at ten billion eight hundred million yen (¥10,800,000,000); in case the supply of any one year falls short of the said amount, the remainder shall be added to the amounts of the supplies for the next and subsequent years. However, the ceiling on[4] the amount of the supply for any one year can be raised [increased] by agreement between the Governments of the Contracting Parties.
 - (b) Extend long-term and low-interest loans up to such amount in yen as shall be equivalent to two hundred million United States dollars (\$200,000,000) at present computed at seventy-two billion yen (¥72,000,000,000), which the Government of the Republic of Korea of the products of Japan and the services of the Japanese people necessary in implementing the projects to be determined in accordance with arrangements to be concluded under the provisions of paragraph 3 of the present Article, within the period of ten years from the date of the entry into force of the present Agreement. Such loans shall be extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan, and the Government of Japan shall take necessary measures in order that the said Fund will be able to secure the necessary funds for implementing the loans evenly each year.
- The above-mentioned supply and loans should be such that will be conducive to the economic development of the Republic of Korea.
2. The Governments of the Contracting Parties shall establish, as an organ of consultation between the two Governments with powers to recommend on matters concerning the implementation of the provisions of the present

- Article, a Joint Committee composed of representatives of the two Governments.
3. The Governments of the Contracting Parties shall conclude necessary arrangements for the implementation of the provisions of the present Article.

Article II

1. The Contracting Parties confirm that [the] problem concerning property, rights and interests of the two Contracting Parties and their nationals (including juridical persons) and concerning claims between the Contracting Parties and their nationals, including those provided for in Article IV, paragraph (a) of the Treaty of Peace with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951, is settled completely and finally.
2. The provisions of the present Article shall not affect the following (excluding those subject to the special measures which the respective Contracting Parties have taken by the date of the signing of the present Agreement):
 - (a) Property, rights and interests of those nationals of either Contracting Party who have ever resided in the other country in the period between August 15, 1947 and the date of the signing of the present Agreement;
 - (b) Property, rights and interests of either Contracting Party and its nationals, which have been acquired or have come within the jurisdiction of the other Contracting Party in the course of normal contacts on or after August 15, 1945.
3. Subject to the provisions of paragraph 2, no contention shall be made with respect to the measures on property, rights and interests of either Contracting Party and its nationals which are within the jurisdiction of the other Contracting Party on the date of the signing of the present Agreement, or with respect to any claims of either Contracting Party and its nationals against the other Contracting Party and its nationals arising from the causes which occurred on or before the said date.

Article III

1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation and implementation of the present Agreement shall be settled, first of all, through diplomatic channels.
2. Any dispute which fails to be settled under the provision of paragraph 1 shall be referred for decision to an arbitration board composed of three arbitrators, one to be appointed by the Government of each Contracting Party within a period of thirty days from the date of receipt by the Government of either Contracting Party from the Government of the other of a note requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator to be agreed upon by the two arbitrators so chosen within a further period of thirty days or the third arbitrator to be appointed by the government of a third country agreed upon within such further period by the two arbitrators, provided that the third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.
3. If, within the periods respectively referred to, the Government of either Contracting Party fails to appoint an arbitrator, or the third arbitrator or a

- third country is not agreed upon, the arbitration board shall be composed of the two arbitrators to be designated by each of the governments of the two countries respectively chosen by the Governments of the Contracting Parties within a period of thirty days and the third arbitrator to be designated by the government of a third country to be determined upon consultation between the governments so chosen.
4. The Governments of the Contracting Parties shall abide by any award made by the arbitration board under the provisions of the present Article.

Article IV

The present Agreement shall be ratified. The instruments of ratification shall be exchanged at Seoul as soon as possible. The present Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Tokyo, in the Japanese and Korean languages, both being equally authentic, this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-five.

For Japan :
Etsusaburo Shiina
Shinichi Takasugi

For the Republic of Korea :
Tong Won Lee
Dong Jo Kim